

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan




Oleh  
A. Mappatunru  
NIM 11110244030

PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
OKTOBER 2015

## PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT” yang disusun oleh A. Mappatunru, NIM 11110244030 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Yogyakarta, 28 Agustus 2015  
Pembimbing

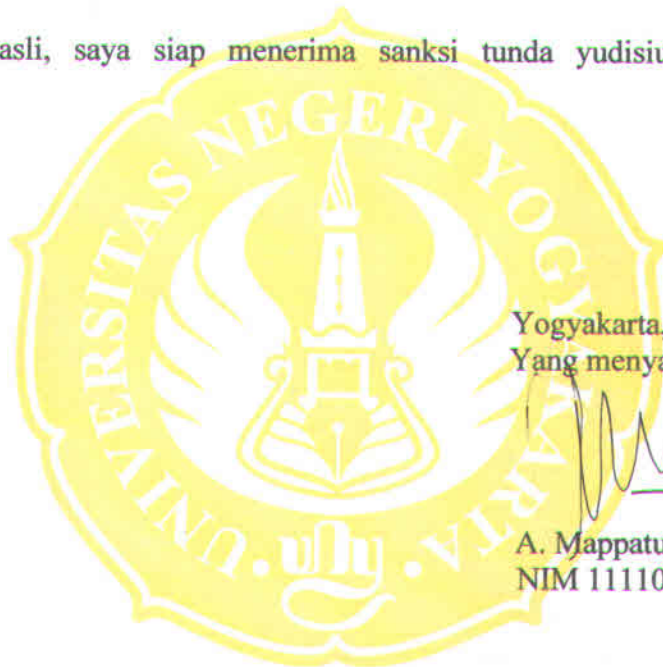
  
Ariefa Efianingrum, M.Si.  
NIP. 19740411 199802 2 001




## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi tunda yudisium pada periode berikutnya.






Yogyakarta, 28 Agustus 2015  
Yang menyatakan,

  
A. Mappatunru  
NIM 11110244030

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT" yang disusun oleh A. Mappatunru, NIM 11110244030 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 September 2015 dan dinyatakan lulus.

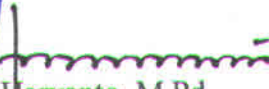
### DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Ariefa Efianingrum, M.Si.	Ketua Penguji		08/10/2015
Lusila Andriani P., M.Hum.	Sekretaris Penguji		07/10/2015
Dr. Sugito, M.A.	Penguji Utama		06/10/2015

22 OCT 2015

Yogyakarta, .....  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



  
Dr. Haryanto, M.Pd.  
NIP 19600902 198702 1 001

## MOTTO

*“Cogito Ergo Sume”*

“Aku Berfikir Maka Aku ada”

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat, nikmat, dan karunia yang diberikan kepada saya, karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, terkasih, dan tersayang, Bapak Andi Mappangara, S.Sos. dan Ibu Hj. Saharia, SE. yang tak pernah henti-hentinya mencurahkan seluruh cintanya, sayangnya, dan juga kasihnya yang tiada tara, sehingga tugas akhir skripsi ini dapat saya selesaikan dengan penuh ikhtiar dan tawakkal.
2. Kepada daerahku tercinta Kabupaten Polewali Mandar.
3. Kepada alamaterku tercinta Universitas Negeri Yogyakarta.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

Oleh  
A. Mappatunru  
NIM 11110244030

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan masalah-masalah apa saja yang mempengaruhinya, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar pada Bidang PLS Seksi Kesetaraan dan lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang terkait. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan instrumen utama adalah peneliti sendiri yang didukung dengan instrumen-instrumen pelengkap. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik analisa data berupa pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan cara menjaga ketekunan pengamatan dan menggunakan triangulasi berupa triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat masih memunculkan berbagai macam masalah. 2. Terdapat dua bentuk masalah dalam implementasinya yaitu; a) *Masalah Struktural*, yaitu masalah yang terkait dengan dinamika kinerja birokrasi pendidikan, seperti disposisi jabatan, kondisi SDM, diskriminasi jalur pendidikan, lemahnya standar keberhasilan, evaluasi yang kurang optimal, tidak adanya kebijakan khusus, dan keterbatasan dana; b) *Masalah Kultural*, yaitu masalah yang terkait dengan kondisi sosio-kultural masyarakat seperti anggapan bahwa, pendidikan tidak penting, pendidikan itu mahal, pendidikan kesetaraan adalah rendahan, kondisi psikis orang tua, dan kepasrahan pengelola PKBM terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat. 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut belum terlihat, dibuktikan dengan belum adanya kebijakan daerah yang sifatnya khusus untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan.

Kata kunci: *Implementasi, Pendidikan Kesetaraan, Polewali Mandar*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang tiada batas, sehingga penulis masih diberikan kesempatan, kehidupan, kesabaran, kekuatan, dan pengetahuan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat” ini dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Ariefa Efianingrum, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan ikhlas dan sabar membimbingku.
3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mendidik kami selama ini.
4. Dinas Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar dan seluruh lembaga-lembaga pendidikan non-formal baik PKBM maupun SKB di Kabupaten Polewali Mandar.
5. Orang tuaku Bapak Andi Mappangara, S.Sos. dan Hj. Saharia, SE. atas kasih sayang yang tak terbatas dan tak bernilai.



6. Kakak ku Andi Rima Andriani dan adik ku Andi Dewi Fairhana yang selalu memberiku semangat.
7. Alfirmata Hertanti, S.Pd. yang telah kuanggap lebih dari sahabat.
8. Saudara-saudariku mahasiswa/wi Sulawesi Barat di Yogyakarta.
9. Seluruh mahasiswa KP UNY.

Semoga kita semua selalu berada pada jalur yang benar. Semoga kita semua menjadi manusia yang berguna bagi sesama. Aamiin !!

Yogyakarta, Agustus 2015  
Penulis

A. Mappatunru  
NIM 11110244030

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Proses Kebijakan .....	10
B. Implementasi Kebijakan .....	21
C. Pendidikan Kesetaraan .....	26
D. Penelitian Relevan .....	37
E. Kerangka Berfikir .....	40
F. Pertanyaan Penelitian .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	48

C. Subjek Penelitian .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Instrumen Penelitian .....	52
F. Jenis dan Sumber Data Peneltian.....	52
G. Teknik Analisis data.....	53
H. Keabsahan data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	58
B. Hasil Penelitian .....	63
C. Pembahasan .....	98
D. Temuan Penelitian .....	132
E. Keterbatasan Penelitian .....	139
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>141</b>
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran dan Rekomendasi Kebijakan .....	143
DAFTAR PUSTAKA .....	147

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Catatan Lapangan .....	150
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara .....	151
Lampiran 3 : Hasil Wawancara .....	153
Lampiran 4 : Foto-foto .....	170
Lampiran 5 : Lembar Pengesahan Proposal Skripsi .....	173
Lampiran 6 : Surat Ijin Penelitian Fakultas Ilmu Pendidikan .....	174
Lampiran 7 : Surat Ijin Penelitian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.....	175
Lampiran 7 : Surat Ijin Penelitian Daerah Kabupaten Polewali Mandar.....	176

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 : Prosedur Analisis Kebijakan.....	15
Gambar 1-2 : Analisis Kebijakan Berorientasi Masalah.....	16
Gambar 1-3 : Kebijakan Pendidikan dalam Teori dan Praktik .....	20
Gambar 1-4 : Kerangka Berfikir.....	45

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1-1 : Indeks Pembangunan Manusia Polewali Mandar 2002-2013 .....	5
Tabel 1-2 : Periode Perkembangan Pendidikan Kesetaraan di Indonesia.....	31
Tabel 1-3 : Pendekatan dan Masalah .....	127



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap dinamika perubahan sosial dalam suatu negara. Pentingnya pendidikan telah mengubah ruang lingkup pendidikan yang pada awalnya berada pada domain domestik, kini berada pada domain publik. Pendidikan sebagai domain publik kini berada dalam tanggung jawab negara. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi hak-hak atau kebutuhan pendidikan masyarakatnya.

Di Indonesia, dinamika pendidikan nasional diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan yang berbunyi “*Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan*”. Oleh karena itu, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas berisi tentang aturan-aturan yang menjadi landasan konstitusi terhadap pemenuhan hak-hak pendidikan warga negara Indonesia. Pendidikan sebagai hak, sehingga dalam hal ini pemerintah wajib memenuhi hak pendidikan masyarakatnya, baik itu pada jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Pendidikan formal dan nonformal adalah jalur pendidikan yang telah ditetapkan dalam BAB VI pasal 13 pada UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan



menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Berbicara mengenai jalur pendidikan formal adalah suatu hal sangat lumrah. Hal tersebut menyebabkan seolah-olah ruang lingkup pendidikan hanya terbatas atau dibatasi pada jalur pendidikan formal semata. Hal ini memunculkan kecenderungan marginalisasi atau diskriminasi terhadap jalur pendidikan nonformal, seolah-olah jalur pendidikan nonformal bukanlah salah-satu pilihan utama. Padahal telah di jelaskan dalam BAB V Pasal 26 ayat 6 UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang berbunyi *“Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan”*. Bunyi ayat tersebut juga diperkuat oleh pernyataan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan bapak Muhammad Nuh yang menyatakan bahwa lulusan pendidikan nonformal memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan lulusan pendidikan formal. Oleh karena itu, pendidikan nonformal disempurnakan dengan adanya kebijakan pendidikan kesetaraan sebagai suatu program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

Pendidikan kesetaraan adalah kebijakan pendidikan di luar jalur pendidikan formal namun memiliki kedudukan yang sama dengan jalur pendidikan formal sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kata kesetaraan menunjukkan bahwa jalur pendidikan nonformal adalah jalur yang kedudukannya setara dengan jalur pendidikan formal, baik itu setara secara kualitas maupun setara dalam penetapan standar pendidikan Nasional.

Meskipun jalur pendidikan formal dan nonformal memiliki kedudukan yang sama sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, namun pada kenyataannya pola pikir kebanyakan masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa jalur pendidikan formal adalah pilihan utama. Hal tersebut menyebabkan terciptanya kesenjangan kualitas dalam dinamika pendidikan nasional.

Kesenjangan kualitas tersebut akan membentuk hierarki yang menjadikan pendidikan kesetaraan sebagai jalur pendidikan alternatif yang berada di bawah derajat jalur pendidikan formal. Hal ini tentunya akan mengancam stabilitas dinamika pendidikan nasional karena mengarah kepada penyimpangan konstitusi.

Sebagaimana yang terjadi di kota Yogyakarta, ternyata predikat kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan patut kita kaji secara mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh penulis beberapa waktu yang lalu menunjukkan suatu realita dimana kondisi pelaksanaan pendidikan kesetaraan di kota Yogyakarta mengalami kesenjangan dari aspek

struktural, standar sarana dan prasaran seperti ketersediaan gedung belajar yang belum tercukupi, beban akreditasi yang mengancam bubarinya beberapa PKBM, dan bantuan dana yang tidak menentu dari pemerintah daerah.

Penelitian tidak akan membahas mengenai kondisi pendidikan kesetaraan yang cukup memprihatinkan di kota Yogyakarta, melainkan hanya menjadikan sebagai contoh kasus yang patut dipelajari dan kemudian dipahami bersama. Penelitian ini akan mencoba mengungkap realita pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan menjadikan kasus pendidikan kesetaraan di Yogyakarta sebagai bahan perbandingan.

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah-satu Kabupaten dari enam Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Ketertarikan peneliti terhadap daerah ini mengacu pada data statistik Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2005-2012 Provinsi Sulawesi Barat, dimana Kabupaten Polewali Mandar selalu menempati posisi ter bawah. Indeks Pembangunan Manusia menjadi sebuah tolak ukur yang menjelaskan kondisi pembangunan manusia di suatu daerah berdasarkan angka dengan empat komponen sebagai indikator pengukur seperti *angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan pengeluaran per kapita rill yang disesuaikan*. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2005-2012 dapat dilihat dari tabel berikut :

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Majene</b>	66.90	68.60	69.12	70.28	70.83	71.34	71.86	72.41
<b>Polewali Mandar</b>	63.30	63.90	64.77	65.91	66.61	67.38	67.88	68.44
<b>Mamasa</b>	67.50	68.70	69.16	69.79	70.18	70.82	71.62	72.07
<b>Mamuju</b>	65.40	67.30	67.60	68.50	68.89	69.32	69.78	70.76
<b>Mamuju Utara</b>	64.50	67.90	68.84	69.57	69.55	69.99	70.41	70.79

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat

**Tabel 1-1, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat**

Ketika kebanyakan orang lebih terfokus pada pengembangan pendidikan formal, maka peneliti sendiri mencari jalan lain dengan fokus pada akar permasalahan dalam wilayah jalur pendidikan nonformal. Peneliti ini mencoba untuk mengkaji kesenjangan mutu pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar melalui aspek pendidikan nonformal di daerah tersebut lebih spesifik pada kebijakan pendidikan kesetaraan. Peneliti berandai, jika Kota Yogyakarta dengan predikat kota pendidikan masih terdapat kesenjangan dalam implementasi pendidikan kesetaraan, bagaimana dengan Kabupaten Polewali Mandar yang terlanjur memegang stigma negatif sebagai Kabupaten termiskin dengan indeks pembangunan manusia yang terendah di Sulawesi Barat. Peneliti berasumsi bahwa mungkin saja pelaksanaan kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan optimal.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya terkait mengenai kesenjangan sosial yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar adalah

bukanlah satu-satunya alasan kenapa peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut, melainkan juga karena Kabupaten Polewali Mandar adalah daerah berkembang dengan karakter kultur yang unik, sehingga peneliti merasa tertarik dan tertantang untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Oleh karena itu, dengan pertimbangan yang rasional, sehingga peneliti berniat dengan sepenuh hati untuk melakukan penelitian di Kabupaten Polewali Mandar dengan menetapkan judul penelitian “*Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar*”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup pendidikan Nasional seolah-olah dibatasi hanya pada jalur pendidikan formal, sehingga mengakibatkan terjadinya marginalisasi terhadap jalur pendidikan nonformal.
2. Kondisi beberapa PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal yang melaksanakan kebijakan pendidikan kesetaraan di Kota Yogyakarta masih sangat memprihatinkan. Hal ini diakibatkan karena belum tercapainya standar nasional pendidikan di lembaga-lembaga tersebut.
3. Index Pembangunan Manusia di Kabupaten Polewali Mandar berada pada posisi yang terendah dibandingkan Kabupaten-Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya

Kabupaten Polewali Mandar sebagai Kabupaten termiskin di Sulawesi Barat.

4. Rendahnya Index Pembangunan Manusia di Kabupaten Polewali Mandar dan tingginya tingkat kemiskinan di daerah tersebut diakibatkan karena rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar.

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus, terarah, rasional dan tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian ini pada aspek kualitas pendidikan nonformal di Kabupaten Polewali Mandar yang lebih spesifik pada implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di daerah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kebijakan pendidikan kesetaraan dan juga di setiap institusi-institusi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.

### **D. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Apa saja permasalahan-permasalahan dalam kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.
3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media keilmuan dalam upaya menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan peran terhadap pengembangan pengkajian ilmu Kebijakan Pendidikan yang lebih spesifik pada pengkajian terhadap Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan

dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau rujukan terhadap penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

## 2. Praktis

### a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam keilmuan pendidikan terutama teori-teori mengenai pendidikan dan kebijakan yang diperoleh selama kuliah di Jurusan FSP Prodi Kebijakan Pendidikan UNY dan kemudian menjadi manusia yang merdeka dan bertanggung jawab dengan cara mengaplikasikan teori-teori tersebut dalam masyarakat yang membutuhkan.

### b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar agar lebih fokus terhadap pengembangan kebijakan pendidikan kesetaraan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan keilmuan dalam pembuatan program yang terkait mengenai kebijakan pendidikan kesetaraan.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Proses Kebijakan**

##### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

*H. Hug Heglo* dalam *Abidin* (2004:21) mendefinisikan kebijakan sebagai *a course of action intended to accomplish some end* atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut berdasar kepada suatu masalah tertentu yang dianggap penting karena memiliki dampak terhadap suatu aspek tertentu, sehingga dibuatkanlah suatu kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

*KBBI* mendefinisikan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran: garis haluan.

Meskipun kata “*Kebijakan (Policy)*” dan “*Kebijaksanaan (Wisdom)*” berasal dari kata dasar yang sama, namun menurut H.A.R Tilaar (2009: 16) kedua istilah tersebut memiliki makna yang jauh berbeda. Kebijakan dilandasi dan didasari oleh pertimbangan akal, sedangkan kebijaksanaan lebih menekankan pada faktor-faktor emosional dan irasional atau mengarah pada intuisi. Kebijaksanaan

adalah bagian dari moralitas, sedangkan kebijakan adalah objek dari kebijaksanaan. Oleh karena itu, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bijaksana.

*H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho* (2009: 184) mendefinisikan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan pendidikan adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan *Thomas R. Dye* (dalam Riant Nugroho, 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever Government Chooses to do or not to do*).

Dari definisi kebijakan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan secara umum definisi *Kebijakan Publik* adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan, diputuskan atau tidak diputuskan oleh pihak tertentu dalam hal ini pemerintah dalam upaya mencapai tujuan Negara yaitu menuju masyarakat yang sejahtera. Biasanya tujuan tersebut adalah berangkat dari masalah-masalah sosial dalam masyarakat.

## 2. Konsep Kebijakan Publik

*Thomas R Dye* berpendapat dalam Riant Nugroho (2008), Kebijakan Publik adalah *whatever Government Chooses to do or not to*

*do* (Apapun yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah). Pengertian ini menekankan pada kewenangan pemerintah sebagai *Decision Maker* dalam membuat suatu keputusan. Baik itu keputusan untuk melakukan sesuatu maupun membiarkan sesuatu itu terjadi demi teratasinya persoalan dalam suatu masyarakat. Pengertian ini mengandung muatan politik yang sangat kuat. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang penuh dalam pembuatan kebijakan publik memiliki peran yang sangat sentral dalam mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat.

### 3. Proses Pembuatan Kebijakan

Kebijakan publik adalah produk pemerintah yang memerlukan tahap-tahap sistematis dalam proses pembuatannya. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (Penilaian Kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (Penyusunan Agenda), atau tahap di tengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear (William N. Dunn, 2003:23). William N. Dunn menjelaskan dua prosedur yaitu “Prosedur Analisis Kebijakan” dan “Proses Pembuatan Kebijakan”. Meskipun berbeda secara tekstual, namun secara kontekstual ke dua prosedur tersebut memiliki kedekatan yang sangat erat. Sehingga Dunn menggabungkan ke dua prosedur tersebut dalam suatu kesatuan yang berbentuk langkah-langkah dalam pembuatan suatu kebijakan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah tahap awal dari analisis kebijakan. Perumusan masalah dilakukan untuk merumuskan masalah-masalah yang telah diidentifikasi pada saat melakukan analisis sosial/riset sosial dalam masyarakat. Pada tahap ini, masalah-masalah sosial yang telah dirumuskan dan dianggap urgen akan dipilih dan diangkat lalu kemudian ditempatkan oleh pemerintah dalam agenda publik melalui tahap “*Penyusunan Agenda*”.

b) Peramalan

Dalam proses pembuatan kebijakan, tahap peramalan dilakukan dalam proses “*Formulasi Kebijakan*”. Peramalan dapat menguji masa depan yang *plausible*, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan. Lalu kemudian dalam tahap formulasi kebijakan, pemerintah akan merumuskan alternatif-alternatif kebijakan tersebut untuk mengatasi masalah.

c) Rekomendasi

Proses rekomendasi berada pada tahap “*Adopsi Kebijakan*”. Rekomendasi dihasilkan dari pengkajian-pengkajian mengenai alternatif-alternatif kebijakan sehingga mendapatkan

satu atau beberapa alternatif yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Alternatif-alternatif yang direkomendasikan dalam bentuk konsensus akan diadopsi dengan dukungan penuh dari pihak *Decision Maker*.

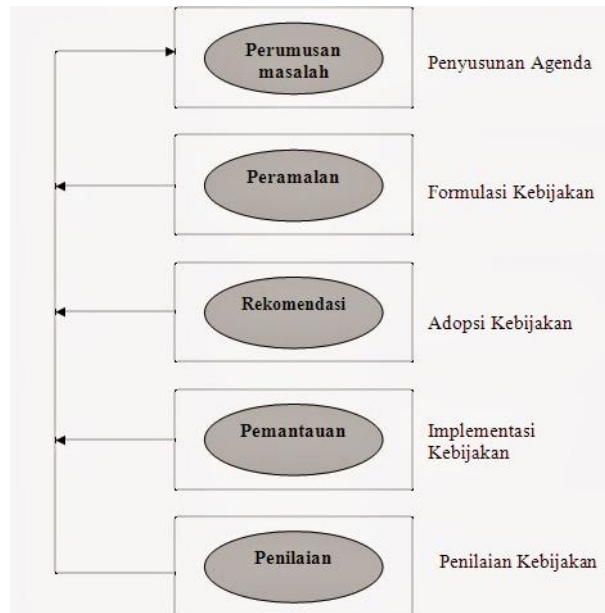
d) Pemantauan

Dalam tahap ini, pemantauan (monitoring) berfungsi untuk mengkaji dengan memanfaatkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengenai dampak dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan juga berfungsi untuk mengamati kinerja kebijakan dalam pelaksanaannya. Pemantauan juga mengandalkan proses penilaian dalam implementasi. Proses penilaian dalam implementasi biasanya dibahasakan sebagai monitoring. Pemantauan adalah bagian dari "*Implementasi Kebijakan*".

e) Evaluasi

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan (Dunn, 2003: 28). Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan akan dilihat dari hasil evaluasi dari kebijakan tersebut. Evaluasi adalah bagian dari tahap "*Penilaian Kebijakan*".

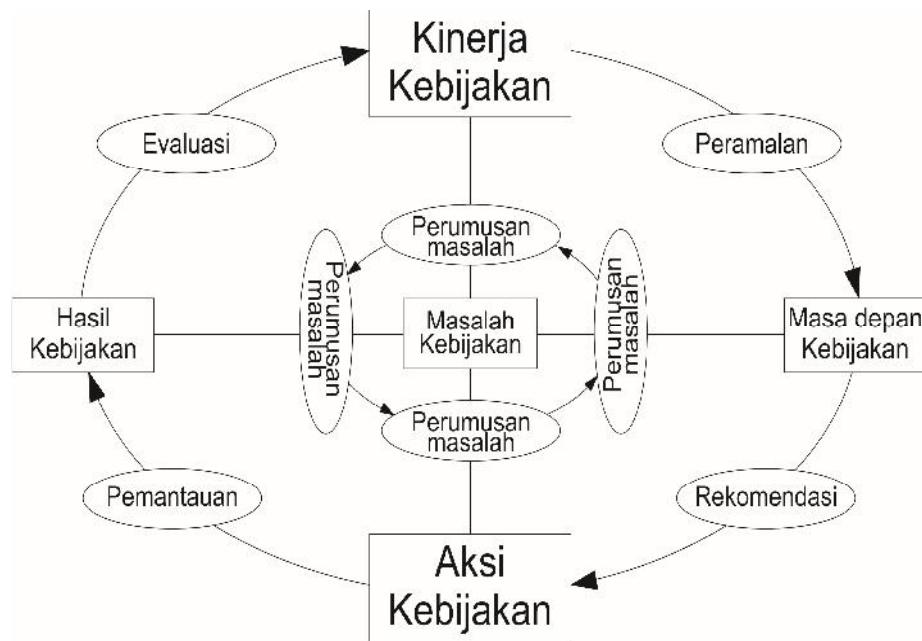
Berikut ini adalah gambar tahap dalam pembuatan kebijakan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya :



**Gambar 1-1. Prosedur Analisis Kebijakan dan Proses Pembuatan Kebijakan Merupakan Suatu Kesatuan**

Dalam prosedur analisis kebijakan terdapat 5 tahap yaitu *Perumusan Masalah*, *Peramalan*, *Rekomendasi*, *Pemantauan* dan *Evaluasi*. Sedangkan dalam proses pembuatan kebijakan terdapat 5 tahap yaitu *Penyusunan Agenda*, *Formulasi Kebijakan*, *Adopsi Kebijakan*, *Implementasi Kebijakan*, dan *Penilaian Kebijakan*. Kedua bentuk prosedur tersebut memiliki kedekatan yang erat sebagaimana yang telah dijelaskan pada gambar di atas, sehingga *Dunn* menganggap bahwa kedua bentuk tersebut adalah suatu kesatuan yang sistematis dan kompleks.

Prosedur sistematis dan kompleks tersebut juga digambarkan oleh *Dunn* dalam gambar berikut :



**Gambar 1-2. Analisis Kebijakan Berorientasi Masalah**

Gambar di atas menjelaskan tentang alur prosedur cara kerja kebijakan. Kedekatan antara kedua bentuk prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya terlihat jelas pada gambar diatas yang menunjukkan suatu hubungan dinamis dan sistematis. Gambar di atas memperlihatkan sebuah siklus bagaimana kebijakan itu bergerak. *Dunn* menamakan siklus tersebut dengan “analisis kebijakan yang berorientasi masalah”. Dalam penelitian ini, masalah difokuskan pada tahap implementasi kebijakan.

#### 4. Kebijakan Pendidikan

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB 1 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan Pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

*Jhon Dewey* (1957) (dalam *H.Jalaluddin dan Abdullah Idi* 2011:7) mendefinisikan pendidikan adalah sebagai proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, yang menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya rasa (emosi) manusia. Dalam tradisi ketimuran, daya pikir dan daya rasa harus dikuatkan dengan daya spiritual. Aspek spiritual adalah aspek yang menjadi fondasi kokohnya daya pikir dan daya emosi. Pancasila menjelaskan itu pada sila pertama “ketuhanan yang maha esa”.

*Al-Syaibani* (1979:399) mendefinisikan pendidikan adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan kehidupan alam sekitarnya.

Dari definisi pendidikan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat kita simpulkan definisi pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana sebagai proses pengembangan potensi dirinya dan pembentukan kemampuan dasar yang fundamental berupa kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak



mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi bagian dari kehidupan alam sekitarnya.

Sedangkan menurut *Paulo Freire* (2011: 1) dengan gaya yang berbeda mendefinisikan bahwa proses dan tujuan pendidikan adalah “*Conscientization*”. *Conscientization* berarti “penyadaran” yaitu belajar memahami kontradiksi sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta mengambil tindakan/aksi untuk melawan unsur-unsur penindasan terhadap realitas tersebut.

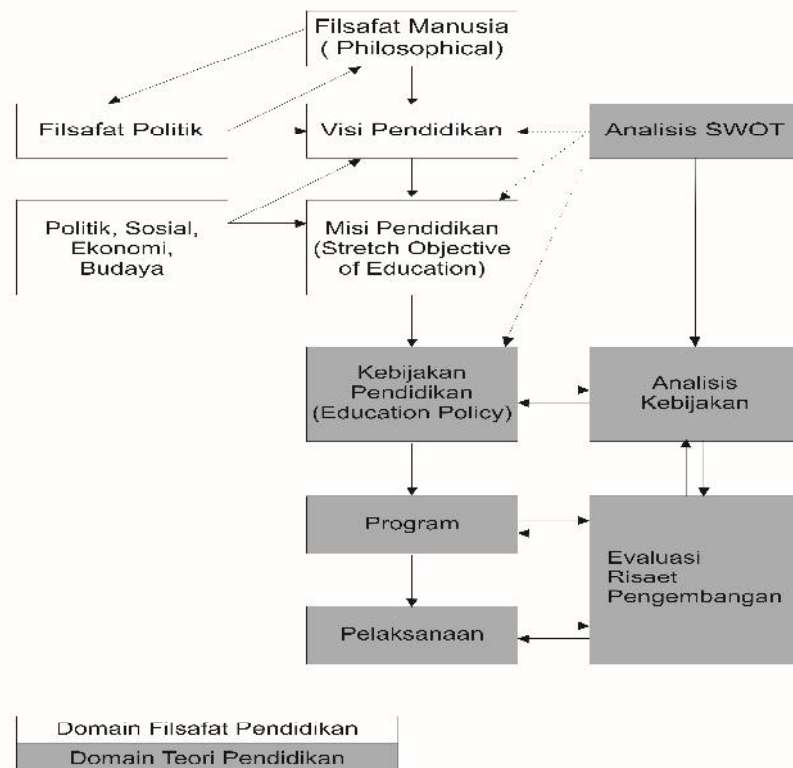
Sebelumnya telah dijelaskan mengenai kebijakan publik beserta konsepnya. Telah disimpulkan pula bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak tertentu atau pemerintah dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut berangkat dari masalah-masalah publik yang hendak dipecahkan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Dalam dinamika sosial, masalah yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi salah satunya adalah masalah pendidikan. Aspek pendidikan merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Maju tidaknya suatu negara ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Oleh karena itu pendidikan menjadi salah-satu indikator utama dalam melihat kesejahteraan suatu negara, sehingga dalam mensejahterakan rakyatnya, pemerintah membutuhkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang memihak kepada seluruh

rakyatnya. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik.

Oleh karena kebijakan pendidikan adalah bagian utama dari kebijakan publik, maka secara konsep, analisis dan pembuatan kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan konsep yang ditawarkan oleh kebijakan publik sebagai disiplin ilmu yang sifatnya praksis. *Riant Nugroho* (2008:37) berpendapat, sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dibidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik.

*H.A.R Tilaar* (2009:140) mendefinisikan, kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Beliau juga berpendapat bahwa, kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis yaitu kesatuan antara teori dan praktek. Oleh karena itu kebijakan pendidikan melalui proses yang meliputi prosedur-prosedur analisis dan pembuatan kebijakan sesuai dengan konsep yang digunakan dalam konsep kebijakan publik.

Karena kebijakan pendidikan adalah sebagai ilmu praksis yang merupakan kesatuan antara teori dan praktik, maka kesatuan tersebut dapat kita gambarkan melalui gambar tersebut :



**Gambar 1-3. Kebijakan Pendidikan dalam Teori dan Praktik**

Gambar diatas menjelaskan mengenai kebijakan pendidikan sebagai suatu kesatuan antara teori dan praktik yang dibahasakan sebagai praksis. Bagian yang berwarna putih merupakan bagian yang menggambarkan tentang konsep kebijakan pendidikan, dimana pada dasarnya kebijakan pendidikan dibangun dari pemahaman mengenai hakikat manusia, lalu kemudian dirumuskan dalam bentuk visi dan misi

pendidikan yang secara konsep dipengaruhi oleh filsafat politik dan dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, budaya dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Pada bagian yang berwarna abu-abu menjelaskan mengenai aspek praktik dari kebijakan pendidikan, dimana visi dan misi kemudian dirumuskan dan dibentuk dalam bentuk kebijakan lalu kemudian didesain dalam bentuk program. Setelah dibentuk dalam suatu program, kebijakan pendidikan kemudian diimplementasikan dengan jangka waktu tertentu lalu kemudian dievaluasi yang diiringi dengan riset dan pengembangan kebijakan tersebut. Analisis kebijakan dilakukan secara menyeluruh dan mempengaruhi proses evaluasi program maupun pelaksanaan. Analisis SWOT adalah metode yang dipakai dalam memahami secara keseluruhan kesatuan teori dan praktik dalam disiplin ilmu kebijakan pendidikan. Kesimpulannya bahwa kesatuan tersebut merupakan siklus yang terus menerus bergerak.

## **B. Implementasi Kebijakan**

### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut *Kamus besar Webster* (dalam Sahya Anggara 2014: 232), Implementasi adalah *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Setelah dirumuskan standar-standar kebijakan yang jelas, lalu kemudian dibentuk dalam suatu program yang kongkrit, maka tahap selanjutnya adalah proses

implementasi kebijakan tersebut. Implementasi dilakukan berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jalannya implementasi yang sesuai dengan prosedur yang berlaku menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan pada tahap evaluasi.

*Van Meter dan Van Horn* (dalam Sahya Anggara, 2014: 232) mendefinisikan, Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Digariskan bermakna bahwa kebijakan tersebut sudah berada dalam suatu mekanisme-mekanisme/prosedur-prosedur yang telah disusun sebelumnya, di mana prosedur-prosedur tersebut adalah dasar dari jalannya implementasi.

Sedangkan *Anggara* (2014: 232) menyimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Proses implementasi sangat menentukan keberhasilan dalam suatu kebijakan. Implementasi dilakukan berdasarkan aspek yang procedural, sehingga jika implementasi keluar dari aspek tersebut, maka keberhasilan kebijakan akan terancam.

Dari definisi implementasi yang dikemukakan para ahli diatas, maka secara umum dapat kita simpulkan bahwa definisi *Implementasi* adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan individu atau pejabat,

kelompok pemerintah atau swasta yang merupakan tindak lanjut untuk melaksanakan semua rencana, kebijaksanaan atau program yang telah ditetapkan dengan dilengkapi segala aspek penunjang seperti alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana pelaksanaannya, dan bagaimana cara melaksanakannya lalu kemudian diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

## 2. Unsur-unsur dalam Suatu Implementasi.

Adapun unsur yang mutlak dalam suatu implementasi adalah sebagai berikut :

- a) Adanya kebijakan atau program yang dilaksanakan dengan tujuan yang jelas.
- b) Adanya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan.
- c) Adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran implementasi kebijakan.
- d) Adanya unsur pelaksana kebijakan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

## 3. Faktor Penentu Kesempurnaan Implementasi

Konteks penelitian ini ditekankan pada implementasi kebijakan, sehingga proposisi pencapaian kesempurnaan suatu implmentasi menggunakan pendekatan *Brian W. Hogwood* dan *Lewis A. Gunn* (1978) (dalam *Anggara* 2014: 246) adalah sebagai berikut :

- a) Situasi di luar badan atau badan organisasi pelaksana tidak menimbulkan kendala-kendala besar bagi proses implementasi.
- b) Tersedia cukup waktu dan sumber daya untuk melaksanakan program.
- c) Tidak ada kendala dalam penyediaan keseluruhan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap tahapan implementasi.
- d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat yang valid.
- e) Hubungan sebab-akibat tersebut hendaknya bersifat langsung dan sedikit mungkin ada hubungan antara atau *intervening variable*.
- f) Diimplementasikan oleh lembaga tunggal yang tidak bergantung oleh lembaga-lembaga lainnya, namun jika melibatkan lembaga lain hendaknya hubungan kebergantungan antar lembaga sangat minim.
- g) Adanya pemahaman yang menyeluruh dan kesepakatan atas tujuan yang hendak dicapai dan kondisi ini harus ada dalam seluruh proses implementasi.
- h) Dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati, mungkin untuk menspesifikasikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap pihak yang terlibat, dalam urutan langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap, detail, dan sempurna.

- i) Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna antara berbagai elemen yang terlibat dalam program.
- j) Bahwa yang berwenang dapat menuntut dan menerima kepatuhan yang sempurna.

#### 4. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Menurut *Van Meter* dan *Van Horn* (dalam *Anggara* 2014: 242).

Ada 6 Variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yaitu :

- a. *Tujuan kebijakan dan standar yang jelas*, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- b. *Sumber daya*, yaitu dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi.
- c. *Kualitas hubungan interorganisasional*, yaitu keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan.
- d. *Karakteristik lembaga atau organisasi*, yaitu termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan.



- e. *Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi*, yaitu apakah sumber daya ekonomi mencukupi. Seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada. Bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut. Apakah elit mendukung implementasi.
- f. *Disposisi/tanggapan*, yaitu sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap).

### **C. Pendidikan Kesetaraan**

#### **1. Pengertian Pendidikan Kesetaraan**

UNESCO dalam *Asia Pasific Regional Guide to Equivalency Programmes* (2012), mendefinsikan pendidikan kesetaraan adalah *designed to ensure that NFE offers education of a similar quality and standard as formal education, and with equivalent certification*. UNESCO menjelaskan bahwa pendidikan kesetaraan dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan nonformal menawarkan pendidikan berkualitas dan standar yang sama dengan pendidikan formal, dan dengan ijazah yang sama.

*Kimberly Parekh* dalam *Equivalency Programmes and Alternative Certified Learning “Achieving Education for All and Promoting Life Long Learning”* yang diterbitkan oleh UNESCO (2011) menjelaskan bahwa pendidikan kesetaraan menargetkan peserta didik yang berada di luar jalur pendidikan formal (berusia 6-14 tahun)

untuk kembali bersekolah pada tingkat dasar dan menengah, pemuda (bersuia sekitar 15-24 tahun) dan orang dewasa untuk melanjutkan pendidikan kejuruan (sederajat) atau yang lebih tinggi demi untuk mencapai prospek pekerjaan yang lebih baik. Di Indonesia,

*Kimberly Parekh* menambahkan bahwa pendidikan kesetaraan idealnya dikelola dengan cara yang sama seperti pada jalur pendidikan formal. *Kimberly* menjelaskan bahwa sistem pendidikan yang terdesentralisasi memberikan otonomi lebih besar kepada badan pemerintahan (nasional, daerah, dan pada tingkat masyarakat) dalam mengkoordinasikan terkait mengenai pendidikan kesetaraan. Dalam hal ini, sebagai negara yang menerapkan sistem desentralisasi pendidikan, terkait kebijakan pendidikan kesetaraan sebagai kebijakan nasional, kebijakan tersebut harus dikuatkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan meso (level daerah) dan kemudian didesain dalam bentuk kebijakan mikro (level masyarakat/lembaga).

## 2. Visi dan Misi Pendidikan Kesetaraan

UNESCO dalam *Asia Pasific Regional Guide to Equivalency Programmes* (2012) menjelaskan visi dan misi dari pendidikan kesetaraan adalah sebagai berikut :

### a. Visi

Untuk berkontribusi dalam terciptanya masyarakat belajar melalui pengembangan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, dan mandiri.

b. Misi

Untuk menciptakan kesetaraan yang berkualitas, pendidikan yang relevan yang akan memperluas akses pendidikan, memberikan ijazah/sertifikasi agar tujuan “*education for all*” terpenuhi dalam kerangka nasional menuju gerakan bernegara.

3. Prinsip dan Tujuan Pendidikan Kesetaraan

UNESCO dalam *Asia Pasific Regional Guide to Equivalency Programmes* (2012) menjelaskan prinsip dan tujuan pendidikan kesetaraan adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Pendidikan Kesetaraan

- 1) *Keadilan dan Akses*. Pendidikan kesetaraan wajib menyediakan keadilan dan akses bagi semua kelompok sasaran.
- 2) *Relevan dan Responsif*. Pendidikan kesetaraan harus relevan dan responsive terhadap tujuan nasional maupun tujuan kebijakan, kebutuhan lokal maupun kebutuhan individu.
- 3) *Inklusi dan Partisipasi*. Pendidikan kesetaraan harus didasarkan pada strategi pengajaran dan pembelajaran yang tepat, dan harus menekankan pada pendekatan partisipatoris.
- 4) *Sensivitas Budaya dan Gender*. Pendidikan kesetaraan harus peka terhadap budaya dan gender.
- 5) *Kewarganegaraan yang baik*. Selaras dengan program pendidikan lainnya, pendidikan kesetaraan harus

mengedepankan nilai-nilai nasional dan kewarganegaraan yang baik.

- 6) *Komparabilitas*. Pendidikan kesetaraan harus sebanding dengan pendidikan formal dalam segala aspek baik dalam kurikulum, ijazah, dukungan kebijakan, standar pendidikan dan jaminan kualitas, kapasitas bangunan, penilaian belajar, monitoring dan evaluasi.
- 7) *Credit Transfer*. Kredit dari pendidikan kesetaraan harus dapat ditransfer ke pendidikan formal dan begitupun sebaliknya.
- 8) *Flexibility*. Pendidikan kesetaraan harus fleksibel pada setiap konten dalam kurikulum, proses belajar-mengajar, waktu belajar dan evaluasi.
- 9) *Belajar Sepanjang Hayat*. Pendidikan kesetaraan harus mempromosikan prinsip belajar sepanjang hayat. Mereka dapat melayani kebutuhan-kebutuhan individual baik itu penyediaan program yang menciptakan lapangan pekerjaan, pendidikan untuk pengembangan keterampilan hidup dan pendidikan untuk pembangunan sosial dan masyarakat.

b. Tujuan Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan moral, etika, dan intelektual untuk menikmati kualitas hidup yang baik, kemampuan untuk mengembangkan karir dan untuk terlibat dalam pembelajaran

yang berkelanjutan. Secara spesifik, tujuan pendidikan kesetaraan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan program pendidikan alternatif setara dengan pendidikan umum/dasar dan kejuruan formal yang ada.
- 2) Menyediakan akses pendidikan untuk semua kelompok sasaran dan dengan demikian memperkuat hak asasi manusia,
- 3) Mempromosikan dan mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan tingkat pendidikan dari total populasi.
- 4) Mempromosikan manfaat ekonomi sosial individu melalui pendidikan akademik dan kejuruan sebanding dan membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang produktif.
- 5) Mempromosikan peserta didik untuk menjadi warga belajar, dengan keterampilan dalam mencari pengetahuan, menilai sumber belajar yang beragam, dan mengintegrasikan pengetahuan untuk pengembangan diri, keluarga, komunitas, masyarakat, dan Negara.

#### 4. Perkembangan Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Indonesia

*Usman Syihab* dalam *Equivalency Programmes and Alternative Certified Learning “Achieving Education for All and Promoting Life Long Learning”* yang diterbitkan oleh UNESCO (2011) menjelaskan secara singkat periode perkembangan kebijakan pendidikan kesetaraan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

PERIODE	POKOK FIKIRAN
Periode Awal Kemerdekaan (1945-1965)	Selama periode ini, fokus kebijakan pendidikan kesetaraan adalah memberantas buta huruf. Pada tahun 1951, dua tahun setelah pembentukan Departemen Pendidikan Masyarakat, pemerintah meluncurkan "rencana 10 tahun pendidikan", yang dirancang untuk menghilangkan buta huruf dalam waktu 10 tahun. Pada tahun 1960, Presiden mengeluarkan mandat - Komando Presiden - untuk menghilangkan buta huruf pada akhir 1964, dan pendidikan non-formal adalah bagian integral dari rencana ini
Antara tahun 1966-1970	Fokus kebijakan pendidikan kesetaraan adalah tetap memerangi buta huruf tapi menekankan pada keaksaraan fungsional dibanding keaksaraan konvensional. Kelompok sasaran utama adalah pekerja yang buta huruf yang bekerja di berbagai sektor ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan melek huruf di kalangan pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas mereka.
Antara tahun 1970-1990	Kebijakan masih bertujuan untuk memerangi buta huruf, tetapi didukung dengan model baru untuk menghilangkan buta huruf. Program bertujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan untuk memahami lingkungan sekitarnya dan interaksi di kehidupan sehari-hari mereka, dalam keluarga mereka dan kehidupan sosial, dan orang-orang di lingkungan mereka.
Antara tahun 1991-2004	Kebijakan pendidikan kesetaraan tidak lagi terfokus pada tujuan untuk memerangi buta huruf. Fokus lebih diperluas pada legalisasi status tiga paket pendidikan non-formal: Paket A (SD/MI), Paket B (setara dengan SMP/MTs) dan Paket C (setara dengan SMA/MA/SMK).
Antara tahun 2005-2008	Tiga aspek yang ditekankan dalam pembuatan kebijakan pendidikan kesetaraan: a) Meningkatkan akses pendidikan untuk mengaktifkan anak-anak untuk menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, b) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing program kesetaraan, dan c) Meningkatkan manajemen, akuntabilitas dan citra publik dari layanan pendidikan kesetaraan. Pada tahun 2005, Peraturan Nomor 13 disahkan tentang pembentukan Direktorat Pendidikan Kesetaraan di

	bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, di Kementerian Pendidikan Nasional.
Antara tahun 2009-2010	Direktorat Pendidikan Kesetaraan memperkenalkan kebijakan baru pada tiga jenis Pendidikan Kesetaraan. Kebijakan baru ini bertujuan untuk memastikan pendidikan kesetaraan memenuhi kebutuhan peserta didik dalam hal intelektual dan kompetensi kejuruan dan mata pencaharian. Ke tiga jenis pendidikan kesetaraan adalah: Kesetaraan Akademik Murni Pendidikan (80 persen akademik dan 20 persen keterampilan kejuruan); Terpadu Akademik-Vocation Kesetaraan (50 persen akademik dan 50 persen keterampilan kejuruan); dan Pure Vocation Kesetaraan (20 persen akademik dan 80 persen keterampilan kejuruan). Pada tahun 2010, kebijakan baru ini diundangkan dan diterbitkan dalam Pedoman pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Direktorat ini mempersiapkan struktur kurikulum standar dan isi untuk pendidikan kesetaraan, bersama dengan implementasi terkait pedoman. Hal ini penting, bagaimanapun, bahwa implementasi kebijakan akan dilengkapi oleh restrukturisasi mata pelajaran ujian akhir pendidikan baik formal maupun non-formal.

**Tabel 1-2, Periode Perkembangan Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Indonesia**

5. Program Pendidikan Kesetaraan

a. Program Paket A

Program paket A adalah program pendidikan kesetaraan dalam pendidikan nonformal yang memiliki kedudukan yang sama atau setara dengan SD/MI. Lulusan program paket A memiliki hak *egilibilitas* yang setara dengan lulusan sekolah formal SD/MI.

b. Program Paket B

Program paket B adalah program pendidikan kesetaraan dalam pendidikan nonformal yang memiliki kedudukan yang sama

atau setara dengan SMP/MTs. Lulusan program paket B memiliki hak *egilibilitas* yang setara dengan lulusan sekolah formal SMP/MTs

c. Program Paket C

Program paket C adalah program pendidikan kesetaraan dalam pendidikan nonformal yang memiliki kedudukan yang sama atau setara dengan SMA/MA. Lulusan program paket C memiliki hak *egilibilitas* yang setara dengan lulusan sekolah formal SMA/MA.

6. Landasan Hukum Pendidikan Kesetaraan

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Permendiknas No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Permendiknas No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- e. Permendiknas No.14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan paket A, B dan C
- f. Permendiknas No.3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
- g. Permendiknas No.44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan paket A, B dan C



- h. Permendiknas No.43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Program Pendidikan Kesetaraan paket A, B dan C
- i. Permendiknas No.41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
- j. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

7. Kelompok Sasaran Pendidikan Kesetaraan

Adapun kelompok sasaran pendidikan kesetaraan adalah anak-anak usia sekolah yang tidak bisa mengikuti pendidikan sekolah formal atau yang mampu namun memilih untuk sekolah di sekolah nonformal (pendidikan kesetaraan), serta orang dewasa yang sudah pernah ataupun belum pernah mengenyam pendidikan sekolah.

8. Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan

a. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

PKBM adalah pelaksana utama pendidikan kesetaraan, dan sebagian besar didanai oleh pemerintah pusat. PKBM adalah prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (Community Based Institution).

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang merupakan akronim dari PKBM memiliki makna yang kuat dari setiap kata. Adapun makna dari akronim PKBM menurut DITJEN PAUDNI KEMDIKBUD adalah sebagai berikut :

- 1) *Pusat*, berarti bahwa penyelenggara PKBM harus dikelola dan terlembagakan dengan baik. Karena PKBM merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat dalam konteks pendidikan nonformal.
- 2) *Kegiatan*, berarti bahwa di PKBM diselenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan edukatif yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat, serta PKBM selalu dinamis, kreatif dan produktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat setempat.
- 3) *Belajar*, berarti bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan di PKBM harus merupakan kegiatan yang mampu memberikan dan menciptakan proses transformasi peningkatan kapasitas serta perilaku anggota komunitas tersebut ke arah yang lebih positif.
- 4) *Masyarakat*, berarti bahwa PKBM adalah usaha bersama masyarakat untuk memajukan dirinya sendiri (self help) secara bersama-sama sesuai dengan ukuran nilai dan norma masyarakat itu sendiri akan makna kehidupan. Dengan demikian, ciri-ciri suatu masyarakat akan sangat kental me

b. SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)

SKB adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Pendidikan pada daerah tingkat I (Kabupaten/Kota). SKB memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka tercapainya masyarakat gemar belajar.
- 2) Pembuatan percontohan berbagai program pendidikan nonformal dan informal.
- 3) Pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan nonformal dan informal.
- 4) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelaksana pendidikan nonformal dan informal.
- 5) Penyedia sarana dan fasilitas belajar.
- 6) Pengintegrasian dan pengsinkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan nonformal dan informal.

Meskipun dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan SKB tidak disebutkan sebagai lembaga pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan, namun keberadaan SKB sebagai unit pelaksana teknis cukup diterima dalam lingkungan masyarakat sebagai lembaga pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan. Sebenarnya keberadaan SKB cukup menggelisahkan beberapa pihak PKBM di beberapa daerah, dikarenakan SKB tidak disebutkan dalam PP No. 17 Tahun 2010 sebagai lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan.

Penyelenggara lainnya yang disebutkan dalam PP No. 17 Tahun 2010 adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan, Majelis Ta'lim dan Kelompok belajar. Namun, karena konteks penelitian ini secara empirik

berdasarkan pada kondisi dimana setting penelitian belum menjadikan ke 3 lembaga tersebut sebagai setting penelitian, sehingga fokus penelitian hanya kepada lembaga PKBM dan SKB yang diakui di Kabupaten Polewali Mandar. Lembaga-lembaga yang disebutkan tersebut disertifikasi oleh pihak yang berwenang di setiap Provinsi (bagi BPKB dan BP3LS) dan Kabupaten (UPTD SKB) sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

#### **D. Penelitian Relevan**

Adanya penelitian yang relevan dengan konteks penelitian yang dilakukan, akan sangat membantu dan memudahkan peneliti dalam proses penelitiannya. Di samping digunakan sebagai referensi awal dalam memahami konteks penelitian, juga membantu peneliti dalam memahami sistematika penelitian yang diteliti dan di sisi lain juga menegaskan bahwa apa yang diteliti adalah konteks yang dianggap urgen.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tesis karya **I Nyoman Mursa Winata**, 2012, “ *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (setara SMA) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “Widya Sentana” di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun ajaran 2011/2012*”, Bali: Program Studi Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan

mengetahui efektifitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket C (setara SMA) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Widya Sentana” Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dilihat dari variable konteks, input, proses, dan produk. Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif yang menganalisis efektifitas pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model CIPP. Responden dalam penelitian ini adalah pegelolah, tutor, dan siswa yang berjumlah 119 orang. Data dikumpulkan menggunakan kusioner. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket C (setara SMA) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “Widya Sentana” Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2011/2012 tergolong efektif dilihat dari variable konteks, input, proses, dan produk.

2. Artikel Jurnal Karya **Andhika Agung Nugroho**, 2014, “*Dinamika Implementasi Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju Makmur*”, Yogyakarta: Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Prodi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji lebih mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Maju Makmur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan subjek penelitian ini adalah ketua penyelenggara, wakil bidang, tutor, dan

warga belajar. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara (daftar pertanyaan), dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah (a) implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan kejar paket C di PKBM Maju Makmur belum sesuai standar yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 3 Tahun 2008. (b) faktor pendukung dilihat dari tersedianya tempat untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sedangkan faktor penghambat berada pada kurangnya pendanaan. (c) Strategi yang dilakukan oleh pihak lembaga adalah dengan cara menjalin hubungan erat dengan pemerintah serta pihak-pihak lain.

Dari penjelasan singkat mengenai dua penelitian yang relevan dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang memiliki tingkat relevansi yang kuat terhadap penelitian ini adalah penelitian nomor dua yang berjudul “Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Widya Makmur”. Hal ini disebabkan karena penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam fokus penelitian dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang “implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan” dan juga sama-sama menggunakan pendekatan “kualitatif”. Namun yang membedakan dengan penelitian ini, penelitian tersebut lebih spesifik meneliti tentang pendidikan kesetaraan kejar paket C di satu PKBM, sedangkan penelitian ini dilakukan di empat PKBM, satu

SKB, dan pada Seksi Kesetaraan Bidang PLS Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar, serta tidak terbatas pada program paket tertentu.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Pendidikan kesetaraan adalah kebijakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki kedudukan yang sama dengan jalur pendidikan formal.

Pendidikan kesetaraan adalah salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dinaungi oleh Ditjen PAUDNI (Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal). Dalam penyusunan rencana strategi Ditjen PAUDNI 2015-2019, pendidikan kesetaraan menjadi salah satu fokus utama yang tercakup dalam program pendidikan dasar bagi orang dewasa (*Adult Basic Education*). Selain Ditjen PAUDNI Kemdikbud, pendidikan kesetaraan juga berada pada tanggung jawab Ditjen BPSDMPK (Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan) melalui Organisasi LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) sebagai UPT (Unit Pelayanan Teknis). LPMP adalah Unit Pelayanan Teknis Kemdikbud yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Organisasi dan tata kerja LPMP diatur dalam Permendiknas No. 37 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Lalu kemudian sebagian substansi diubah kedalam Permendiknas No. 16 tahun 2013 dan disempurnakan ke dalam Permendiknas No. 33 Tahun 2014 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. LPMP Provinsi Sulawesi Barat berada di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Di level daerah tingkat I (Provinsi), dalam hal ini Provinsi Sulawesi Barat. Sesuai dengan Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 3 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada BAB III Pasal 3 Ayat 7, pendidikan kesetaraan dinaungi oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat di Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan. Sedangkan di level daerah tingkat II (Kabupaten/Kota), dalam hal ini Kabupaten Polewali Mandar, sesuai dengan Perda Kabupaten Polewali Mandar No.10 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada BAB IV Pasal 6, pendidikan



kesetaraan dinaungi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Polewali Mandar di Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Seksi Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan, dan Masyarakat.

Pendidikan kesetaraan, meskipun idelanya merupakan kebijakan pendidikan yang sifatnya makro dan secara internasional (melalui lembaga UNESCO) maupun secara nasional (melalui kemdikbud) telah diakui sebagai jalur pendidikan yang *equivalent* dengan jalur pendidikan formal, namun di Indonesia, pendidikan kesetaraan mengalami distorsi makna, sehingga cita-cita “*Long Life Education*” masih berada dalam tatanan konsep.

Lemahnya kesadaran pendidikan masyarakat yang hanya terbatas pada jalur pendidikan formal, mengakibatkan tafsir pendidikan sebagai suatu kajian holistik mengalami suatu dikotomi. Terjadi pergeseran makna pendidikan, sehingga kesakralan pendidikan terbatas pada aspek *legalitas-formal* semata. Dalam dikotomi tersebut, bagi masyarakat, pendidikan yang dianggap berkualitas adalah pendidikan yang memiliki aturan yang jelas dan komponen-komponen yang jelas. Di luar dari itu, pendidikan tidak memiliki makna sama sekali.

Terjadinya pergeseran makna pendidikan akibat dari kesadaran pendidikan yang lemah telah menciptakan kelas-kelas sosial dalam masyarakat pendidikan. Di Indonesia, pendidikan formal adalah pilihan utama masyarakat pada umumnya. Di luar dari itu, kualitas pendidikan tidak lagi menjadi orientasi utama (kualitas pendidikan dianggap hanya

berlaku dalam pendidikan formal). Hal tersebut terjadi dalam dinamika pendidikan kesetaraan di Indonesia, di mana pendidikan tersebut hanya dianggap sebagai sebuah alternatif yang tidak termasuk sebagai salah-satu pilihan utama.

Hak *eligibilitas* dan makna *equivalent* dalam pendidikan kesetaraan tidak tersampaikan dalam benak mayoritas masyarakat Indonesia. Ke dua kata tersebut adalah semangat pendidikan kesetaraan (sebagai konsep pendidikan yang setara dan bahkan lebih dibandingkan jalur pendidikan formal) yang telah gagal tersosialisasikan dalam masyarakat Indonesia. Kegagalan tersebut bukan karena faktor kesengajaan, melainkan karena ketidaksadaran pihak otoritatif (pemangku kebijakan) dalam memahami hakikat pendidikan kesetaraan. Ketidaksadaran adalah akar terciptanya kesenjangan, baik itu kesenjangan secara struktural maupun secara kultural.

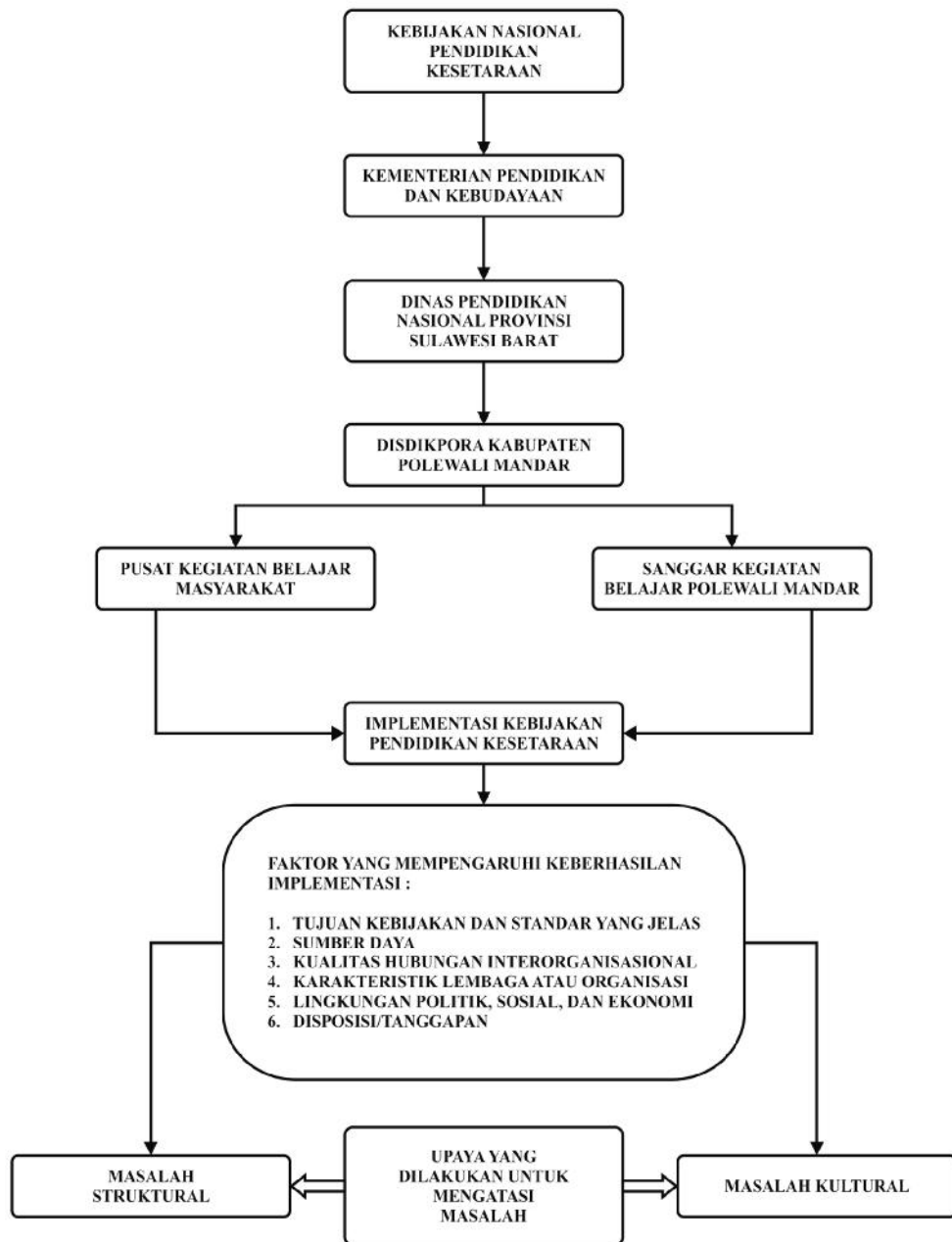
Sebagai negara yang telah menerapkan desentralisasi pendidikan, sehingga yang menarik dari konteks pendidikan kesetaraan sebagai salah-satu kebijakan nasional adalah proses alur kebijakan tersebut atau dengan kata lain bagaimana kebijakan tersebut disambut pada level daerah. Sebagaimana pendidikan formal yang disetiap daerah dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan *meso* atau bahkan *mikro*, apakah pendidikan kesetaraan juga memiliki kelayakan seperti itu ? Secara konsep jelas sangat layak, namun dalam aspek realita (terakut kesadaran) masih memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi fokus penelitian pada aspek implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Dengan memilih lima lembaga pendidikan nonformal sebagai setting penelitian dengan kriteria tertentu, penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan menggunakan pendekatan *Van Meter* dan *Van Horn*, kajian implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan pada penelitian ini didasarkan pada enam variabel sebagai faktor kuat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Enam variabel tersebut adalah : 1) Tujuan kebijakan dan standar, 2) Sumber daya, 3) Kualitas hubungan interorganisasional, 4) Karakteristik lembaga dan organisasi, 5) Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, dan 6) Disposisi/tanggapan.

Ke enam variabel yang telah disebutkan di atas menjadi indikator apakah implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan dapat dikatakan berhasil atau tidak. Ke enam variabel tersebut juga akan menentukan masalah-masalah apa saja (baik struktural maupun kultural) yang terjadi selama proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar, serta akan menjelaskan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan kesetaraan dalam upaya mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dibuat bagan konsep kerangka berfikir sebagai berikut :



**Gambar 1-4, Kerangka Berfikir**

## **F. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan konsep dan alur pikir yang telah dijelaskan, maka dapat disusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Seperti apa proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung implementasi dalam mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat ?
3. Apa saja masalah-masalah struktural yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat ?
4. Apa saja masalah-masalah kultural yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat ?
5. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat ?

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut *Bodgan and Taylor (1975:5)* (dalam Moleong, 2014: 4) yaitu metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, yang diamati adalah informan, yaitu ketua Seksi Keaksaraan, Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, serta masing-masing ketua pengelola PKBM AD, BB, EM, ADD, dan SKB PM. Data-data kualitatif yang didapatkan melalui proses yang sesuai dengan prosedur pendekatan kualitatif

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menjelaskan pemecahan masalah berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Data-data berupa kata (lisan) atau tulisan terkait mengenai implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar dideskripsikan dalam proses display data. Namun meskipun penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, tetapi penelitian ini tidak mengabaikan data-data yang bersifat kuantitatif. Data-data kuantitatif tetap akan bersifat kuantitatif namun akan tetap dideskripsikan berdasarkan metode kualitatif.

Jenis penelitian deskripsi kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi atau data-data mengenai implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan secara mendalam dan komprehensif

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar dan lembaga-lembaga pendidikan nonformal sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar (dalam hal ini PKBM dan SKB serta lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang telah tercantum dalam landasan konstitusi). Penelitian telah dilaksanakan pada bulan 16 Maret- 31 Mei 2015.

#### **B. Subjek Penelitian**

*Moleong* (2010: 132) menjelaskan bahwa subjek penelitian adalah sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka subjek pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Staf DISDIKPORA Kabupaten Polewali Mandar di Bidang PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Pada Seksi Keaksaraan, Kesetaraan dan Masyarakat. Dengan informan Kepala Seksi Kekasaraan, Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat.

2. Pengelola PKBM dan SKB yang dijadikan sebagai setting penelitian.

Dengan informan sebagai berikut :

- a. Ketua pengelola PKMB AD
- b. Ketua pengelola PKBM BB
- c. Ketua pengelola PKBM ADD
- d. Ketua pengelola PKBM EM
- e. Ketua pengelola SKB PM

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam suatu penelitian. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiono, 2014:62).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat melaksanakan penelitiannya berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Marshal (1995) menyatakan bahwa *“through observation, the researches learn about behavior and the meaning attached to those*



*behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2014:64).

Peneliti ini menggunakan jenis *observasi terus terang atau tersamar*. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada lembaga-lembaga dan institusi-institusi pendidikan yang memiliki wewenang terkait mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini di Disdikpora Kabupaten, PKBM AD, PKBM BB, PKBM EM, PKBM ADD, dan SKB PM. Hasil observasi yang didapatkan dari penelitian ini berupa keadaan lingkungan lembaga dan institusi yang diteliti serta keanekaragaman perilaku para informan penelitian.

## 2. Wawancara

Moleong (2014) mendefinisikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut *Lincoln* dan *Guba* (dalam Moleong, 2014:186) adapun maksud dari mengadakan wawancara yaitu : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai terwawancara (*interviewee*) oleh peneliti adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan kesetaraan. Dalam

hal ini adalah kepala seksi kesetaraan Disdikpora Polewali Mandar, ketu pengelola PKBM AD, PKBM BB, PKBM EM, PKBM ADD, dan SKB PM. Hasil wawancara bersumber dari latar belakang masalah penelitian yang dijabarkan melalui pertanyaan penelitian dan dibuat dalam bentuk pedoman wawancara yang berisi serangkaian pertanyaan yang relevan.

### 3. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2014:83).

Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan. Dalam penelitian ini, sebelumnya telah dijelaskan bahwa dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian termasuk ke dalam jenis sumber data sekunder. Dokumen yang berhasil didapatkan dalam penelitian ini berupa Surat Keputusan Kepala Dinas No. 410.42/003.b/Disdikpora tahun 2014 tentang daftar PKBM di Kabupaten Polewali Mandar dan surat berisi daftar PKBM yang terdaftar sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan tahun

ajaran 2014/2015. Aktifitas lembaga dan institusi juga didokumentasikan melalui buku catatan dan dokumentasi gambar/foto.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Suharsimi Arikunto (2002: 136) (dalam Sugiyono, 2014: 59) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan teknik observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, data yang diteliti adalah data yang berbentuk lisan maupun tulisan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan berupa *lembar wawancara* atau *pedoman wawancara*, *tape recorder* (jika diperlukan), *kamera*, *flash Disk* (digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya *soft*), *Laptop* (digunakan untuk mengelolah data), dan instrumen-instrumen yang mendukung lainnya.

#### **E. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

*Lofland and Lofland* (1984:47) (dalam Moleong, 2014: 157) mengatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan

lain-lain. Berkaitan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu; *sumber data primer* yaitu sumber yang berbentuk kata-kata dan tindakan yang langsung didapatkan dari narasumber utama, dan *sumber data sekunder* yaitu sumber yang tidak langsung didapatkan dari narasumber utama, misalnya lewat orang lain, dokumen/arsip, foto dll.

#### **F. Teknik Analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) adalah sebagai berikut :

##### **1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data, karena analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Analisis data akan terus dilakukan sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada saat penelitian dimulai sejak 16 Maret- 31 Mei 2015. Pengumpulan data dilakukan secara random sesuai dengan lembaga dan institusi yang dikunjungi.

##### **2. Reduksi data (*Data Reduction*)**

Reduksi data dilakukan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu kemudian

dicari tema dan polanya. Hal tersebut dilakukan karena semakin lama peneliti berada di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, tidak teratur dan rumit. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, bisa dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik seperti *computer/laptop* dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data lebih dominan memakai buku catatan sebagai instrument pengumpulan. Untuk data sekunder berupa file *soft* dan foto, peneliti menggunakan flash disk dan kamera handphone.

### 3. *Display data*

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data/menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2014:95). Sedangkan menurut *Miles* dan *Hubermen*, pada umumnya penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini, hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif deskriptif yang dibagi ke dalam tiga komponen yaitu a) deskripsi lokasi penelitian, yaitu berisi tentang deskripsi singkat mengenai daerah Kabupaten Polewali Mandar serta lembaga-lembaga dan institusi yang diteliti, b) hasil penelitian, yaitu berisi tentang deskripsi data berupa hasil wawancara maupun analisis data sekunder

terkait pendidikan kesetaraan yang telah direduksi sebelumnya yang disusun berdasarkan tiga rumusan yaitu implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali mandar, masalah-masalah dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar, dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, c) pembahasan, yaitu berisi tentang deskripsi berupa dialog antara hasil yang telah didapatkan dilapangan dengan landasan teori yang ada pada bab II yang disusun berdasarkan tiga rumusan masalah.

#### 4. *ConclusionDrawing* (Penarikan Kesimpulan)/*Verification* (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir dari analisis data dalam model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini, kesimpulan adalah penjelasan singkat yang dijelaskan secara singkat dari hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai dengan tiga rumusan masalah penelitian yaitu implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar, Masalah-masalah dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar, dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

### **G. Keabsahan data**

Dalam penelitian ini, untuk memenuhi keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan sangat dibutuhkan dalam penelitian kualitatif, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peneliti adalah instrument utama dalam penelitian ini, sehingga dibutuhkan tenaga ekstra agar mendapatkan hasil yang maksimal. Lama penelitian akan berakhir setelah peneliti sudah merasa puas terhadap data yang telah didupatkannya. Perpanjangan pengamatan juga akan berdampak positif pada pemahaman peneliti yang akan semakin kompleks terhadap tema yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, perpanjangan pengamatan dilakukan setiap saat ketika melakukan pengumpulan data.

### 2. Ketekunan Pengamatan

Sugiyono (2014) berpendapat meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Pengujian kredibilitas dengan cara ini dilakukan dengan cara peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Dalam penelitian ini, ketekunan penelitian dilakukan setiap melakukan pengumpulan data.

### 3. Triangulasi

Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik dan triangulasi sumber yaitu :

- a. *Triangulasi Teknik* dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian

ini data diperoleh dari hasil wawancara, lalu keabsahan data tersebut kemudian dicek dengan teknik observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti sangat mengandalkan triangulasi teknik, ini dikarenakan ada beberapa data yang didapatkan dari hasil wawancara yang kurang mendukung dalam proses pengumpulan data.

- b. *Triangulasi Sumber* dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini data yang didapatkan bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari lembaga pendidikan nonformal sebagai penyelenggara kebijakan pendidikan kesetaraan. Sebagai contoh, data yang didapatkan melalui pihak Disdikpora Polewali Mandar terkait PKBM EM berbeda dengan data yang didapatkan di pihak PKBM EM sendiri.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu daerah tingkat II yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum Provinsi Sulawesi Barat dimekarkan, pada awalnya Kabupaten ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa dan berada pada wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Semenjak tahun 2004 Provinsi Sulawesi Barat dimekarkan, Kabupaten Polewali Mamasa menjadi salah satu daerah yang berada pada wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat. Setelah daerah Mamasa juga dimekarkan menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan PP No. 74 tahun 2005, nama Polewali Mamasa resmi diganti menjadi Polewali Mandar sejak 1 Januari 2006.

Kabupaten Polewali Mandar memiliki luas wilayah 2.022,30 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 409.648 jiwa, masing-masing 199.682 laki-laki (48.74 %) dan 209.966 perempuan (51.26 %). Kabupaten Polewali Mandar terbagi menjadi 16 Kecamatan yaitu Kecamatan Polewali, Kecamatan Matakali, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapilli, Kecamatan Luyo, Kecamatan Campalagian, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Limboro, Kecamatan Tutar, Kecamatan Alu, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Bulu, Kecamatan Anreapi, Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapango, dan Kecamatan Matangga.

## 1. Visi dan Misi Kabupaten Polewali Mandar

### a. Visi

Terwujudnya Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan  
Menuju Polewali mandar yang sejahtera.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan berdaya saing tinggi.

Tujuan misi pertama adalah :

- a) Meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dalam beragama dan berbudaya
- b) Meningkatkan kecerdasan intelektual berbasis kearifan lokal dan berdaya saing

- 2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dalam pemenuhan hak-hak dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan misi kedua adalah :

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
- c) Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan
- d) Meningkatkan akses dan layanan infrastruktur
- e) Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial

- 3) Memperluas dan meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tujuan dari misi ketiga adalah :

- a) Meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan
- b) Meningkatkan produktifitas, pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan.

## 2. Konsep Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar

Secara statistik, standar kualitas kehidupan masyarakat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam konteks Polewali Mandar, menurut data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dari tahun 2005 hingga 2012 Kabupaten Polewali Mandar masih menempati urutan terbawah sebagai daerah dengan IPM terendah di Sulawesi Barat.

Berdasarkan data tersebut, maka konsep kebijakan pendidikan yang akan diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui “Desa Cerdas Mandiri”. Desa Cerdas Mandiri merupakan kebijakan pusat yang dijadikan sebagai landasan kebijakan pendidikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Desa Cerdas Mandiri terdiri atas 5 pilar yaitu, a) Penuntasan tuna aksara di daerah tertinggal, b) Pemerataan akses pendidikan dasar, c) Pemerataan guru dan tenaga pendidik, d) Penyetaraan pendidikan dasar, dan e) Revitalisasi PAUD, PKBM, dan TBM.

## 3. Keadaan Lembaga Pendidikan Nonformal di Kabupaten Polewali Mandar

Jalur pendidikan nonformal di Kabupaten Polewali Mandar dinaungi oleh Disdikpora Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali mandar bernomor 410.42/003.b/Disdikpora tentang Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Polewali mandar terdapat 102 PKBM yang diakui sebagai lembaga pendidikan noformal yang tersebar di 16 Kecamatan.

Dalam konteks kebijakan pendidikan kesetaraan, dari 102 PKBM hanya 35 PKBM ditambah dengan 1 SKB sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali mandar. Dalam penelitian ini, ditetapkan 6 lembaga pendidikan nonformal yang dijadikan sebagai setting penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. PKBM AD

PKBM AD adalah PKBM yang didirikan sejak tahun 2002 dengan Nomor Induk Lembaga (NILEM) 76.1.05.4.1.0014.PKBM ini beralamat di Jl. Sungai Maloso No. 246 Desa Bonra Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali mandar.PKBM ini dikelola dan diketuai oleh ibu AS, S.Pd yang juga merupakan ketua Forum PKBM se Kabupaten Polewali Mandar.PKBM ini dipilih sebagai setting penelitian karena keberadaan PKBM sebagai salah-satu lembaga pendidikan nonformal tertua di Kabupaten Polewali Mandar dan dianggap sebagai PKBM percontohan.

b. PKBM BB

PKBM BB adalah PKBM yang didirikan sejak tahun 2010 dengan Nomor Induk Lembaga (NILEM) 76.1.05.4.1.0055. PKBM ini beralamat di Jl. H. Abd.Umar Lr.1 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali mandar. PKBM ini dikelola dan diketuai oleh bapak Idris Samijan. PKBM ini dipilih sebagai setting penelitian karena PKBM BB adalah salah-satu PKBM termuda di Kabupaten Polewali Mandar.

c. PKBM EM

PKBM EM adalah PKBM yang didirikan sejak tahun 2005 dengan Nomor Induk Lembaga (NILEM) 76.1.05.4.1.0045. PKBM ini beralamat Jl. Babatoa Raya No. 30 di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. PKBM ini dikelola dan diketuai oleh ibu SF, S.Pd. PKBM ini dipilih sebagai setting penelitian karena PKBM EM adalah salah satu PKBM yang tidak tercantum dalam surat keputusan kepala dinas tahun 2014 tentang daftar PKBM yang diakui di Kabupaten Polewali Mandar

d. PKBM ADD

PKBM ADD adalah PKBM yang didirikan sejak tahun 2007 dengan Nomor Induk Lembaga (NILEM) 76.1.05.4.1.0034. PKBM ini beralamat di Jl. Poros Majene Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. PKBM ini dikelola dan diketuai oleh ibu Dra. Hj. SN.

PKBM ini dipilih sebagai setting penelitian karena kedekatannya secara politik dan emosional dengan elit penguasa (Bupati).

e. SKB PM

SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Polewali Mandar merupakan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Kabupaten Polewali Mandar. SKB PM beralamat di Jl. Masjid Jami No. 27 Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. SKB PM diketuai oleh ibu Hj. MA, S.Pd. SKB PM dipilih sebagai setting penelitian karena secara struktural memiliki peran lebih dibandingkan dengan PKBM. Di sisi lain SKB wajib menjalin kemitraan yang solid dengan PKBM-PKBM dan menjadi lembaga pendidikan nonformal percontohan.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesenjangan di Kabupaten Polewali Mandar**

Kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar dinaungi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar di Bidang PLS (Pendidikan Luar Sekolah) pada Seksi Keaksaraan, Kesenjangan dan Pendidikan Masyarakat. Seksi Keaksaraan, Kesenjangan dan Pendidikan Masyarakat dikepalai oleh Ibu FT yang baru menjabat 2014 lalu. Pada awalnya pendidikan kesetaraan di naungi oleh bidang disdikmen sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, namun 2015 maret lalu tanggung jawab

pendidikan kesetaraan diberikan kepada seksi keaksaraan, kesetaraan, dan pendidikan masyarakat pada bidang PLS Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar.

Dari data yang diperoleh dari seksi keaksaraan, kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat DISDIKPORA Kabupaten Polewali Mandar berupa “Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali tahun 2014 tentang Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Polewali Mandar ber nomor 410.42/003.b/Disdikpora” terdapat 102 PKBM yang diakui dan mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatan pendidikan non formal di Kabupaten Polewali Mandar.

Dari 102 PKBM yang diakui tersebut, hanya 35 diantaranya yang melaksanakan program pendidikan kesetaraan. Hal ini berarti lembaga pelaksana pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar tidak mencapai 50 % pada tahun 2014. Ke 36 PKBM tersebut tersebar di 11 Kecamatan yaitu 4 PKBM di Kecamatan Balanipa, 3 PKBM di Kecamatan Tinambung, 9 PKBM di Kecamatan Campalagian, 1 PKBM di Kecamatan Alu, 2 PKBM di Kecamatan Mapilli, 3 PKBM di Kecamatan Matakali, 5 PKBM ditambah 1 SKB di Kecamatan Polewali, 1 PKBM di Kecamatan Tutar dan 1 PKBM di Kecamatan Bulu.

Dari 35 PKBM ditambah dengan 1 SKB, penelitian ini memilih lima lembaga pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan

kesetaraan sebagai setting penelitian dengan kriteria tertentu yang telah dijelaskan sebelumnya. Ke lima lembaga pendidikan tersebut adalah PKBM AD di Kecamatan Mapilli, PKBM BB di Kecamatan Wonomulyo, PKBM EM di Kecamatan Campalagian, PKBM ADD di Kecamatan Matakali dan SKB PM di Kecamatan Polewali.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada lembaga-lembaga tersebut, didapatkan data yang dapat mewakili dan menjelaskan mengenai implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun data tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. PKBM AD

PKBM AD adalah PKBM tertua di Kabupaten Polewali Mandar. Berdiri sejak tahun 2002 , dikelola dan diketuai oleh Ibu AA, S.Pd yang juga sekaligus sebagai ketua forum PKBM se-Kabupaten Polewali Mandar. PKBM ini beralamat di Jl. Sungai Maloso Desa Bonra Kecamatan Mapilli.

Berdasarkan data yang didapatkan dari berbagai narasumber, menyatakan bahwa PKBM AD adalah PKBM yang cukup mapan dan dianggap sebagai PKBM percontohan. Salah-satunya sesuai yang dinyatakan oleh IS selaku pengelola PKBM BB Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo :

“Memang PKBM AD adalah PKBM yang sudah dianggap baik di Kabupaten Polewali Mandar.Dikarenakan PKBM



ini adalah salah-satu PKBM tertua dan sudah berpengalaman” (IS/10/05/2015).

Namun data tersebut tidak sesuai dengan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan pengelola PKBM AD sendiri. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa semenjak tahun 2011 hingga sekarang PKBM AD menghentikan proses belajar mengajar pada program Pendidikan kesetaraan. Sesuai yang dinyatakan oleh ibu JR selaku pengelola PKBM AD :

“tahun 2011 sempat terjadi proses belajar mengajar, namun sudah ditiadakan hingga saat ini. Biasanya peserta didik yang mendaftar program paket kesetaraan langsung ikut ujian sesuai jadwal” (JR/04/05/2015).

Hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil pengamatan bahwa tidak adanya fasilitas belajar seperti bangku, meja, papan tulis dan lain-lain untuk proses belajar mengajar.

Meskipun tanpa melalui proses belajar mengajar, program pendidikan kesetaraan tetap diadakan setiap tahunnya. Di PKBM AD setelah mendaftar, peserta didik langsung dapat mengikuti Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hanya dengan membayar biaya sebesar Rp. 800.000,- (tahun ini naik menjadi Rp. 1000.000) per orang, peserta didik sudah dapat langsung mengikuti UNPK. Sesuai yang dinyatakan oleh bapak HD selaku alumni program paket C di PKBM AD :

“saya dan istri mendaftar di PKBM AD untuk pendidikan kesetaraan program paket C dengan membayar masing-masing Rp. 800.000. setelah itu, saya dan istri tidak pernah mengikuti proses belajar-mengajar dan langsung mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan” (HD/06/06/2015).

Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa proses implementasi pendidikan kesetaraan di PKBM AD tidak sesuai dengan amanat Permendiknas No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada bagian ke 3 tentang beban belajar pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “ beban belajar dalam pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan”. Hal tersebut juga secara otomatis mengugurkan amanat dalam payung hukum yang mengatur pelaksanaan program pendidikan kesetaraan seperti Permendiknas No. 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, Permendiknas No. 14 Tahun 2007 tentang Standar isi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, Permendiknas No. 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, dan Permendiknas No. 43 Tahun 2009 tentang Standar tenaga administrasi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa implementasi program pendidikan kesetaraan di PKBM AD belum terlaksana berdasarkan secara optimal.

b. PKBM BB

PKBM BB adalah PKBM yang beralamat di Jl. Haji Abdul Umar Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo. PKBM BB didirikan sejak tahun 2010 dan dikelola dan diketuai oleh bapak Idris Samijan. PKBM BB adalah salah satu PKBM termuda di Kabupaten Polewali Mandar dan merupakan satu dari 4 PKBM yang melaksanakan pendidikan kesetaraan yang berada di Kecamatan Wonomulyo.

PKBM BB memiliki 7 tutor dan mengadakan proses belajar mengajar setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu .kebutuhan pendidikan (baik material maupun nonmaterial) di PKBM ini belum terpenuhi 100 %. Meskipun alat pendidikan seperti ATK, modul, media pembelajaran, pendidik, peserta didik, dan tenaga administrasi sudah terpenuhi, namun proses belajar mengajar masih menumpang di gedung sekolah MI DDI Sumberjo Wonomulyo. Sesuai yang dinyatakan oleh bapak IS selaku ketua PKBM BB :

“PKBM BB memiliki 7 tutor dan mengadakan proses belajar mengajar pendidikan kesetaraan 3 kali dalam seminggu yaitu pada hari Jumat, sabtu dan minggu. namun kebutuhan pendidikan di PKBM kami masih belum

terpenuhi 100 %. Untuk gedung kami masih menumpang di MI DDI Sumberjo”(IS/10/05/2015).

Terkait mengenai implementasi pendidikan kesetaraan di PKBM BB, dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada beberapa proses yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No. 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan yaitu dalam permendiknas, proses pendidikan kesetaraan harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik, sedangkan yang terjadi di PKBM BB, dalam satu kelas terdiri dari beberapa peserta didik yang memiliki jenjang yang sama namun seharusnya berada pada tingkat kelas yang berbeda (kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 mendapatkan materi pembelajaran yang sama). Seperti yang dijelaskan oleh bapak IS :

“karena keterbatasan peserta didik dan juga pengaruh kondisi sosial dalam masyarakat sehingga dalam proses belajar-mengajar meskipun berbeda semester kami tetap gabung dalam satu kelas dan belajar bersama” (IS/10/05/2015).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Silabus dan RPP dalam proses pembelajaran tentu tidak relevan dengan prinsip dan sasaran yang telah ditetapkan dalam permendiknas no. 3 tahun 2008 tentang standar proses pendidikan kesetaraan.

Tidak hanya itu, hal tersebut juga mempengaruhi beban belajar dan kegiatan pembelajaran. Dalam permendiknas No. 3

tahun 2008 menjelaskan bahwa beban belajar dan kegiatan pembelajaran menggunakan sistem SKK (Sistem Kredit Kompetensi) dimana beban belajar program paket A, program paket B, dan program paket C dinyatakan dalam SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik yang mengikuti program pembelajaran. Dengan mengambil contoh kegiatan pembelajaran dengan sistem SKK program paket B yaitu pada tingkatan 3/terampil 1 (kelas VII-VIII) mempunyai beban 68 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SSK per semester. Pada tingkatan 4/terampil 2 (kelas IX) mempunyai beban 34 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.

Di PKBM BB, sistem SKK tidak berjalan sebagaimana yang ditetapkan dalam aturan. Beban belajar, materi pembelajaran, dan kompetensi peserta didik disamaratakan dalam satu kelas. Hal ini juga akan mempengaruhi proses evaluasi dan kompetensi lulusan, sehingga jika dikembalikan pada aturan atau standar yang berlaku, tentunya sudah meleset jauh dari prinsip yang ditetapkan.

Hal tersebut bukannya tanpa alasan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hal tersebut dilakukan karena ada beberapa masalah seperti kedisiplinan peserta didik (yang terkadang datang dan tidak datang). Walaupun datang hanya satu dua orang saja

sehingga meskipun berbeda tingkatan maka akan digabung), kejenuhan pendidik (meskipun latar belakang pendidikan ke 7 pendidik adalah sarjana, namun pekerjaan sebagai tenaga pengajar kesetaraan bukanlah prioritas karena gaji yang minim), dan kondisi mental sosial masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh bapak IS :

“hal tersebut terjadi karena ada beberapa masalah yang sangat rumit seperti pola pikir masyarakat yang masih memandang rendah pendidikan kesetaraan sehingga cenderung gengsi dan kesadaran pendidikan masyarakat yang masih sangat kurang” (IS/10/05/2015).

c. PKBM ADD

PKBM ADD adalah PKBM yang didirikan pada tahun 2007 dan beralamat di Jl. Poros Majene Kecamatan Matakali. PKBM ADD diketuai oleh ibu Dra. Hj. SN. Berdasarkan pengakuan dari beberapa narasumber, PKBM ADD termasuk salah satu PKBM yang dianggap mapan di Kabupaten Polewali Mandar. PKBM ADD adalah salah satu dari tiga PKBM yang melaksanakan pendidikan kesetaraan yang ada di Kecamatan Matakali.

PKBM ADD memiliki 32 tutor dengan latar belakang pendidikan S 1 dan Diploma (10 Tutor diantaranya adalah PNS). Proses belajar mengajar program pendidikan kesetaraan di PKBM ini dilaksanakan 3 hari dalam seminggu dengan bobot waktu 2x 60 menit untuk satu mata pelajaran. PKBM ADD memiliki gedung sendiri dan kebutuhan pendidikan lainnya seperti atk, media

pembelajaran, dan alat praktik sudah hampir terpenuhi 100 %. Sesuai yang dijelaskan oleh bapak SB selaku sekretaris PKBM ADD :

“ PKBM ADD melaksanakan pendidikan kesetaraan program paket B dan paket C. PKBM kami terdiri dari 32 tutor dengan latar belakang pendidikan S1 dan diploma dan 10 orang di antaranya adalah PNS. Kami melaksanakan program pendidikan kesetaraan 3 kali seminggu” (SB/15/05/2015).

Terkait mengenai implementasi pendidikan kesetaraan di PKBM ADD, permasalahan yang dihadapi juga tak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi oleh PKBM BB. Ada beberapa proses implementasi pendidikan kesetaraan di PKBM ini yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh aturan resmi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kegiatan belajar mengajar di PKBM ADD dilakukan dalam bentuk tutorial 60 % dan mandiri 40%. Seperti yang dijelaskan oleh bapak SB :

“ kegiatan belajar mengajar pendidikan kesetaraan di PKBM ADD dalam bentuk tutorial/tatap muka dengan bobot 40 % dan kegiatan mandiri dengan bobot 60 %” (SB/15/05/2015).

Sedangkan di dalam Permendiknas No. 3 Tahun 2008 tentang standar proses pendidikan kesetaraan, seharusnya kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk tatap muka minimal 20 %, tutorial minimal 30 %, dan mandiri maksimal 50 %.

Kemudian, dari aspek beban belajar dan kegiatan pembelajaran, PKBM ADD sudah membagi peserta didik berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan masing-masing peserta didik. Namun pada aspek pembagian peserta didik berdasarkan kelas atau kompetensi, meskipun peserta didik yang mendaftar program paket kesetaraan seharusnya mendapatkan materi untuk semester 2 namun tetap harus mengulang pada semester 1. Seperti yang dijelaskan oleh bapak SB :

“ meskipun peserta didik yang mendaftar sebelumnya berasal dari semester 2 atau tiga pada sekolahnya terdahulu, tetapi di PKBM kami mereka mengulang dari semester 1” (SB/15/05/2015).

Kenyataan-kenyataan tersebut bukanlah tanpa alasan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa beberapa masalah yang mempengaruhi dimana masalah-masalah tersebut sangat sulit untuk dihindari seperti keterbatasan ruangan, keterbatasan dana, keterbatasan waktu, konsistensi tenaga pendidik, dan kondisi mental masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh bapak SB :

“masalah-masalah seperti keterbatasan ruangan, keterbatasan dana, keterbatasan waktu, konsistensi tenaga pendidik dan kondisi mental masyarakat memang tidak dapat dihindarkan” (SB/15/05/2015).

d. PKBM EM

PKBM EM adalah PKBM yang terletak di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian. PKBM ini berdiri sejak tahun. Dikelola



dan diketuai oleh Ibu Sarifa Farida, S.Pd. Untuk pendidikan kesetaraan, PKBM ini hanya mengadakan program paket B.

PKBM EM memiliki tujuh Tutor atau tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Satu kelas diisi maksimal 25 murid. Proses belajar mengajar program pendidikan kesetaraan di PKBM ini dilakukan 3 kali dalam seminggu yaitu pada hari Jumat, Sabtu (teori), dan Minggu (keterampilan) dengan durasi 1 mata pelajaran per 2 jam. Jenis keterampilan yang diajarkan dalam PKBM ini adalah berupa tata boga seperti pembuatan abon dan tata busana. Sesuai yang dinyatakan oleh ibu SF selaku ketua PKBM EM :

“PKBM EM hanya mengadakan pendidikan kesetaraan program paket B. memiliki 7 tenaga tutor. Dalam satu kelas diisi maksimal 25 peserta didik. Kegiatan belajar mengajar diadakan 3 kali dalam se minggu yaitu pada hari Jumat dan Sabtu diisi dengan teori, hari Minggu diisi dengan program keterampilan. Untuk keterampilan sendiri, kami mengadakan program tata boga dan tata busana” (SF/20/05/2015).

Dari segi kebutuhan, kebutuhan pendidikan PKBM EM belum terpenuhi 100 %. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa PKBM ini masih kekurangan alat peraga untuk keterampilan dan hanya memiliki 1 gedung untuk proses belajar mengajar. Seperti yang dijelaskan oleh ibu SF :

“ Jujur PKBM kami sebenarnya masih sangat kekurangan seperti kurangnya alat peraga untuk program keterampilan dan keterbatasan gedung”(SF/20/05/2015).

Pada tahun ajaran 2014-2015, PKBM EM telah mengikutsertakan 25 peserta didiknya untuk mengikuti UNPK program paket B. Sebenarnya PKBM EM telah melaksanakan program pendidikan kesetaraan dengan baik. Namun dari hasil penelitian didapatkan bahwa yang menjadi masalah utama dalam implementasi pendidikan kesetaraan di PKBM ini adalah tetap menerima peserta didik tanpa harus mengikuti proses belajar-mengajar dengan syarat tertentu seperti memenuhi kegiatan mandiri dengan aturan yang ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh ibu SF :

“Mau bagaimana lagi, kami tetap mengikutsertakan peserta didik kedalam program meskipun tanpa harus mengikuti proses belajar mengajar, namun dengan syarat tertentu seperti dengan mengikuti kegiatan mandiri dengan aturan yang telah ditetapkan” (SF/20/05/2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, sebagaimana yang tercantum dalam Permendiknas No. 3 tahun 2008 tentang standar proses pendidikan kesetaraan yang mengatakan bahwa “kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk tatap muka minimal 20 %, tutorial minimal 30 %, dan mandiri maksimal 50 %. Dalam hal ini, PKBM EM jelas belum mematuhi prinsip yang telah ditetapkan.

Lalu kemudian, berdasarkan hasil penelitian diketahui ternyata di dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar bernomor 410.42/003.b/disdikpora tentang “Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014” nama PKBM EM tidak tercantum. Seperti yang dijelaskan oleh ibu FT selaku Kepala Seksi Kesetaraan Bidang PLS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar :

“ PKBM-PKBM yang tercantum di dalam surat keputusan Kepala Dinas tersebut adalah PKBM yang dianggap legal dan memiliki izin. Adapaun PKBM yang tidak tercantum di dalam surat tersebut dianggap tidak memiliki izin”(SF/20/05/2015).

Jika berpedoman pada SK Kepala Dinas tersebut, maka PKBM EM dianggap tidak memiliki izin. Namun, dari hasil penelitian, didapatkan bahwa ternyata dokumen mengenai data PKBM dan Peserta didik program paket B tahun 2014/2015 didalamnya terdapat nama PKBM EM. Dalam hal ini, terjadi kontradiksi antara SK Kepala Dinas dengan Data PKBM dan Peserta didik tahun 2014/2015 serta data primer yang didapatkan melalui observasi dan wawancara.

e. SKB PM

SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar Polewali terletak di Jl. Masjid Jami No. 27 Kecamatan Polewali. Saat ini SKB Polewali diketuai oleh ibu MA, S.Pd. Sama seperti PKBM-PKBM yang lain,

SKB juga menyelenggarakan program-program pendidikan nonformal yang juga diselenggarakan oleh PKBM, tanpa terkecuali program pendidikan kesetaraan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (formal, nonformal, dan informal) pada bab IV tentang “penyelenggaraan pendidikan nonformal” pasal 100 ayat 2 sama sekali tidak mencantumkan nama SKB sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan nonformal, sedangkan PKBM tercantum di dalamnya. Juga bisa kita lihat pada pasal 102 ayat 3 yang berbunyi “pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, sedangkan SKB merupakan produk pemerintah yang berbentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga yang tidak sesuai dengan prinsip yang tercantum di dalam pasal 102 ayat 3 tersebut.

Meskipun sama-sama dapat menyelenggarakan program pendidikan nonformal, namun yang membedakan antara SKB dan PKBM adalah kekuatan payung hukum. SKB tidak memiliki payung hukum yang kuat secara nasional, sedangkan PKBM diatur oleh payung hukum yang kuat secara nasional. lalu Kemudian yang juga membedakan keduanya adalah, karena PKBM murni terbentuk dari prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga

sumber dana yang digunakan sebagian besar bersifat swadaya. Sedangkan SKB sebagai produk pemerintah daerah memiliki sumber dana yang rutin, jelas, dan konsisten.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa beberapa pengelola PKBM di Kabupaten Polewali Mandar hampir semua memiliki jawaban yang beragam terkait mengenai keberadaan SKB. Seperti yang dijelaskan oleh bapak SB Bapak selaku sekretaris PKBM ADD :

“ SKB merupakan PKBM plat merah/milik pemerintah dengan sumber dana yang jelas” (SB/15/05/2015).

Bapak SH selaku Ketua PKBM Wahyuri juga mengatakan

“SKB merupakan lembaga pendidikan yang sifatnya negeri karena dijabat oleh para PNS” (SH/08/05/2015).

Dipertegas kembali oleh ibu SF selaku ketua PKBM EM,

“SKB adalah mitra PKBM tetapi SKB dikelola oleh pemerintah daerah” (SF/20/05/2015).

Juga dipertegas lagi oleh ibu JR selaku Pengelola PKBM AD,

“saya kurang begitu tahu tentang SKB. Mungkin SKB formal sedangkan PKBM tidak formal dan kedudukan SKB lebih diatas” (JR/04/05/2015).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa memang tujuan dan fungsi utama dari keberadaan SKB Polewali tidak begitu diketahui oleh pengelola-pengelola PKBM di Kabupaten Polewali Mandar. Bahkan sikap kritis mengenai keberadaan SKB secara payung hukum tidak pernah dipertanyakan sedikitpun.

Pendapat-pendapat tersebut juga membuktikan bahwa kemitraan yang seharusnya terjalin antara SKB dan PKBM tidak terwujud.

Sesuai yang dinyatakan oleh ibu MA selaku ketua SKB PM :

“ PKBM dan SKB memiliki kedudukan yang berbeda namun program-program yang dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan program yang dilaksanakan oleh SKB. Tetapi perbedaan yang paling mencolok adalah SKB sebagai lembaga formal milik pemerintah yang diatur oleh pemerintah sedangkan PKBM hanya lembaga swadaya masyarakat” (MA/08/05/2015).

Penjelasan ketua SKB polewali mengenai PKBM semakin memperkuat bahwa tidak terwujudnya kemitraan antara SKB dan PKBM di Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 023/0/1997 tanggal 20 februari 1997 mengatakan bahwa tugas utama dari SKB adalah sebagai pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksana program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga berdasarkan kebijaksanaan teknis direktorat jenderal pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga di tingkat kabupaten/kotamadya.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tidak satu pun jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu MA selaku ketua SKB Polewali yang mengarah kepada tugas utama dari SKB yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh ibu MA :

“SKB bertugas untuk menyelenggarakan program-program pendidikan nonformal dan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar” (MA/08/05/2015).

Apa yang dilaksanakan oleh SKB Polewali tidak jauh beda dengan apa yang dilaksanakan oleh setiap PKBM di Polewali Mandar tanpa terkecuali program pendidikan kesetaraan.

Dari hasil penjelasan sebelumnya, meskipun SKB mampu melaksanakan pendidikan kesetaraan namun SKB Polewali belum dapat melaksanakan fungsi utamanya secara optimal dalam membentuk kemitraan yang solid dengan PKBM-PKBM di Polewali mandar.

## **2. Masalah-Masalah dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar**

Menurut data yang didapatkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sulawesi Barat, dari tahun 2005 hingga tahun 2011, Kabupaten Polewali Mandar menempati posisi terendah sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Sulawesi Barat. Rendahnya angka kemiskinan juga berbanding lurus dengan rendahnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Polewali Mandar yang juga menempati posisi terbawah sebagai daerah dengan IPM terendah di Sulawesi Barat dari tahun 2005 hingga tahun 2012. Bahkan pada masa itu IPM Kabupaten Polewali Mandar belum pernah mencapai rata-rata IPM secara nasional.

Di Kabupaten Polewali Mandar, titik rendahnya IPM dan tingginya angka Kemiskinan berada di daerah Balanipa (Kerajaan Balanipa) yang melingkupi Kecamatan Campalagian, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Luyo, Kecamatan Tutar, Kecamatan Allu, dan Kecamatan Limboro dimana Kecamatan Balanipa dan Kecamatan Campalagian sebagai penyumbang tertinggi tingginya angka kemiskinan dan rendahnya IPM di Kabupaten Polewali Mandar. Dari hasil penelitian diketahui bahwa keterbelakangan daerah Balanipa di hampir semua aspek adalah salah satu alasan utama mengapa daerah ini ingin berdaulat atau memekarkan diri menjadi Kabuapten Balanipa.

Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya IPM merupakan kesenjangan bagi daerah yang mengalaminya. Hal tersebut merupakan bukti bahwa hak mendasar rakyat yaitu pendidikan belum terpenuhi dengan baik. Aspek pendidikan memang merupakan aspek yang sangat vital dan sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Namun ada satu indikator penting yang sering terabaikan dalam tubuh pemerintahan, yaitu pendidikan nonformal. Dalam penelitian ini, pendidikan nonformal, yang lebih spesifik kepada implementasi pendidikan kesetaraan menjadi pembahasan utama.

Pengaruh kuat indikator pendidikan nonformal terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar nampaknya telah disadari oleh pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini



dibuktikan dengan dijadikannya pendidikan sebagai salah satu dari tiga pilar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Polewali Mandar. Dengan mencanangkan program desa cerdas mandiri, terdapat 5 pilar dimana salah satu dari pilar tersebut adalah revitalisasi PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar yang bernomor 410.42/003.b/Disdikpora pada tahun 2014 tercatat 102 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebagai lembaga pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan nonformal yang tersebar di semua kecamatan-kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah per kecamatan sebagai berikut : 8 PKBM di Kecamatan Binuang, 16 PKBM di Kecamatan Polewali, 2 PKBM di Kecamatan Anreapi, 7 PKBM di Kecamatan Matakali, 7 PKBM di Kecamatan Wonomulyo, 6 PKBM di Kecamatan Tapango, 5 PKBM di Kecamatan Mapilli, 4 PKBM di Kecamatan Luyo, 17 PKBM di Kecamatan Campalagian, 6 PKBM di Kecamatan Balanipa, 7 PKBM di Kecamatan Tinambung, 5 PKBM di Kecamatan Limboro, 2 PKBM di Kecamatan Alu, 4 PKBM di Kecamatan Tutar, 1 PKBM di Kecamatan Matangga, dan 5 PKBM di Kecamatan Bulu.

Secara kuantitas, 102 PKBM dalam satu daerah tingkat II terbilang sangatlah banyak. Sehingga penelitian ini mencoba untuk mencari jawaban mengapa daerah dengan jumlah 102 PKBM tetapi

memiliki IPM yang sangat rendah. Dalam aspek implementasi pendidikan kesetaraan, jika 102 PKBM tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dengan baik maka akan berbanding lurus dengan tingginya kualitas pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar. Terkait mengenai implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar dengan melihat kenyataan yang telah dijelaskan sebelumnya, nampaknya kuantitas tidak selamanya berbanding lurus dengan kualitas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini membagi dua bentuk masalah yang mempengaruhi implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali mandar, adalah sebagai berikut :

a. Masalah Struktural

Masalah struktural adalah salah satu masalah pokok yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Masalah struktural berkaitan dengan birokrasi pemerintah sebagai pengendali kebijakan terhadap implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Masalah struktural ini bersifat top down karena berkaitan erat dengan keputusan-keputusan pemerintah berupa kebijakan yang mengarah kepada implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.

Implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar secara struktural belum berjalan secara optimal. Di tubuh

birokrasi pendidikan dalam hal ini pada bidang PLS seksi Keaksaraan, Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar mengalami inkonsistensi struktural dimana reposisi jabatan dalam interval waktu yang relatif singkat sering terjadi sehingga menyebabkan terjadinya pula inkonsisten terhadap upaya-upaya dalam melaksanakan fungsi birokrasi pendidikan. Hal tersebut sesuai yang dinyatakan oleh ibu FT selaku ketua seksi keaksaraan, kesetaraan dan pendidikan masyarakat :

“ saya belum terlalu mengetahui seluk beluk mengenai implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar karena saya belum lama menjabat sebagai kepala seksi” (FT/04/05/2015).

Penjelasan di atas membuktikan adanya ketidaksiapan dalam hal interpretasi terhadap kebijakan maupun secara pengalaman dalam tubuh kepemimpinan birokrasi pendidikan kesetaraan Disdikpora Polewali Mandar. Hal tersebut juga dipertegas dengan masalah pengetahuan mengenai hakikat pendidikan kesetaraan. Pihak birokrat memaknai hakikat pendidikan kesetaraan secara sempit. Seperti yang dijelaskan oleh ibu FT :

“ hakikat pendidikan kesetaraan adalah mengembalikan kembali anak-anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah”(FT/04/05/2015).

Pengertian sempit mengenai hakikat pendidikan kesetaraan dalam tubuh kepemimpinan birokrasi pendidikan kesetaraan

Disdikpora Polewali Mandar adalah suatu hal yang tidak wajar, karena hal tersebut berpengaruh besar terhadap proses pembuatan kebijakan. Mengenai hakikat pendidikan kesetaraan yang dijelaskan sebelumnya juga diperkuat dengan anggapan bahwa pendidikan formal dan nonformal memiliki kedudukan yang sangat berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh ibu FT :

“pendidikan formal dan nonformal memang secara konsep harus sama-sama berkualitas tetapi secara kenyataan jelas sangat berbeda dan sangat sulit untuk mensejajarkan diantara keduanya” (FT/04/05/2015).

Penjelasan sebelumnya menjelaskan sebuah kepasrahan terhadap kondisi realitas pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar dan sedikit tak ada niat untuk mengubah masalah besar tersebut. Masalah struktural lainnya yang juga mempengaruhi implementasi pendidikan kesetaraan di Polewali Mandar adalah lemahnya dan kakunya indikator keberhasilan implementasi pendidikan kesetaraan dalam pemahaman birokrasi. Seperti yang dinyatakan oleh ibu FT :

“implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar sudah bisa dikatakan sangat berhasil. Indikatornya pemerintah sudah mengembalikan 2000 lebih anak untuk bersekolah dan para lulusan pendidikan kesetaraan juga banyak yang berhasil seperti menjadi anggota DPRD, PNS dll” (FT/04/05/2015).

Penjelasan sebelumnya adalah bukti dari lemahnya interpretasi birokrasi pendidikan kesetaraan di Polewali Mandar

terhadap kondisi realita sosial dalam masyarakat. Lemahnya interpretasi terhadap indikator keberhasilan juga diperkuat dengan inkonsistensi pengetahuan mengenai fungsi utama birokrasi pendidikan yang bertanggung jawab untuk keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Seperti yang dinyatakan oleh ibu FT :

“ tugas dari seksi keaksaraan, kesetaraan dan pendidikan masyarakat adalah menindaklanjuti apa yang diprogramkan oleh provinsi dan pusat, juga melakukan monitoring 2 kali se tahun” (FT/04/05/2015).

Penjelasan di atas membuktikan bahwa dinamika proses manajemen pendidikan dalam tubuh birokrasi pendidikan kesetaraan Polewali Mandar berada dalam kondisi yang statis. Hal tersebut ternyata berdampak besar terhadap fungsi evaluasi pendidikan kesetaraan di Polewali Mandar. Evaluasi PKBM di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan 1 kali dalam setahun dan disahkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas. Pada tahun 2014 terdapat 6 PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan namun di dalam surat keputusan nama dari ke 6 PKBM tersebut tidak tercantum, termasuk PKBM EM di dalamnya. Untuk tahun 2015, proses evaluasi seharusnya dilakukan pada awal tahun namun baru dilakukan pada pertengahan Mei 2015 dan surat keputusan yang nantinya terbit tetap disahkan pada tanggal 1 Januari. Seperti yang dinyatakan oleh ibu FT :

“memang benar evaluasi seharusnya dilakukan pada awal tahun 2015, namun karena ada kendala sehingga dilakukan pada bulan Mei 2015. Jadi selama sebelum dievaluasi kami masih memakai SK 2014. Meskipun evaluasi dilakukan pada bulan Mei tetapi SK yang keluar tetap bertanggal 1 Januari demi untuk bahan pertanggung jawaban nantinya” (FT/20/05/2015).

Lemahnya fungsi evaluasi juga merupakan dampak dari jumlah PKBM yang relatif banyak di Kabupaten Polewali Mandar. Pendirian PKBM seharusnya berdasarkan pada kebutuhan pendidikan dalam suatu masyarakat di daerah tertentu. Lemahnya fungsi input atau mudahnya pemberian izin terhadap pendirian PKBM di Kabupaten Polewali Mandar adalah penyebab dari ketidakmerataan penyebaran PKBM di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam hal ini, birokrasi pendidikan kesetaraan tidak benar-benar melihat kondisi sosio-kultural dan kebutuhan pendidikan masyarakat.

Masalah-masalah struktural yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan faktor awal dari lemahnya fungsi birokrasi pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut sangat jelas berdampak terhadap pembuatan kebijakan khusus demi terwujudnya pendidikan kesetaraan yang berkualitas di Kabupaten Polewali Mandar. Di Polewali Mandar sendiri tak ada satupun kebijakan khusus yang memiliki fokus utama untuk menjembatani kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu FT :

“ sampai saat ini belum ada kebijakan khusus untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Tidak ada dana APBD untuk alokasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar” (FT/04/05/2015).

Masalah-masalah struktural yang telah dijelaskan sebelumnya adalah masalah-masalah yang berasal dari tubuh birokrasi pendidikan. Masalah-masalah struktural yang terjadi pada tubuh birokrasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar ternyata berdampak besar terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di lembaga-lembaga pendidikan nonformal sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.

Oleh karena fungsi birokrasi pendidikan kesetaraan Disdikpora Polewali Mandar tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga berdampak besar terhadap implementasi pendidikan kesetaraan di berbagai lembaga pendidikan nonformal. Ada beberapa masalah struktural mengenai implementasi pendidikan kesetaraan yang berasal dari tubuh lembaga-lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Polewali Mandar.

Implementasi pendidikan kesetaraan yang tidak berlandaskan pada aturan-aturan yang menaunginya adalah masalah pokok yang terjadi di dalam tubuh lembaga-lembaga pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di

Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu JR selaku pengelola PKBM AD :

“sejak tahun 2011, proses belajar-mengajar pendidikan kesetaraan di PKBM kami dihentikan sampai sekarang. Jadi yang mendaftar bisa langsung mengikuti ujian sesuai jadwal” (JR/04/05/2015).

Kemudian diperkuat oleh Ibu SF selaku ketua PKBM EM yang menyatakan,

“Mau bagaimana lagi, kami tetap mengikutsertakan peserta didik kedalam program meskipun tanpa harus mengikuti proses belajar mengajar, namun dengan syarat tertentu seperti dengan mengikuti kegiatan mandiri dengan aturan yang telah ditetapkan” (SF/20/05/2015).

Kemudian dipertegas oleh bapak IS selaku ketua PKBM BB,

“karena keterbatasan peserta didik dan juga pengaruh kondisi sosial dalam masyarakat sehingga dalam proses belajar-mengajar meskipun berbeda semester kami tetap gabung dalam satu kelas dan belajar bersama” (IS/10/05/2015).

Masalah yang dijelaskan sebelumnya bukanlah tanpa alasan. Ada beberapa masalah yang menjadi penyebab dari masalah tersebut seperti keterbatasan dana. Keterbatasan dana adalah masalah umum yang sering dikeluhkan oleh pihak PKBM di Kabupaten Polewali Mandar.

Salah satu penyebab utama dari keterbatasan dana tersebut adalah karena tidak adanya dana APBD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali sehingga PKBM-PKBM hanya mengharapkan dan BOP



yang juga harus melewati kompetisi persaingan proposal antara PKBM 1 dengan PKBM yang lain untuk mendapatkannya. Seperti yang dinyatakan oleh ibu SF :

“ yang kami andalkan adalah dana BOP yang tidak setiap tahun kami dapatkan karena harus bersaing dengan PKBM-PKBM yang lain” (SF/20/05/2015).

Kemudian dipertegas oleh bapak IS yang menyatakan,

“ sumber dana kami dapat dari kemitraan dan BOP. Kalau dana BOP harus bersaing dulu untuk mendapatkannya” (IS/10/05/2015).

Persaingan antara PKBM yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan dana disebabkan oleh banyaknya jumlah PKBM yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Tercatat pada tahun 2014 terdapat 102 PKBM yang memiliki izin operasional.

Banyaknya PKBM dan keterbatasan dana jelas akan menciptakan kesenjangan baru dalam implementasi pendidikan kesetaraan. PKBM yang jarang mendapatkan dana akan mencari jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan lembaganya. Mengikuti UNPK secara instan dengan syarat harus membayar sebesar nominal tertentu adalah alternatif yang telah menjadi kebiasaan dalam tubuh beberapa PKBM di Kabupaten Polewali Mandar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh saudara HR selaku lulusan salah satu pendidikan kesetaraan di PKBM x :

“saya dan istri masing-masing membayar Rp. 800.000 untuk mengikuti ujian paket C. saya tidak mengikuti proses belajar-mengajar sebelumnya” (HR/23/05/2015).

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan ibu JR,

“ di PKBM kami peserta didik yang membutuhkan ijazah langsung mengikuti ujian saja” (JR/04/05/2015).

Penjelasan sebelumnya membuktikan bahwa implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar mengalami penyimpangan secara hukum yang diakibatkan oleh faktor-faktor struktural yang sangat rumit.

#### b. Masalah Kultural

Masalah Kultural adalah masalah yang bersumber dari kondisi sosio-kultural dalam suatu masyarakat. Masalah kultural biasanya dipahami sebagai suatu masalah yang terjadi secara alamiah, namun ternyata juga dapat terjadi atau bersumber dari masalah-masalah struktural yang terkait mengenai kebijakan pemerintah di suatu daerah.

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai masalah struktural yang mempengaruhi implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupten Polewali mandar. Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai masalah-masalah kultural yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar, baik yang bersifat alamiah maupun bersumber dari masalah struktural.

Implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar mengalami masalah yang rumit. Jika masalah struktural bersifat *top-down* maka masalah kultural bersifat *bottom-up* karena berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Partisipasi pendidikan merupakan point utama dari masalah kultural yang mempengaruhi implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.

Secara kultural, implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar tidak berjalan dengan baik. Secara kultural, hal tersebut disebabkan oleh kondisi kesadaran pendidikan sebagian masyarakat Polewali Mandar yang masih sangat rendah. Bagi mereka, pendidikan tidaklah penting, yang terpenting adalah bekerja atau bagaimana cara memperoleh uang dengan cepat demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan ibu SB selaku masyarakat Polewali Mandar :

“ percuma kita sekolah kalau ujung-ujungnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Mending langsung bekerja saja” (SB/15/05/2015).

Masalah yang dijelaskan sebelumnya juga diperkuat dengan anggapan masyarakat bahwa pendidikan itu mahal. Sebagian masyarakat Polewali Mandar memilih untuk tidak bersekolah karena alasan ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh saudara HD :

“bekerja lebih penting dibandingkan bersekolah. Sekolah hanya menghambur-hamburkan uang” (HD/11/05/2015).

Meskipun alasan ekonomi merupakan salah satu masalah kultural, namun masalah tersebut merupakan dampak dari masalah struktural. Ketidaktahuan masyarakat mengenai pendidikan gratis akibat lemahnya informasi pendidikan dari pemerintah adalah pemicu masalah kultural tersebut.

Masalah kultural selanjutnya, terkait mengenai pendidikan kesetaraan, sebagian besar masyarakat Polewali Mandar menganggap bahwa pendidikan kesetaraan adalah pendidikan yang rendah dan sangat jauh kualitasnya dibanding pendidikan formal. Hal tersebut menyebabkan orientasi peserta didik dalam mendaftar pendidikan kesetaraan hanyalah untuk mendapat ijazah. Seperti yang dijelaskan oleh saudara HR :

“ saya mendaftar pendidikan kesetaraan paket C untuk kebutuhan ijazah semata. Selama saya menjadi siswa pendidikan kesetaraan, saya tidak pernah mengikuti proses belajar-mengajar. Langsung ujian saja sesuai jadwal” (HR/23/05/2015).

Masalah yang telah dijelaskan sebelumnya juga berdampak pada kondisi psikis masyarakat dimana munculnya sikap minder untuk bersekolah di pendidikan kesetaraan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa para peserta didik jarang mengikuti proses belajar mengajar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak SB selaku Sekretaris PKBM ADD :

“faktor gengsi adalah faktor mengapa kebanyakan peserta didik jarang untuk mengikuti proses belajar mengajar” (SB/15/05/2015).

Bapak IS selaku ketua PKBM BB juga mengatakan :

“sikap minder dan gengsi menjadi salah satu masalah mengapa sebagian besar murid-murid saya jarang datang untuk belajar” (IS/10/05/2015).

Masalah kultural selanjutnya yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar adalah tuntutan kerja. Meskipun anak-anak memiliki kesadaran pendidikan yang baik, namun tuntutan orang tua lebih besar dibandingkan kesadaran pendidikan tersebut. sebagian orang tua di Kabupaten Polewali Mandar lebih menginginkan anak-anaknya untuk bekerja dibanding bersekolah. Seperti yang dijelaskan oleh bapak SB selaku sekretaris PKBM ADD :

“mau bagaimana lagi, kami tak bisa apa-apa. Kami hanya bisa mengingatkan. Selebihnya adalah keputusan orang tua. Kalau orang tua bilang A, anaknya harus melakukan A” (SB/15/05/2015).

Masalah yang telah dijelaskan sebelumnya sangat sering terjadi pada musim panen. Oleh karena sebagian besar masyarakat Polewali Mandar bekerja sebagai petani dan nelayan sehingga pada saat musim panen, untuk melancarkan proses panen, maka seluruh anggota keluarga termasuk anak harus turut ikut membantu

keluarga untuk mengelola hasil panen. Seperti yang dijelaskan oleh ibu SF selaku ketua PKBM EM :

“karena daerah saya berada di daerah pesisir, kalau sudah musim panen ikan, itu kondisi kelas pasti nyaris kosong” (SF/20/05/2015).

Masalah-masalah kultural yang telah dijelaskan sebelumnya terkait mengenai partisipasi peserta didik juga mempengaruhi psikis para pengelola PKBM-PKBM di Kabupaten Polewali Mandar. Salah-satu masalah kultural yang juga mempengaruhi implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar adalah kepasrahan pengelola PKBM terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh ibu AS selaku ketua PKBM AD :

“kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kondisi masyarakat seperti itu. Kita hanya bisa pasrah. Makanya ada beberapa prosedur yang kami lakukan tidak sesuai dengan standar yang berlaku” (AS/23/05/2015).

Ibu JR juga menegaskan,

“kita pasrah saja dengan kondisi masyarakat kenapa tidak mau datang untuk belajar. Makanya semenjak tahun 2011 kita berhentikan proses belajar mengajar” (JR/04/05/2015).

Sebelumnya telah kita jelaskan bahwa PKBM AD, semenjak tahun 2011 hingga sekarang telah memberhentikan proses mengajar dalam implementasi pendidikan kesetaraan. Hal tersebut tidak dilakukan semata-mata untuk meraup keuntungan

materi juga karena sebagai bentuk kepasrahan terhadap kondisi masyarakat.

### **3. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Masalah-Masalah dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesenjangan di Kabupaten Polewali Mandar**

Berdasarkan hasil penelitian, salah-satu upaya jangka panjang yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar adalah melalui Program Pendidikan “Desa Cerdas Mandiri” dimana ada 5 pilar yang menjadi indikator keberhasilan program tersebut yaitu:

- a. Penuntasan Tuna Aksara di daerah tertinggal
- b. Pemerataan akses pendidikan dasar
- c. Pemerataan guru dan tenaga pendidik
- d. Penyetaraan pendidikan dasar
- e. Revitalisasi PAUD, PKBM dan TBM

Pelaksanaan program desa cerdas mandiri dimulai sejak 7 Januari 2014. Jika dihitung dari sekarang maka program ini sudah berjalan selama 17 bulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait mengenai implementasi pendidikan kesetaraan, dapat diketahui bahwa selama 17 bulan program tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan revitalisasi PKBM belum terwujud dengan belum meratanya penyebaran PKBM secara kuantitas maupun secara kualitas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Seksi Keaksaraan, Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat Bidang PLS Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar, didapatkan bahwa belum adanya kebijakan khusus mengenai implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar dan juga sedikitpun tidak pernah menyinggung mengenai kebijakan pendidikan “Desa Cerdas Mandiri”. Seperti yang dinyatakan oleh ibu FT selaku Kepala Seksi Kesetaraan Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar “

“selama kami hanya bertugas untuk menindaklanjuti apa yang diprogramkan pemerintah provinsi/pusat. Kemudian melakukan monitoring yang dilakukan 2 kali setahun yang didukung oleh dana APBD” (FT/04/05/2015).

Dari penjelasan di atas membuktikan bahwa kebijakan pendidikan khusus untuk mendukung implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar sama sekali belum ada.

Namun ada beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir masalah-masalah terkait mengenai implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar seperti pemberian bantuan dana BOP, Pelatihan Tutor, Sosialisasi, Monitoring dan Pembagian Buku-buku modul. Seperti yang dijelaskan oleh bapak IS :

“Dinas Pendidikan sudah sangat peduli. Ini dibuktikan dengan adanya pelatihan yang dilaksanakan setiap tahun, sosialisasi, monitoring, dan pembagian buku-buku modul” (IS/10/05/2015).



Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah demi terwujudnya implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan yang baik di Kabupaten Polewali Mandar belum menyentuh substansi dari permasalahan sesungguhnya dan masih berada pada orientasi formalitas semata.

Kebijakan pendidikan yang bertajuk Desa Cerdas Mandiri sebagai kebijakan jangka panjang yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar seharusnya dapat terealisasi dengan baik. Satu tahun lebih pelaksanaan tanpa ada hasil yang signifikan adalah suatu bentuk mandegnya proses implementasi pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar. Masalah struktural dan masalah kultural yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan membutuhkan kebijakan khusus yang harus dianggarkan dalam APBD. Kebijakan khusus yang benar-benar tajam dan terprogram dengan baik berjenjang dan jangka panjang.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar**

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA yang mencakup program paket A setara dengan SD/MI, Paket B setara dengan SMP/MTS, dan paket C setara dengan SMA/MA. Pendidikan kesetaraan bertujuan untuk memberikan ruang

yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk dapat memenuhi hak pendidikannya pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah.

Pendidikan kesetaraan memiliki landasan hukum yang sangat kuat sehingga sangat tidak wajar ketika dalam implementasinya terjadi penyimpangan. Pendidikan kesetaraan dipayungi oleh UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Permendiknas No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendiknas No. 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan paket A, B, dan C, Permendiknas No. 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C, Permendiknas No. 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan paket A, B, dan C, Permendiknas no. 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C, Permendiknas No. 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C, dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Kekuatan hukum kebijakan pendidikan kesetaraan seharusnya menjadi pengikat atau pedoman kuat dalam implementasi kebijakan tersebut. Pendidikan Kesetaraan sebagai bagian dari pendidikan nonformal memiliki derajat yang sama dengan pendidikan formal.

Lulusan program pendidikan kesetaraan memiliki hak egilibilitas yang setara dengan lulusan sekolah formal. Yang artinya, idealnya, setara tersebut bermakna setara secara kualitas maupun setara pada aspek-aspek yang lain.

Sejatinya, pendidikan kesetaraan bukanlah alternatif yang dijadikan sebagai pelarian pendidikan ketika mengalami kegagalan dalam pendidikan formal. Kedudukan pendidikan nonformal dan pendidikan formal adalah sama. Tidak ada hierarki diantara keduanya. Hal tersebut ditegaskan di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang tidak sedikitpun menuliskan tentang hierarki antara jalur pendidikan, baik formal maupun nonformal. Oleh karena itu, jika pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan kesetaraan adalah pendidikan alternatif maka pandangan tersebut adalah suatu hal yang keliru.

Dalam penelitian ini, pandangan masyarakat yang keliru terhadap hakikat pendidikan kesetaraan adalah penemuan yang sangat penting. Penelitian ini mendapatkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Polewali Mandar memiliki pandangan yang seragam mengenai hakikat dari pendidikan kesetaraan. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa pendidikan kesetaraan adalah pendidikan alternatif sebagai tempat pelarian ketika gagal pada jalur pendidikan formal. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah pendidikan

kesetaraan dijadikan sebagai wadah untuk kebutuhan ijazah dengan mengabaikan proses dan kualitas pendidikan.

Pandangan keliru terhadap hakikat pendidikan kesetaraan terjadi di semua lapisan masyarakat. Di Kabupaten Polewali Mandar, pandangan keliru tersebut terjadi mulai dari kalangan birokrasi pendidikan, pengelola lembaga pendidikan nonformal sampai dengan masyarakat umum. Melihat kondisi yang rumit tersebut, sehingga sangatlah sulit untuk membuka ruang untuk meluruskan kembali makna pendidikan kesetaraan agar kembali kepada fitrohnya.

Kerumitan terkait anggapan keliru mengenai hakikat pendidikan kesetaraan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat Kabupaten Polewali Mandar tentunya sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan di daerah tersebut, apalagi anggapan keliru tersebut juga terjadi dalam tubuh birokrasi pendidikan sebagai pengendali kebijakan. Oleh karena proses kebijakan memiliki alur *top-down*, sehingga jika pola pikir birokrasi pendidikan terhadap suatu kebijakan mengalami kekeliruan maka proses sosialisasi bahkan defuse kebijakan akan mengalami disorientasi yang akan berdampak besar terhadap partisipasi pendidikan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Kesimpulannya, interpretasi birokrasi terhadap pendidikan sangat mempengaruhi proses kebijakan menuju keberhasilan tujuan dari kebijakan tersebut.

Lemahnya interpretasi birokrasi pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar terhadap hakikat pendidikan kesetaraan yang merupakan masalah struktural yang rumit. Masalah struktural yang jika terus dibiarkan terjadi, maka memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat Polewali Mandar, terutama dalam aspek kesadaran pendidikan.

Masalah struktural menyebabkan terciptanya masalah kultural. lemahnya upaya untuk mengatasi masalah struktural menyebabkan masalah kultural terus dibiarkan terjadi dan mengakar sehingga seolah-olah merupakan sebuah ketetapan yang bersifat kodrati. Dalam aspek pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar, siklus kebijakan berjalan monoton. Tidak ada kebijakan khusus untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga proses implementasi berjalan sesuai dengan kebiasaan yang keliru dan kontras terhadap payung hukum yang menaunginya.

Apa yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan fakta yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar dan di lima lembaga pendidikan nonformal yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Ke enam setting penelitian tersebut memiliki pandangan yang seragam mengenai hakikat pendidikan kesetaraan. Lemahnya interpretasi akan membentuk diskriminasi jalur pendidikan dan juga menciptakan kelas-kelas pendidikan dalam masyarakat. Implementasi kebijakan menjadi

korban dari lemahnya interpretasi tersebut. Implementasi mengalami disorientasi dari prinsip yang seharusnya melekat selama prosesnya.

Dalam konsep implementasi, *Anggara* (2014: 232) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Jika melihat kenyataan implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar yang cenderung keluar dari jalur atau prinsip yang telah ditetapkan oleh payung hukum yang menaunginya, maka hal tersebut sudah tidak relevan dengan definisi implementasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Payung Hukum yang menaungi pendidikan kesetaraan merumuskan tujuan dan sasaran secara umum mengenai pelaksanaan pendidikan kesetaraan secara nasional, sehingga jika keluar dari prinsip tersebut maka implementasi pendidikan kesetaraan dapat dikatakan gagal.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada bab 4 pasal 100 ayat 2 menyebutkan, salah-satu satuan pendidikan sebagai penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), kemudian dilanjutkan pada ayat 3, yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan nonformal salah-satunya adalah penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan juga

sangat menekankan pada implementasi yang berbasis masyarakat. Dalam hal ini, idealnya kebijakan pendidikan kesetaraan adalah kebijakan yang berorientasi pada masalah dengan implementasi yang idealnya harus bersifat sintesis, yaitu perpaduan antara model *top-down* dan *bottom up*. Dalam model sintesis, proses politik tidak berhenti pada saat kebijakan telah diputuskan oleh pemerintah pusat, tetapi proses tersebut akan tetap berlangsung pada level meso maupun mikro. Dengan kata lain, meskipun kebijakan pendidikan kesetaraan adalah kebijakan yang bersifat makro, namun keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh kreativitas pendidikan pada level meso (pemerintah daerah) dan mikro (lembaga pendidikan nonformal). Kreativitas pendidikan yang dimaksud adalah terkait mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat khusus untuk mendukung keberhasilan implementasi pendidikan kesetaraan.

Dalam konteks Polewali Mandar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Disdikpora dan di lima lembaga pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan, proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan belum menerapkan prinsip *bottom-up* sehingga prinsip sintesis belum terwujud. Proses politik terhenti di level daerah yang dibuktikan dengan tidak adanya kebijakan khusus mengenai pendidikan kesetaraan, sehingga proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan secara optimal.

Dalam teorinya, Van Meter dan Van Horn (dalam Satya Anggara, 2014:242), menyatakan bahwa ada enam komponen yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu : 1) Tujuan dan Standar Kebijakan, 2) Sumber Daya (material/nonmaterial), 3) Kualitas Hubungan Interorganisasional, 4) Karakteristik Lembaga/Organisasi Pelaksana, 5) Lingkungan Politik, Sosial dan Ekonomi, 6) Disposisi/tanggapan. Peneliti akan mencoba untuk menganalisis hasil penelitian di lembaga/oragnisasi/instansi yang dijadikan sebagai setting penelitian yaitu Disdikpora Bidang PLS Seksi Kesetaraan Kabupaten Polewali Mandar, PKBM AD, PKBM EM, PKBM BB, PKBM ADD, dan SKB PM dengan menggunakan 6 komponen penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

#### **a. Tujuan dan Standar Kebijakan**

Idealnya, keberadaan suatu kebijakan berangkat dari masalah yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah tersebut. Agar masalah dapat teratasi, suatu kebijakan wajib memiliki standar dan tujuan. Standar digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan, sedangkan tujuan adalah hasil yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. keberhasilan suatu kebijakan akan terwujud jika para agen pelaksana kebijakan dapat memahami dan menerapkan standar



kebijakan tersebut dalam proses implementasinya untuk mencapai tujuan kebijakan.

Pendidikan kesetaraan memiliki standar yang jelas. Standar pendidikan kesetaraan diatur di dalam peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat. Tujuan pendidikan kesetaraan pun sangatlah kompleks, salah satunya yaitu menguatkan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik terhadap penyelenggara dan lulusan pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pendidikan kesetaraan di PKBM AD belum berjalan dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut belum terwujud sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan, sejak tahun 2011 hingga saat ini proses belajar-mengajar pada program pendidikan kesetaraan ditiadakan. Dalam hal ini, dari tahun 2011 hingga sekarang, para peserta didik dalam program pendidikan kesetaraan di PKBM tersebut sama sekali tidak melalui proses pendidikan dan langsung mengikuti UNPK sesuai jadwal yang ditetapkan.

Tidak jauh beda dengan PKBM AD, namun tingkat masalah cenderung lebih ringan, implementasi pendidikan kesetaraan di PKBM BB juga belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan baik. Meskipun PKBM ini terdapat proses belajar-mengajar yang dilakukan selama 3 kali dalam seminggu, namun ada beberapa masalah teknis yang sangat mempengaruhi implementasi

kebijakan pendidikan kesetaraan di PKBM tersebut. PKBM BB mengabaikan aspek perbedaan individu, baik itu perbedaan kompetensi maupun perbedaan jenjang yang harus dilalui peserta didik. masalah tersebut lebih disebabkan oleh kondisi sosio kultural masyarakat terkait kesadaran pendidikan yang masih kurang.

Sama seperti dengan kondisi PKBM BB, meskipun ada proses belajar mengajar, namun ada beberapa proses implementasi yang tidak sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan, seperti bentuk pembelajaran yang seharusnya memiliki bobot tatap muka minimal 20 %, tutorial minimal 30 %, dan mandiri maksimal 50 %, namun dilakukan dengan bobot Tutorial 60% dan mandiri 40 %. Kemudian, siswa yang seharusnya berada pada semester 2 namun ketika mendaftar di PKBM ini harus kembali pada semester 1.

Masalah teknis terkait mengenai implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan pada ke tiga PKBM sebelumnya juga terjadi di PKBM EM. Meskipun sebagian besar proses implementasi dilaksanakan berdasarkan standar dan tujuan yang berlaku secara nasional, namun PKBM ini dengan alasan tertentu masih memberi kompromi kepada peserta didik untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan dengan bobot pertemuan yang tidak sesuai dengan standar proses yang berlaku.

Apa yang dialami oleh ke empat PKBM sebelumnya tidak dialami oleh SKB PM sebagai UPTD milik pemerintah. Implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di SKB PM sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Segalah bentuk penyimpangan pasti akan terkontrol dengan baik, sebab SKB adalah milik pemerintah dan dikelola oleh pemerintah sendiri.

Berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan nonformal sebelumnya, Disdikpora Polewali Mandar Bidang PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Seksi Keaksaraan, Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat Sebagai pengendali, pengontrol, dan pengawas implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan Kabupaten Polewali Mandar, belum menunjukkan kinerja yang optimal. Reposisi kepemimpinan, inkonsistensi kinerja, dan masalah interpretasi adalah masalah-masalah yang mengakibatkan lemahnya kontrol yang dilakukan oleh birokrasi pendidikan terhadap implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Tidak ada satupun kebijakan yang khusus dibuat untuk menguatkan tujuan dan standar kebijakan pendidikan kesetaraan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan komponen “Tujuan dan Standar Kebijakan” dari hasil penelitian di 5 lembaga pendidikan nonformal dan 1 institusi birokrasi kebijakan menunjukkan bahwa salah satu alasan mengapa

implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan secara optimal adalah terjadinya *missinterpretation* terhadap standar dan tujuan yang telah berlaku secara nasional, meskipun dalam hal ini SKB masih berada pada prosedur yang utuh namun masih belum bisa menutupi kekeliruan tersebut.

#### **b. Sumber Daya**

Sumber daya sangat terkait dengan dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi. Keseimbangan antara sumber daya yang bersifat material dengan sumber daya manusia sangat diperlukan dalam proses implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan.

PKBM AD hampir setiap tahun memperoleh bantuan berupa dana BOP, namun penyelenggaraan proses belajar mengajar pada program pendidikan kesetaraan ditiadakan sejak tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya berupa dana tidak dimanfaatkan dengan baik dan se efisien mungkin. Hal ini juga sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya manusia. Dengan ditiadakannya proses belajar-mengajar dalam pendidikan kesetaraan maka keberadaan sumber daya sangatlah sia-sia. Fasilitas berupa sumber daya material di PKBM ini juga masih belum lengkap untuk menunjang keberhasilan implementasi pendidikan kesetaraan.

Berbeda dengan masalah yang dialami PKBM AD, PKBM BB dalam hal sumber daya masih belum tercukupi dari aspek sumber daya material seperti ketersediaan gedung untuk proses belajar-mengajar, PKBM BB masih menumpang di lembaga pendidikan formal tertentu. Berbeda lagi dengan PKBM ADD yang ketersediaan sumber daya baik material maupun nonmaterial sudah hampir terpenuhi. Begitupun dengan PKBM EM yang justru memiliki kelengkapan media pembelajaran yang lengkap sehingga mata pelajaran keterampilan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana juga SKB sebagai UPTD yang segala sumber daya baik material dan nonmaterial juga sudah terpenuhi dengan baik.

Masalah berbeda dialami oleh Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar. Optimalisasi anggaran pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar masih belum optimal. Hal ini dikarenakan anggaran daerah untuk pendidikan belum mencapai standar minimum yaitu 20 %. Hal tersebut akan berdampak pada lemahnya kinerja birokrasi pendidikan terutama dalam fungsi kontrol dan pengawasan serta dalam hal pembuatan kebijakan khusus pendidikan kesetaraan. masalah tersebut juga didukung dengan lemahnya interpretasi mengenai hakikat pendidikan, meskipun secara kuantitas telah memenuhi quota jabatan yang ada.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komponen “sumber daya” adalah salah satu komponen penting

yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dari 5 lembaga pendidikan dan 1 institusi birokrasi pendidikan di Kabupaten Polewali mandar menunjukkan bahwa ketersediaan “sumber daya” baik materil maupun nonmaterial menjadi salah-satu masalah urgen yang mempengaruhi lemahnya proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.

**c. Kualitas Hubungan Interorganisasional**

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara kebijakan pendidikan kesetaraan dan juga sebagai ketua forum PKBM di Kabupaten Polewali Mandar, PKBM AD memiliki fungsi ganda. Di samping sebagai penyelenggara pendidikan nonformal juga bertugas untuk mempererat hubungan dan komunikasi di antara semua PKBM yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dan juga bertugas untuk menghimpun segala bentuk aspirasi-aspirasi dari semua PKBM lalu kemudian dijadikan sebagai bahan untuk memperoleh perhatian dari pemerintah daerah.

Posisi sebagai ketua forum PKBM se-Kabupaten Polewali Mandar cenderung tidak sesuai dengan kondisi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di PKBM AD. Hal tersebut membuktikan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan PKBM-PKBM termasuk PKBM AD tidak mengalami keterbukaan.

Hal ini juga berdampak terhadap pola komunikasi di beberapa PKBM-PKBM. PKBM BB misalnya, pelanggaran teknis yang terjadi dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di PKBM tersebut adalah akibat kurang berfungsinya forum PKBM sebagai wadah independen pengontrol dinamika pendidikan nonformal di Kabupaten Polewali mandar dan juga di sisi lain sebagai akibat dari lemahnya kontrol Disdikpora terhadap lembaga-lembaga yang dinaunginya.

Meskipun lemahnya fungsi forum PKBM dan kontrol pemerintah daerah yang mengakibatkan pola hubungan interorganisasional yang menyebabkan legalitas PKBM EM mengalami masalah, namun PKBM ini tetap berada pada jalur yang menunjukkan kualitasnya, meskipun secara teknis masih sedikit bermasalah.

Berbeda dengan PKBM ADD yang lebih diuntungkan karena berada pada naungan kekuasaan, karena memang notabane staf pengelola dari PKBM ini adalah pengurus partai yang juga diketuai oleh bapak Bupati, sehingga kualitas hubungan hieraki kelembagaan berjalan dengan baik. Sama halnya dengan SKB PM, selayaknya, sebagai UPTD, hubungan struktural pada lembaga yang lebih tinggi berjalan dengan baik, namun fungsi SKB sebagai lembaga percontohan dan juga sebagai mitra PKBM belum terwujud.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa memang terjadi pola hubungan yang tidak teratur secara struktural maupun secara kultural. Hal ini menjadi salah satu penyebab penting lemahnya proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.

#### **d. Karakteristik Lembaga**

Terkait mengenai implementasi pendidikan kesetaraan, karakteristik PKBM AD sebagai salah satu agen pelaksana pendidikan kesetaraan cenderung bersifat tertutup. Sebagai salah satu lembaga yang dianggap lebih kompeten, seharusnya PKBM ini dapat memberikan contoh yang baik terhadap PKBM-PKBM yang lain.

Berbeda dengan PKBM AD, sebagai salah satu PKBM termuda di Kabupaten Polewali Mandar, PKBM BB menunjukkan karakter yang mengarah kepada terciptanya dukungan dari masyarakat. PKBM ini mengandalkan kemitraan yang berbasis masyarakat untuk mensosialisasikan keberadaannya.

Berbeda dengan PKBM ADD yang keberadaannya sangat ideal. Kedekatan secara struktural maupun emosional dengan pihak legislatif maupun eksekutif menciptakan karakter yang menguntungkan keberadaan PKBM ini. Berbanding terbalik dengan PKBM EM yang diuntungkan dengan dukungan masyarakat secara penuh, karena PKBM ini menawarkan suatu hal



yang menarik berupa mata pelajaran keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Kemudian, di sisi lain, secara formalitas SKB PM menunjukkan karakter sesuai dengan prosedur strukturalnya, namun secara kultural terlihat karakter yang monoton jika dikembalikan pada fungsinya yang ideal.

Sedangkan, Disdikpora sebagai institusi birokrasi pendidikan menunjukkan karakteristiknya yang cenderung statis sebagai pengontrol kebijakan. Belum terwujudnya fungsi ideal yang seharusnya diterapkan dalam kerja real adalah bukti karakter Disdikpora dalam hal ini Bidang PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Seksi Keaksaraan, Kesenjangan, dan Pendidikan Masyarakat berada pada kondisi yang monoton.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa lemahnya dinamika implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali mandar sangat dipengaruhi oleh karakter-karakter lembaga/organisasi pelaksana kebijakan.

#### **e. Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi**

Lemahnya implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di PKBM AD adalah bukti bahwa sumber daya ekonomi menjadi salah satu masalah yang kongkrit. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di satu sisi masyarakat memngharapkan pendidikan yang gratis, di sisi lain masyarakat harus dihadapkan pada kondisi pendidikan yang

mempengaruhi keadaan ekonomi. Lemahnya implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di PKBM AD juga adalah bukti bahwa pemerintah belum menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pengatur jalannya kebijakan secara optimal. Masalah struktural semacam ini menciptakan masalah baru yang bersifat kultural yang ber efek kepada kondisi sosio kultural masyarakat.

Secara politis, PKBM BB masih belum dapat mengambil sikap politik terhadap proses implementasi pendidikan kesetaraan di lembaganya. Hal tersebut diakibatkan dengan mandegnya proses politik kebijakan ditingkat pemerintah daerah yang sama sekali belum memiliki kebijakan khusus yang seharusnya membantu lembaga-lembaga pendidikan nonformal untuk menyukseskan implementasi pendidikan kesetaraan di lembaganya masing-masing.

Kemudian dari aspek sosial, sikap pasrah terhadap kondisi sosio kulutral masyarakat terkait mengenai kesadaran pendidikan terutama mengenai pemahaman terhadap pendidikan kesetaraan juga terjadi di lembaga tersebut. Belum ada upaya untuk mengubah rendahnya kesadaran pendidikan masyarakat. PKBM BB masih mengikuti arus yang ada. Hal tersebut lebih disebabkan oleh masalah struktural yang terjadi dalam tubuh birokrasi pendidikan yang juga sangat berdampak besar terhadap munculnya masalah

kultural yang lebih rumit. Lalu dari aspek ekonomi, PKBM BB masih menerapkan sistem swadaya. Karena tidak adanya dana APBD yang khusus dialokasikan untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar sehingga masalah pembiayaan dibebankan pada sistem swadaya.

Jauh sedikit berbeda dengan dua PKBM Sebelumnya, dari aspek kondisi sosio kultural, Implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di PKBM EM agak sedikit diuntungkan. Adanya kelas keterampilan memberikan daya tarik tersendiri sehingga semangat belajar masyarakat meningkat. Keterampilan tata boga dan tata busana di PKBM ini secara ideal dapat mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Output yang diharapkan adalah terciptanya usaha ekonomi mikro masyarakat sekitar. Namun yang selalu menjadi suatu kendala adalah pemahaman masyarakat terhadap hakikat kebijakan pendidikan kesetaraan.hal ini yang sering menghambat implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di PKBM Efsah Mandiri.

Dari aspek lingkungan Politik, dibandingkan dengan ke tiga PKBM sebelumnya, PKBM ADD berada pada kondisi lingkungan politik yang mendukung, sehingga ketersediaan sumber daya ekonomi di lembaga ini cukup terpenuhi. Meskipun PKBM ini didukung oleh lingkungan ekonomi dan politik yang baik dan secara ideal tentu akan mempengaruhi keberhasilan implementasi

suatu kebijakan, namun satu hal yang menjadi kendala sehingga keuntungan tersebut belum mampu memberi pengaruh yang kuat yaitu masalah-masalah struktural yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan yang berimbas pada penyimpangan implementasi di beberapa lembaga pendidikan yang juga memiliki pengaruh besar terhadap munculnya masalah kultural yang lebih rumit.

Berbicara mengenai SKB PM, sumber daya ekonomi di SKB PM sudah sangat mencukupi. Sebagai milik pemerintah, bantuan dana rutin setiap tahunnya adalah suatu hal yang sangat wajib. Karena SKB PM terletak di Kecamatan Polewali, sehingga pengaruh implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan hanya terjadi di lingkungan sosial di mana SKB berada. Dampak yang seharusnya terjadi secara merata di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar belum terwujud. SKB PM yang seharusnya menjadi milik semua masyarakat Polewali Mandar, namun ternyata karena lemahnya kontrol, sosialisasi, dan fungsi kemitraan dengan PKBM-PKBM di Kabupaten Polewali Mandar sehingga hal tersebut belum terwujud.

Berbeda dengan masalah yang dialami lembaga-lembaga pendidikan nonformal di atas, Disdikpora Kabupaten Polewali mandar memiliki masalah sendiri seperti keberadaan kantor yang jauh dari pusat pemerintahan adalah salah satu kendala masyarakat umum untuk mengetahui keberadaan Disdikpora. Hal tersebut

berkaitan erat dengan lingkungan politik dan lingkungan sosial. Karena akses yang jauh, sehingga kinerja politik juga akan berjalan lamban meskipun tidak signifikan. Sebagai elit birokrasi, dukungan Disdikpora terhadap implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan belum terwujud secara optimal.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan politik, sosial, dan ekonomi sangat mempengaruhi kekurangan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Rumitnya kondisi lingkungan politik, sosial, dan budaya menciptakan masalah yang kompleks berupa masalah-masalah struktural maupun kultural dimana keduanya saling tarik-menarik.

**f. Disposisi/Tanggapan**

Dari aspek pengetahuan, pihak PKBM AD memahami dan mengerti hakikat dari kebijakan pendidikan kesetaraan, namun hal tersebut hanya berhenti sampai disitu saja, karena sikap pasrah dengan kondisi sosio kultural masyarakat dan lemahnya kontrol pemerintah sehingga sikap atau aksi nyata untuk mencapai keberhasilan pendidikan kesetaraan sama sekali belum terwujud.

Sedikit sama dengan PKBM AD, PKBM ADD dalam hal ini pihak pengelola lembaga memiliki pengetahuan yang dianggap mapan terkait mengenai hakikat pendidikan kesetaraan. Namun kepasrahan terhadap kondisi sosio-kultural dan kondisi-kondisi

yang tidak mendukung yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara konsep dengan realita.

Sama halnya dengan PKBM EM, PKBM EM memaknai hakikat pendidikan kesetaraan dengan melihat kondisi sosio-kultural masyarakat. Misalnya, PKBM EM berpendapat bahwa tujuan dari pendidikan kesetaraan adalah untuk merekrut orang-orang yang putus sekolah dan kurang mampu dalam ekonomi untuk dapat kembali bersekolah. Namun dengan kendala yang sama yaitu kondisi sosio-kultural masyarakat yang sangat sering menjadi batu penghalang bagi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di lembaga ini.

Berbeda dengan ke tiga PKBM sebelumnya, pihak PKBM BB masih lemah dalam memahami hakikat dari pendidikan kesetaraan. Di sisi lain, SKB sebagai satu-satunya lembaga pendidikan nonformal yang terakreditasi di Kabupaten Polewali Mandar juga mengalami kekeliruan dalam memaknai hakikat pendidikan kesetaraan. Padahal, fungsi SKB tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan nonformal melainkan juga sebagai lembaga percontohan dan kemitraan yang seharusnya selalu aktif dalam merangkul PKBM-PKBM sebagai mitranya.

Kendala umum yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar adalah lemahnya interpretasi para elit birokrasi

pendidikan dalam memaknai hakikat pendidikan kesetaraan. Pengetahuan merupakan hal yang paling fundamental yang harus terpenuhi dalam suatu proses pelaksanaan suatu kebijakan. Lemahnya pengetahuan akan mengakibatkan besarnya peluang untuk mengalami kegagalan dalam proses implementasi kebijakan. lemahnya Pemahaman terhadap hakikat /substansi suatu kebijakan sangat mempengaruhi sikap terhadap kebijakan tersebut dan juga sangat rentan dalam penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengetahuan terhadap suatu kebijakan sangat wajib dimiliki oleh para pelaksana kebijakan.

Dari penjelasan di atas, lemahnya implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar juga disebabkan oleh lemahnya interpretasi mengenai hakikat pendidikan kesetaraan, ada yang betul-betul memahami namun harus pasrah terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat.

## **2. Masalah-Masalah Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.**

Dalam penelitian ini, ada dua bentuk masalah yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu masalah struktural dan masalah kultural. Masalah struktural adalah masalah yang terkait mengenai teknis atau mekanisme-mekanisme bagaimana kebijakan itu dilaksanakan yang terjadi dalam tubuh birokrasi pendidikan dan

lembaga-lembaga pendidikan yang dinaunginya, sedangkan masalah struktural adalah masalah yang terkait dengan pola pikir dan kondisi sosio-kultural masyarakat.

a. Masalah Struktural

Ada beberapa masalah struktural yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

1) Seringnya Terjadi Reposisi Jabatan

Reposisi jabatan di dalam tubuh Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar sudah menjadi suatu tradisi struktural yang dianggap biasa. Namun yang menjadi kendala adalah masalah tersebut akan mempengaruhi tingkat konsistensi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut terbukti terjadi, pada seksi keaksaraan, kesetaraan, dan pendidikan masyarakat bidang PLS Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar, pemahaman terhadap standar, tujuan, dan hakikat pendidikan kesetaraan masih sangatlah sempit, sehingga menyebabkan fokus terhadap pelaksanaan kebijakan tidak berjalan optimal.

2) Pemahaman Mengenai Kebijakan Pendidikan Kesetaraan

Baik pihak birokrasi maupun beberapa lembaga-lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Polewali Mandar hampir memiliki pemahaman yang seragam mengenai hakikat



kebijakan pendidikan kesetaraan. Pemahaman mengenai hakikat kebijakan pendidikan kesetaraan adalah faktor fundamental yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan pada tataran teknis. Sempitnya pemahaman tersebut mengakibatkan dinamika pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar cenderung monoton.

### 3) Diskriminasi Jalur Pendidikan

Pemahaman birokrasi pendidikan terhadap pendidikan kesetaraan menimbulkan diskrimansi terhadap jalur pendidikan. Di Kabupaten Polewali Mandar, jalur pendidikan formal dianggap memiliki kedudukan yang tinggi dibanding jalur pendidikan nonformal. Padahal tidak ada satupun UU atau peraturan-peraturan yang menuliskan mengenai hierarki jalur pendidikan.

### 4) Lemahnya Standar Keberhasilan Kebijakan

Kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar dianggap telah berhasil oleh birokrasi pendidikan yang menaunginya, dengan indikator outputnya telah banyak menjadi orang-orang penting seperti bupati, anggota DPR dll. Padahal diketahui bahwa indikator umum dari keberhasilan pendidikan baik formal maupun nonformal adalah memiliki kecerdasan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sadar akan realita

sosialnya serta menentang keras terhadap kontradiksi-kontradiksi sosial yang ada di lingkungannya.

5) Evaluasi PKBM yang Kurang Optimal

Keberadaan PKBM-PKBM di Kabupaten Polewali Mandar diakui melalui Keputusan Kepala Dinas yang ditetapkan setiap tahun dan surat keputusan akan berakhir setiap akhir desember. Dengan kata lain, proses evaluasi harus dilaksanakan pada awal januari. Pada tahun 2014 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas terdapat 102 PKBM yang diakui, namun ada beberapa PKBM yang ikut melaksanakan program pendidikan kesetaraan namun tidak tercantum di dalam surat keputusan. Pada tahun 2015, evaluasi yang seharusnya dilakukan pada awal januari baru dilakukan pada bulan mei 2015.

6) Tidak Ada Kebijakan Khusus dari Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan.

Dalam konsep implementasi model *sintesis*, kebijakan pendidikan yang bersifat makro (top-down) harus didukung oleh kebijakan yang bersifat meso/mikro (instansi-instansi yang berada pada naungan pemerintah pusat) demi tercapainya keberhasilan implementasi suatu kebijakan agar tercapainya partisipasi pendidikan yang berkualitas (Bottom-Up). Di Kabupaten Polewali Mandar, tidak ada satupun kebijakan yang

husus untuk mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan kesetaraan.

7) Implementasi kebijakan yang belum optimal

Dalam UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 1 Ayat 3 menyatakan “pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”. Di beberapa lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Polewali Mandar mengabaikan prinsip terstruktur dan berjenjang tersebut. Bahkan ada lembaga pendidikan yang langsung mengikuti peserta didiknya UNPK tanpa mengikuti proses pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.

8) Keterbatasan/Sumber Dana

Keterbatasan atau sumber dana adalah masalah umum yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Secara, PKBM adalah lembaga swadaya dan Kebijakan Pendidikan Kesetaraan tidak memiliki kebijakan khusus sehingga tidak ada dana APBD yang dialokasikan khusus untuk kebijakan tersebut. PKBM-PKBM hanya mengharapkan dana BOP dan donasi kemitraan. Tidak semua PKBM dapat mendapatkan dana BOP dalam waktu yang bersamaan. Mereka harus berkompetisi melalui proposal untuk mendapatkannya. Dengan jumlah

PKBM yang sangat banyak, tentunya dana BOP tidak akan mampu memfasilitasi semuanya.

b. Masalah Kultural

Ada beberapa masalah struktural yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan Tidaklah Penting

Bagi sebagian masyarakat Kabupaten Polewali Mandar menganggap bahwa pendidikan tidaklah penting. Yang terpenting adalah bagaimana cara dapat mendapatkan uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tingginya angka putus sekolah salah satunya disebabkan oleh masalah kesadaran pendidikan yang sempit.

2) Pendidikan Itu Mahal

Nampaknya kebijakan pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah tidak begitu berpengaruh terhadap kondisi psikis sebagian masyarakat Polewali Mandar terkait mengenai kesadaran pentingnya pendidikan. Faktor ekonomi memang menjadi faktor kuat terhadap tingginya angka putus sekolah.

3) Pendidikan Kesetaraan Adalah Pendidikan yang Rendahan

Ketidaktahuan masyarakat terhadap hakikat pendidikan kesetaraan menciptakan persepsi negatif masyarakat terhadap

pendidikan kesetaraan. sebagian masyarakat Polewali Mandar menganggap bahwa pendidikan kesetaraan adalah pendidikan rendahan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat merasa gengsi atau minder untuk bersekolah pendidikan kesetaraan. meskipun ada yang mendaftar, kebanyakan orientasinya adalah keperluan ijazah. Masalah tersebut juga merupakan akibat dari masalah struktural berupa kurangnya sosialisasi atau penyedaraan masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan. Padahal, lulusan pendidikan kesetaraan memiliki hak egilibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal.

#### 4) Kondisi Psikis Orang Tua

Meskipun peserta didik memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikan, namun segala keputusan berada di tangan orang tua. Di Kabupaten Polewali Mandar, kebanyakan orang tua memiliki kesadaran pendidikan yang sempit. Mereka lebih memilih anaknya untuk bekerja dibanding duduk di bangku sekolah. Fungsi keluarga sebagai agen pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat rendah.

#### 5) Kepasrahan Pengelola PKBM terhadap Realita Sosio-Kultural Masyarakat

Salah-satu alasan kuat mengapa banyak terjadi kesenjangan implementasi pendidikan kesetaraan di beberapa PKBM yang ada di Kabupaten Polewali Mandar adalah

kepasrahan terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat. Meskipun pihak pengelola PKBM memahami betul hakikat, tujuan, dan standar kebijakan pendidikan kesetaraan, namun rumitnya kondisi masyarakat sehingga idealisme pendidikan kesetaraan sangat sulit untuk terwujud dalam aksi nyata.

Dari hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar dan masalah-masalah yang mempengaruhi implementasi tersebut, maka dapat disimpulkan melalui tabel sebagai berikut :

No	PENDEKATAN	MASALAH STRUKTURAL	MASALAH KULTURAL
1.	Tujuan dan Standar Kebijakan	Lemahnya standar kebijakan	Kepasrahan pengelola PKBM terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat
2.	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan dana.</li> <li>- Keterbatasan SDM.</li> </ul>	Pendidikan itu mahal
3.	Kualitas Hubungan Interorganisasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran forum komunikasi PKBM se-Polewali Mandar</li> <li>- Fungsi kemitraan SKB yang belum terwujud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuatnya persaingan antar lembaga.</li> <li>- Lemahnya semangat persatuan.</li> </ul>
4.	Karakteristik Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskriminasi jalur pendidikan.</li> <li>- Evaluasi PKBM yang kurang optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan yang rendah</li> <li>- Kepasrahan pengelola PKBM</li> </ul>

		- Tidak ada kebijakan messo.	
5.	Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan sumber dana.</li> <li>- Dinamika politik yang tidak memihak</li> <li>- Pemerataan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan itu mahal.</li> <li>- Pendidikan tidaklah penting.</li> <li>- Kondisi psikis orang tua peserta didik.</li> <li>- Kondisi sosio-kultural masyarakat.</li> </ul>
6.	Disposisi/Tanggapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman mengenai kebijakan pendidikan kesetaraan</li> <li>- Diskriminasi jalur pendidikan.</li> <li>- Lemahnya standar dan evaluasi kebijakan</li> </ul>	Anggapan masyarakat bahwa pendidikan tidaklah penting, pendidikan itu mahal, dan pendidikan kesetaraan adalah pendidikan yang rendahan

**Tabel 1-3, Pendekatan dan Masalah-Masalah dalam Implementasi**

### **3. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Masalah-Masalah dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar**

Menurut *Thomas R Dye* (dalam Riant Nugroho, 2008), Kebijakan Publik adalah *Whatever Government Chooses to do or not to do* (apapun yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah). Dalam konteks implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar, pemerintah daerah telah menyusun suatu konsep kebijakan pendidikan yang menjadi landasan kemajuan kualitas pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar.

Pada tanggal 7 Januari 2014 bertepatan dengan acara pelantikan Bupati baru periode 2014-2019, pemerintah telah menetapkan sebuah konsep kebijakan pendidikan dengan spirit “Gerakan Membangun Polewali Mandar dari Desa”. Salah satu misi dari program tersebut adalah “mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dalam pemenuhan hak-hak dasar dan kesejahteraan masyarakat”. Salah-satu hak mendasar yang dimaksud adalah “hak dalam mendapatkan pendidikan” yang bertujuan untuk “meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan”. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
2. Meningkatnya angka partisipasi sekolah
3. Berkurangnya angka buta huruf
4. Meningkatnya mutu tenaga pendidik
5. Meningkatnya layanan pendidikan formal
6. Meningkatnya pembinaan terhadap kelompok pemuda
7. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah

Dari ke 7 sasaran pendidikan Kabupaten Polewali Mandar di atas, ada satu hal yang masih keliru yaitu tidak menetapkan pendidikan nonformal sebagai variabel sasaran pendidikan. Dalam hal ini pendidikan kesetaraan tidak dijadikan sebagai fokus utama dalam membangun pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Polewali Mandar.



Dari misi tersebut kemudian dijabarkan lagi kedalam suatu kebijakan yang dinamakan “Desa Cerdas Mandiri, Sehat dan terpadu”. Di dalam kebijakan tersebut terdapat 3 point yang dijadikan sebagai 3 pilar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Polewali Mandar yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan Daya beli Masyarakat.

Pada pilar pertama yaitu pendidikan, pemerintah menetapkan program “Desa Cerdas Mandiri” yang terbagi menjadi 3 pilar yaitu : 1) Penuntasan buta aksara di daerah tertinggal, 2) Pemerataan akses pendidikan dasar, 3) Pemerataan guru dan tenaga pendidik, 4) Penyetaraan pendidikan dasar, dan 5) Revitalisasi PAUD, PKBM dan TBM.

Dengan melihat tujuan dari misi pendidikan Kabupaten Polewali Mandar yang tidak menetapkan pendidikan nonformal sebagai salah satu fokus kebijakan, jelas ini bertentangan dengan pilar 5 yang menekankan Revitalisasi PKBM. Perlu diketahui bahwa suatu program seharusnya memiliki landasan atau arah kebijakan yang jelas.

Selama 1 tahun lebih konsep kebijakan itu berjalan (padahal konsep kebijakan tersebut masuk ke dalam program 100 hari pemerintah), dalam konteks pendidikan nonformal dalam hal ini pendidikan kesetaraan, belum ada satupun kebijakan khusus yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait untuk memajukan kualitas pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun yang dilakukan hanyalah sebatas program-program wajib seperti

pelaksanaan Diklat, Pelatihan, Seminar dan lain-lain yang pada dasarnya tidak begitu memberikan dampak yang signifikan.

Konsep kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya sangatlah bagus, namun yang menjadi kendala adalah mandegnya tindak lanjut dari konsep kebijakan tersebut terutama dalam aspek pendidikan nonformal lebih spesifik pada kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Mandegnya kelanjutan dari konsep kebijakan tersebut berpengaruh besar terhadap dinamika pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Ini dibuktikan dengan munculnya masalah-masalah yang rumit baik itu masalah yang sifatnya struktural maupun yang bersifat kultural.

Mandegnya kelanjutan konsep kebijakan pendidikan tersebut yang berpengaruh terhadap dinamika pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar sangat jelas dirasakan dalam dinamika implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di beberapa PKBM yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

Dari ke 5 PKBM yang dijadikan sebagai setting penelitian, dinamika implementasi pendidikan kesetaraan di ke 5 PKBM tersebut masih cenderung monoton dan masih mengikuti arus yang ada. Belum adanya kebijakan khusus yang sifatnya mikro. Beberapa PKBM hanya menerapkan kelas keterampilan sebagai kebijakan yang menjadi karakter khusus di PKBM tersebut. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya fungsi birokrasi pemerintah sebagai pengontrol kebijakan

dan juga belum adanya kebijakan khusus yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.

Jika dilihat dari konsep kebijakan publik menurut *Thomas R Dye* yaitu “*Choose to do or not to do*”, sangat jelas pemerintah telah melakukan sesuatu namun masih dalam tataran konsep. Setelah itu mandegnya terhadap kelanjutan konsep kebijakan tersebut adalah bukti bahwa pemerintah tidak melakukan sesuatu yang berkelanjutan. Sehingga apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar maupun instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang berada pada naungannya terkait mengenai implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar adalah wajah dinamika kebijakan di daerah tersebut.

#### **D. Temuan Penelitian**

Dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka dapat dijabarkan temuan-temuan yang objektif terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Objektivitas tersebut dikelompokkan berdasarkan padatnya rumusan masalah penelitian, yaitu 1) Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar, 2) Apa saja permasalahan-permasalahan dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar, dan 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam

implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar mengalami masalah yang kompleks. Amanah yang tertuang dalam peraturan-peraturan atau payung hukum seperti permendiknas atau peraturan pemerintah yang menaungi kebijakan pendidikan kesetaraan sebagai rujukan nasional belum berjalan secara optimal.

Salah satu masalah umum yang sifatnya struktural terkait alur implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar adalah tidak adanya kebijakan mесо berupa perda (Peraturan Daerah) maupun program-program jangka panjang yang menjembatani kebijakan pendidikan kesetaraan sebagai kebijakan nasional. Dalam aspek pendidikan kesetaraan, sehingga realisasi desentralisasi pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar belum terwujud.

Alur kebijakan pendidikan kesetaraan yang hanya terhenti pada level mесо juga memberikan dampak signifikan terhadap dinamika implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan pada level mikro. Lembaga-lembaga pendidikan nonformal dalam hal ini PKBM (Pusat Kegiatan Belajar masyarakat) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) di Kabupaten Polewali Mandar terkena imbasnya akibat dari disorientasi kebijakan tersebut.

Pada PKBM AD misalnya, implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di lembaga ini tidak berdasarkan prinsip, prosedur atau mekanisme yang tertuang dalam standar nasional. Sejak tahun 2011, PKBM ini tetap membuka program pendidikan kesetaraan namun tanpa proses belajar-mengajar. Para peserta didik langsung dapat mengikuti UNPK (Ujian Nasional Program Kesetaraan) sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dengan syarat harus melunasi biaya administrasi yang telah ditetapkan. Hal yang berbeda terjadi pada PKBM BB, masalah implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di PKBM ini terletak pada prosedur dalam proses belajar-mengajar, dimana PKBM ini mengabaikan prinsip perbedaan individu, baik itu perbedaan kompetensi maupun perbedaan jenjang yang harus dilalui peserta didik. Di PKBM ini, dalam satu kelas beberapa peserta didik memiliki jenjang yang sama padahal seharusnya berada pada tingkat kelas yang berbeda.

Di antara ke dua PKBM yang telah dijelaskan sebelumnya, PKBM EM cenderung menaati prosedur yang berlaku seperti, jelasnya jumlah peserta didik dan terjadinya proses belajar-mengajar secara rutin. Namun masalah teknis terkait implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di lembaga ini masih terjadi. Di lembaga ini, pihak pengelola masih kompromi atau menerima peserta didik program kesetaraan tanpa melalui proses belajar-mengajar dengan beberapa syarat tertentu. Berbeda dengan PKBM ADD yang keberadaannya cenderung diuntungkan karena berada pada pusingan kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar

pengelola inti dari lembaga ini adalah kader partai pengusung Bupati Polewali Mandar saat ini yang juga sebagai ketua tingkat II partai tersebut. Secara politis, PKBM ini sangat diuntungkan, namun dalam aspek kebijakan pendidikan kesetaraan, permasalahan yang dialami tidak jauh beda dengan tiga PKBM sebelumnya. Penyimpangan yang terjadi berada pada aspek teknis proses belajar-mengajar yaitu dimana PKBM ini menerapkan kegiatan belajar-mengajar dalam bentuk tutorial 60 % dan mandiri 40 %, sedangkan yang tertuang dalam Permendiknas No. 03 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan seharusnya kegiatan belajar-mengajar dilakukan dalam bentuk tatap muka minimal 20 %, Tutorial minimal 30 %, dan Tutorial Minimal 50 %.

Berbeda dengan lembaga PKBM, salah-satu masalah fundamental yang dimiliki oleh SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) terkait keberadaannya sebagai lembaga pendidikan nonformal adalah dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (formal, nonformal, dan informal) pada bab IV tentang “penyelenggaraan pendidikan nonformal” pasal 100 ayat 2 sama sekali tidak mencantumkan nama SKB sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan nonformal. Di Kabupaten Polewali Mandar, masalah fundamental tersebut terabaikan karena ketidaktahuan, sehingga keberadaan SKB tidak mengalami masalah yang serius terutama dalam proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan. sebagai UPTD, SKB PM Terpenuhi segala kebutuhannya. Masalah-masalah yang

dialami ke empat PKBM sebelumnya tidak dialami oleh SKB PM. Namun, ternyata SKB PM mengabaikan fungsi gandanya yang tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan nonformal tetapi juga sebagai lembaga percontohan dan wajib menjadi mitra PKBM yang solid. Hal ini terbukti, bahwa keberadaan SKB dan segala bentuk fungsinya sangat kurang diketahui oleh para pengelola-pengelola PKBM di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini adalah bukti bahwa kualitas hubungan interorganisasial antar lembaga tidak berjalan dengan lancar.

Masalah Hubungan interorganisasional tidak hanya dialami pada level lembaga pendidikan. Hal tersebut juga terjadi pada level intitusi birokrasi pendidikan terkait hubungannya dengan lembaga-lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar Bidang PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Seksi Keaksaraan, Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat. Permasalahan tersebut terletak pada lemahnya pemahaman birokrasi terhadap fungsinya terkait penyelenggaraan pendidikan kesetaraandi Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2014, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar ber nomor 410.42/003.b/Disdikpora terdapat 102 PKBM yang dianggap legal sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di Kabupaten Polewali Mandar. Namun, terdapat 4 PKBM yang tidak tercantum di dalam surat keputusan tersebut termasuk PKBM EM, padahal ke 4 PKBM tersebut tercantum pada dokumen yang berisi 36 PKBM penyelenggara pendidikan

kesetaraan paket B pada tahun ajaran 2014/2015. Masalah lainnya juga terletak pada lemahnya fungsi evaluasi. Surat keputusan kepala dinas ber nomor 410.42/003.b/ yang seharusnya tidak berlaku sejak per tanggal 1 januari 2015, tetapi masih dipakai sebagai rujukan sampai ketika proses evaluasi PKBM baru dilakukan pada pertengahan mei 2015.

Objektivitas-objektivitas yang telah dijelaskan sebelumnya terkait kondisi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar adalah konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkan oleh masalah-masalah yang kompleks. Masalah-masalah terkait implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar di bagi menjadi dua bentuk yaitu *masalah struktural* dan *masalah kultural*, dimana ke dua masalah tersebut saling terkait satu sama lain.

Masalah implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan yang terjadi pada PKBM AD, PKBM BB, PKBM ADD, dan PKBM EM diakibatkan oleh ke dua bentuk masalah tersebut seperti pada aspek kultural yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hakikat pendidikan kesetaraan yang mengakibatkan masyarakat menganggap bahwa pendidikan kesetaraan adalah pendidikan rendah. Hal ini juga berkaitan erat dengan kondisi psikis orang tua dalam hal kondisi ekonomi yang menganggap bahwa pendidikan itu mahal. Rendahnya kesadaran pendidikan masyarakat menimbulkan sikap pasrah para pengelola-pengelola PKBM, sehingga mereka sangat rentan melakukan



penyimpangan-penyimpangan terhadap implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut juga merupakan imbas dari masalah struktural seperti belum adanya kebijakan khusus yang menaungi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut menjadi semakin rumit karena tidak adanya dana APBD yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga dari 102 PKBM yang tersebar di Kabupaten Polewali Mandar harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan lembaganya. Banyaknya jumlah PKBM yang tersebar di semua kecamatan juga merupakan masalah penting yang ditimbulkan inkonsistensi Disdikpora Bidang PLS Seksi Keaksaraan, Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat pada aspek evaluasi. Terjadinya kontradiksi antara surat keputusan dan daftar penyelenggara pendidikan kesetaraan adalah bukti lemahnya fungsi evaluasi tersebut.

Pada aspek yang paling fundamental, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa, masalah kultural dan masalah struktural adalah dua bentuk masalah yang saling berkaitan. Lemahnya fungsi evaluasi dan tidak adanya kebijakan mendo yang menjembatani kebijakan pendidikan kesetaraan sebagai kebijakan nasional adalah dampak dari lemahnya kualitas SDM yang berada pada lingkup birokrasi pendidikan. Interpretasi yang lemah terhadap hakikat pendidikan kesetaraan yang menyebabkan lemahnya pemahaman terhadap standar keberhasilan juga menyebabkan terjadinya diskriminasi secara politik terhadap keberadaan pendidikan

kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar. SKB pada fungsinya sebagai lembaga kemitraan dan lembaga percontohan juga belum terwujud dalam masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian ini telah tercantum pada program 100 hari kepemimpinan Bupati pada awal kepemimpinannya sejak Januari tahun 2014 lalu melalui program “Desa Cerdas Mandiri”. Satu dari 5 pilar dari kesuksesan program desa cerdas mandiri adalah “revitalisasi PKBM”, namun hingga saat ini revitalisasi tersebut belum terwujud. Dalam hal ini, berdasarkan temuan penelitian, program desa cerdas mandiri pada aspek pendidikan kesetaraan masih belum terwujud, dan selebihnya tidak ada lagi satupun kebijakan mendo yang mendukung pelaksanaan maupun upaya dalam mengatasi masalah implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Proses penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan maupun kekurangan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan Juni 2015. Pada masa itu, proses implementasi pendidikan kesetaraan telah memasuki akhir masa tahun ajaran 2014/2015 sehingga tidak ada lagi proses belajar-mengajar pada tenggang waktu tersebut. Hal tersebut sangat menyulitkan peneliti untuk memahami lebih dalam dinamika implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga-lembaga pendidikan

yang dijadikan sebagai setting penelitian. Dalam hal ini, peneliti hanya memanfaatkan wawancara mendalam, observasi rutin, dan analisis data sekunder untuk menguatkan data penelitian.

2. Beberapa subjek penelitian cenderung tertutup dan berusaha sebaik mungkin untuk menutupi kekurangan-kekurangan mengenai implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di lembaganya masing-masing. Ada beberapa pengelola dalam satu PKBM yang memiliki pernyataan yang sangat berbeda.
3. Keterbatasan data sekunder adalah salah satu hambatan dalam penelitian ini. Pihak birokrasi pendidikan dalam hal ini Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar tidak menyediakan data lengkap mengenai dinamika implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar di beberapa tahun terakhir. Data sekunder yang diperoleh terbilang seadanya. Hal ini menyebabkan peneliti lebih dominan memanfaatkan wawancara untuk pengumpulan data.
4. Letak Disdikpora yang jauh dari pusat pemerintahan dan tidak adanya penunjuk arah adalah salah satu hambatan dalam penelitian ini. Kemudian tidak adanya website sebagai wadah pelayanan informasi pendidikan untuk publik adalah keterbatasan yang ada penelitian ini untuk mengumpulkan data yang terkait mengenai kebijakan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan serta temuan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar bersifat *Top-Down* dan mengabaikan prinsip *Sintesis* yaitu perpaduan antara *Top-Down* dan *Bottom-Up*. Tidak adanya kebijakan pada level meso/daerah terkait pendidikan kesetaraan adalah bukti interpretasi lemahnya interpretasi kebijakan pendidikan kesetaraan pada level meso. Hasil yang lebih tajam melalui pisau analisis dengan menggunakan enam komponen implementasi yaitu: a. Tujuan dan Standar Kebijakan, b. Sumber Daya, c. Kualitas Hubungan Interorganisasional, d. Karakteristik Lembaga/organisasi, e. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, f. Disposisi/Tanggapan) pada model pendekatan implementasi *Van Meter* dan *Van Horn* terhadap dinamika implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di lima lembaga pendidikan nonformal dan 1 institusi birokrasi pendidikan yang telah diteliti menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal

2. Masalah-masalah dalam implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar dibagi menjadi dua bentuk yaitu *Masalah Struktural* dan *Masalah Kultural*.

a) *Masalah Struktural* adalah masalah yang terkait mengenai teknis atau mekanisme-mekanisme struktural atau prosedural bagaimana kebijakan itu dilaksanakan yang terjadi dalam tubuh birokrasi pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan yang dinaunginya. Masalah-masalah tersebut dihipotiskan sebagai berikut : 1) Seringnya terjadi reposisi jabatan, 2) Pemahaman mengenai hakikat pendidikan kesetaraan, 3) Diskriminasi jalur pendidikan, 4) Lemahnya standar keberhasilan kebijakan, 5) Evaluasi kebijakan yang tidak optimal, 6) Tidak adanya kebijakan khusus, 7) Implementasi kebijakan belum berjalan optimal, dan 8) Keterbatasan/sumber dana.

b) *Masalah Kultural* adalah masalah-masalah yang terkait dengan pola pikir dan kondisi sosio-kultural masyarakat. Masalah-masalah tersebut dihipotiskan sebagai berikut : 1) Pendidikan tidaklah penting, 2) Pendidikan itu mahal, 3) Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan yang rendah, 4) Kondisi psikis orang tua, dan 5) Ketersediaan pengelola lembaga pendidikan nonformal.

3. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut tertuang dalam visi dan misi pendidikan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dimanifestasikan dalam bentuk

kebijakan yang diadopsi dari kebijakan nasional yaitu program “Desa Cerdas Mandiri”. Namun, sampai saat ini implementasi kebijakan tersebut masih belum berjalan secara optimal pada aspek implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di kabupaten Polewali Mandar. Lemahnya interpretasi terhadap kebijakan tersebut menyebabkan tidak adanya kebijakan pendidikan (meso) yang sifatnya khusus untuk menjembatani kebijakan pendidikan kesetaraan sebagai kebijakan nasional

## **B. Saran dan Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan temuan dalam penelitian, serta kesimpulan, maka dapat dibuat saran dan rekomendasi kebijakan sebagai berikut :

### **1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar**

Agar kebijakan pendidikan kesetaraan sebagai kebijakan nasional dapat terimplementasi dengan baik pada tingkat daerah, sehingga perlunya dibuat satu Perda (Peraturan Daerah) yang khusus menaungi kebijakan pendidikan kesetaraan di kabupaten Polewali Mandar. Adanya Perda pendidikan kesetaraan akan menjelaskan konsistensi pos-pos anggaran untuk alokasi implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali mandar (melalui dana APBD), menguatkan proses implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan dalam aspek hukum, Juga memperjelas kedudukan kebijakan sebagai salah-satu kebijakan primer yang menjadi fokus

peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Polewali Mandar, serta meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada tingkat birokrasi dan lembaga-lembaga pendidikan nonformal sebagai institusi mikro.

## 2. Bagi Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar

Demi terciptanya kultur birokrasi yang berintegritas baik secara moralitas maupun kualitas, maka perlunya merealisasikan “reformasi birokrasi”. Reformasi birokrasi dalam kaitannya dengan kebijakan pendidikan kesetaraan adalah :

- a. Objektivitas penempatan tenaga birokrat yang harus sesuai dengan disiplin keilmuan-nya.
- b. Reposisi jabatan tidak perlu dilakukan dalam jangka waktu pendek agar konsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan tidak terganggu (kecuali memang harus dilakukan).
- c. Arsip mengenai data-data pelaksanaan kebijakan pendidikan kesetaraan harus tersedia lengkap dan tertata dengan baik (keberadaan arsip sangat menentukan integritas birokrat).
- d. Membatasi jumlah PKBM dan dipetakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di daerah tertentu yang sesuai dengan standar pendirian PKBM.
- e. Proses monitoring dan evaluasi harus digalakkan (lemahnya monitoring dan evaluasi sangat berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan).

- f. Adanya program yang kontinuitas yang sifatnya jangka panjang dan berdampak signifikan terhadap terciptanya kualitas.
- g. Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar harus memahami bahwa rendahnya kualitas pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar adalah salah-satu indikator yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) daerah Kabupaten Polewali Mandar.

### 3. Bagi SKB dan PKBM

SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) harus menjadi mitra yang solid. Kemitraan yang solid menjadi indikator penting terhadap terwujudnya kultur pendidikan yang berkualitas.

Bagi SKB PM :

- a. SKB PM sebagai lembaga percontohan bagi lembaga-lembaga pendidikan non-formal di Kabupaten Polewali Mandar harus benar-benar melaksanakan fungsinya yang ideal.
- b. SKB harus menyadari bahwa kedudukan SKB sama dengan kedudukan PKBM. Ke dua bentuk lembaga pendidikan nonformal tersebut tidak membentuk hierarki.
- c. Staf-staf SKB harus memahami hakikat pendidikan kesetaraan itu seperti apa agar proses implementasi berjalan harmoni antara ideal dan realitanya.



Bagi PKBM :

- a. Forum PKBM-PKBM se Kabupaten Polewali Mandar sebagai wadah independen yang menjadi perekat hubungan di antara setiap PKBM harus difungsikan sesuai dengan prinsip moralitas (Forum PKBM bukanlah wadah politis).
- b. Forum PKBM se Kabupaten Polewali Mandar dijadikan sebagai wadah penyaring aspirasi bagi himpunan PKBM-PKBM terhadap pemerintah.
- c. Memprioritaskan pembuatan program berbasis riset.
- d. PKBM harus memahami hakikat pendidikan kesetaraan yang tertuang dalam payung hukum yang menaunginya dan mengimplementasikannya sesuai hakikatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Anggara, Sahya, 2014, *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Freire, Paulo, 2011, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: LP3ES.
- Jalaluddin, H , dan H. Abdullah Idi, 2011, *Filsafat Pendidikan (Manusia, Filsafat dan Manusia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nugroho, Riant, 2008, *Kebijakan Pendidikan yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H.A.R, dan Riant Nugroho, 2009, *Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Unesco, 2012, *Asia-Pacific Regional Guide to Equivalency Programmes*.
- Unesco and Unicef, 2011, *Equivalency Programmes and Alternative Certified Learning "Achieving Education for All and Promoting Life Long Learning"*.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
- UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Moleong, Lexy J, 2014, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda.
- Permendiknas No. 37 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.
- Permendiknas No. 33 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dan kebudayaan No. 37 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No. 03 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No.10 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Sugiono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, bandung: Alfabeta.

#### SUMBER\_SUMBER LAIN

<http://www.kamusbesar.com/4922/kebijakan> diakses pada hari rabu 4 Februari 2015.

<http://polewalimandarkab.bps.go.id/> diakses pada hari senin 5 Januari 2015.

<http://sulbar.bps.go.id/> diakses pada hari senin 5 Januari 2015.

[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_165338.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_165338.pdf) diakses pada hari senin 5 Januari 2015.

[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_SEKOLAH/197608142006042-VIENA\\_RUSMIATI\\_HASANAH/bahan\\_materi\\_kesetaraan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/197608142006042-VIENA_RUSMIATI_HASANAH/bahan_materi_kesetaraan.pdf) diakses pada hari senin 5 Januari 2015.

[http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adpu4410/materi1\\_2.htm](http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adpu4410/materi1_2.htm) diakses pada hari senin 5 Januari 2015.

<ftp://ftp.unm.ac.id/permendiknas-2006/Nomor%2023%20Tahun%202006.pdf> diakses pada hari senin 5 Januari 2015.

<http://imadiklus.com/pengertian-program-pendidikan-kesetaraan/> diakses pada hari jumat 23 Januari 2015.

# LAMPIRAN

## **Lampiran 1 : Catatan Lapangan CATATAN LAPANGAN**

### **21 April 2015**

Bertolak ke Kabupaten Mamuju untuk mengurus surat ijin penelitian di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

### **04 Mei 2015**

Sekitar jam 09.00 peneliti memulai penelitian dengan mengunjungi PKBM AD di Kecamatan Mapilli. Peneliti bertemu dengan pengelola PKBM yaitu ibu JR yang berprofesi sebagai guru sekaligus bendahara lembaga tersebut. selepas dari PKBM AD, sekitar pukul 10.30, peneliti langsung bertolak ke Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan observasi, permintaan data sekunder, dan wawancara dengan ibu FT selaku kepala seksi keaksaraan, kesetaraan, dan pendidikan masyarakat.

### **08 Mei 2015**

Sekitar jam 09.00, peneliti menuju ke SKB Polewali Mnadar untuk melakukan observasi dan wawancara dengan ibu MA selaku ketua SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Polewali Mandar.

### **10 Mei 2015**

Sekitar pukul 20.00, peneliti melakukan wawancara dengan bapak IS selaku ketua PKBM BB di Kecamatan Wonomulyo yang juga merangkap sebagai guru pendidikan kesetaraan di lembaganya sendiri.

**15 Mei 2015**

Mengunjungi kantor DPC partai Golkar Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan wawancara dengan bapak SB selaku sekretaris pengelola PKBM ADD Kecamatan Matakali yang juga merangkap sebagai tutor di lembaganya.

**20 Mei 2015**

Karena data yang belum memadai, peneliti kembali berkunjung ke Disdikpora Polewali Mandar, menemui ibu FT selaku kepala seksi keakasraan, kesetaraan, dan pendidikan masyarakat untuk meminta keterangan mengenai legalitas PKBM di kabupaten Polewali Mandar. Sekitar pukul 15.00, setelah dari Disdikpora, peneliti kemudian berkunjung ke PKBM EM di Kecamatan Campalagian dan bertemu dengan ibu SF selaku ketua pengelola PKBM tersebut. Proses wawancara dilaksanakan sekitar pukul 16.00.

**22 Mei 2015**

Mengurus kelengkapan perijinan penelitian di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

**Lampiran 2 : Pedoman Wawancara**

**Pedoman Wawancara Kepala Seksi Keaksaraan, Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat**

Hari / tanggal :

Waktu :

Tempat :

Narasumber :

Jabatan :

1. Menurut anda, apa hakikat dan tujuan mendasar pendidikan kesetaraan ?
2. Apakah implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh payung hukum yang menaunginya ?
3. Apakah implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan sudah dikatakan berhasil di kabupaten polewali mandar ? jika iya, indikatornya apa ? jika belum indikatornya apa ?
4. Apakah jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan formal (dalam konteks pendidikan kesetaraan) memiliki kedudukan yang sama ? jika iya, dasarnya apa ? jika tidak, dasarnya apa ?
5. “lulusan sekolah pendidikan kesetaraan memiliki hak egilibilitas yang sama dan setara dengan lulusan sekolah formal”. Menurut anda, apa maksud dari pernyataan tersebut ?
6. Apa saja faktor penghambat implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar ?
7. Apa saja faktor pendukung implementasi pendidikan kesetaraan di kabupaten Polewali Mandar ?
8. Seperti apa bentuk kewenangan Seksi keaksaraan, kesetaraan dan masyarakat dalam menaungi PKBM dan SKB selaku lembaga pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar ?
9. Apa yang membedakan dari ke 2 lembaga pendidikan nonformal tersebut ?
10. Apa yang telah dilakukan oleh DISDIKPORA Kabupaten Polewali Mandar untuk menciptakan pendidikan kesetaraan yang berkualitas di Kabupaten Poolewali Mandar ?
11. Apakah ada program-program yang khusus diarahkan kepada tercapainya implementasi pendidikan kesetaraan yang berkualitas di kabupaten Polewali Mandar ?

**Pedoman Wawancara Guru, Pengelola PKBM dan SKB**

Hari / tanggal :

Waktu :

Tempat :

Narasumber :

Jabatan :

1. Menurut anda, apa hakikat dan tujuan mendasar dari pendidikan kesetaraan ?
2. Bagaimana proses implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi sejauh ini ?
3. Apakah semua kebutuhan telah terpenuhi dalam mendukung implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?
4. Bisa anda jelaskan faktor penghambat implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda kelola ?
5. Bisa anda jelaskan faktor pendukung implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda kelola ?
6. Apa yang anda ketahui tentang SKB ? (pertanyaan untuk PKBM)
7. Apa yang anda ketahui tentang PKBM ? (pertanyaan untuk SKB)
8. Menurut anda, apakah PKBM dan SKB memiliki kedudukan yang sama ?
9. Bisakah anda jelaskan latar belakang peserta didik yang mengikuti proses pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?
10. Bisakah anda jelaskan latar belakang pendidikan tenaga pengajar dalam pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?
11. Menurut anda, kebutuhan mendasar yang harus ada dalam proses implementasi pendidikan kesetaraan itu seperti apa ?
12. Bagaimana kepedulian pemerintah terhadap lembaga yang anda naungi terkait mengenai konteks implementasi pendidikan kesetaraan ? apakah sudah memuaskan ? jika iya, indikatornya apa ? jika belum, indikatornya apa ?
13. Seperti apa respon masyarakat terhadap keberadaan pendidikan kesetaraan yang diimplementasikan di lembaga yang anda naungi ?



### **Lampiran 3 : Hasil Wawancara**

#### **TRANSKRIP WAWANCARA KEPALA SEKSI KEAKSARAAN, KESETARAAN, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT YANG TELAH DIREDUKSI**

Hari / tanggal : 04 Mei 2015 & 20 Mei 2015

Waktu : 11.00 WITA & 13.30 WITA

Tempat : Ruang bidang PLS Disdikpora Polewali Mandar

Narasumber : FT

Jabatan : Kepala Seksi Kaksaraan, Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat

12. Menurut anda, apa hakikat dan tujuan mendasar pendidikan kesetaraan ?

Tujuan mendasarnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa terutama yang ber usia 13-35 tahun. Pendidikan kesetaraan juga untuk menuntaskan buta aksara dan putus sekolah.

13. Apakah implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh payung hukum yang menaunginya ?

Sudah sesuai, kita bisa lihat dari pengembalian 2000 lebih anak putus sekolah untuk kembali dapat bersekolah.

14. Apakah implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan sudah dikatakan berhasil di kabupaten polewali mandar ? jika iya, indikatornya apa ? jika belum indikatornya apa ?

Sudah berhasil banget. Indikatornya banyak, beberapa di antaranya adalah ada beberapa tokoh masyarakat lulusan kesetaraan yang sudah menjadi anggota DPRD, Bupati, dan PNS guru formal.

15. Apakah jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan formal (dalam konteks pendidikan kesetaraan) memiliki kedudukan yang sama ? jika iya, dasarnya apa ? jika tidak, dasarnya apa ?

Menurut saya tidak sama, pendidikan nonformal dilakukan 3 kali dalam se minggu sedangkan pendidikan formal dilakukan 6 kali dalam se minggu. namun secara konsep memang harus berkualitas tapi realitas yang membuatnya beda.

16. “lulusan sekolah pendidikan kesetaraan memiliki hak egilibilitas yang sama dan setara dengan lulusan sekolah formal”. Menurut anda, apa maksud dari pernyataan tersebut ?

Jauh perbedaannya dari segi standar kualitas, tapi kalau dibandingkan dari segi ijazah di antara ke dua jalur pendidikan tersebut, ijazah pendidikan kesetaraan lebih berkualitas karena ditandatangani langsung oleh kepala dinas.

17. Apa saja faktor penghambat implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar ?

Faktor penghambat yaitu masalah dana atau ekonomi sehingga belum ada biaya dari APBD untuk operasional pendidikan kesetaraan di Polewali Mandar. Kemudian, menyuruh masyarakat untuk kembali bersekolah sangatlah susah. Mereka tidak memiliki alasan untuk menjelaskan kenapa tidak mau bersekolah. Mungkin yang terakhir adalah tidak adanya kebijakan khusus.

18. Apa saja faktor pendukung implementasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar ?

Faktor pendukung ya adanya dana BOP itu.

19. Seperti apa bentuk kewenangan Seksi keaksaraan, kesetaraan dan masyarakat dalam menaungi PKBM dan SKB selaku lembaga pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar ?

Menindaklanjuti apa yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi atau Pusat. Melakukan monitoring 2 kali dalam se tahun dengan menggunakan dana APBD dengan jumlah alokasi 5 juta rupiah per satu kali monitoring.

20. Apa yang membedakan dari ke 2 lembaga pendidikan nonformal tersebut ?

SKB (Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat) di bawah naungan negeri sedangkan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) adalah milik masyarakat sepenuhnya dan sifatnya tidak jelas.

21. Apa yang telah dilakukan oleh DISDIKPORA Kabupaten Polewali Mandar untuk menciptakan pendidikan kesetaraan yang berkualitas di Kabupaten Polewali Mandar ?

Yang dilakukan adalah melakukan evaluasi setiap tahun dan monitoring yang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun.

22. Apakah ada program-program yang khusus diarahkan kepada tercapainya implementasi pendidikan kesetaraan yang berkualitas di Kabupaten Polewali Mandar ?

Sampai saat ini belum ada program khusus, bahkan APBD belum menyediakan alokasi dana untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan.

**TRANSKRIP WAWANCARA PENGELOLA PKBM DAN SKB YANG  
TELAH DIREDUKSI**

Hari / tanggal : 04 Mei 2015

Waktu : 10.30 WITA

Tempat : Ruang Kantor PKBM AD

Narasumber : JR

Jabatan : Bendahara PKBM dan mernagkap sebagai guru paket

14. Menurut anda, apa hakikat dan tujuan mendasar dari pendidikan kesetaraan ?

Menurut saya, pendidikan kesetaraan itu bertujuan untuk menyekolakan kembali orang yang tidak sekolah dan membantu orang yang tidak mempunyai ijazah agar mempunyai ijazah.

15. Bagaimana proses implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi sejauh ini ?

Tahun 2011 sempat terjadi proses belajar mengajar, namun sudah ditiadakan hingga saat ini. Biasanya peserta didik yang mendaftar program paket kesetaraan langsung ikut ujian sesuai jadwal. Jadi satu bulan sebelum ujian diadakan bimbingan bagi peserta didik untuk persiapan ujian.

16. Apakah semua kebutuhan telah terpenuhi dalam mendukung implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Saya kurang paham mengenai masalah itu. mungkin saja sudah terpenuhi, karena PKBM ini sudah banyak prestasi yang didapatkan

17. Bisa anda jelaskan faktor penghambat implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda kelola ?

Penghambatnya seperti faktor usia, faktor jarak, faktor dana, dan rasa gengsi masyarakat terhadap pendidikan paket.

18. Bisa anda jelaskan faktor pendukung implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda kelola ?

Faktor pendukungnya karena gedung sudah tersedia, PKBM ini juga dianggap yang terbaik di Kabupaten Polewali Mandar dan sudah mendapatkan banyak prestasi.

19. Apa yang anda ketahui tentang SKB ?

saya kurang begitu tahu tentang SKB. Mungkin SKB formal sedangkan PKBM tidak formal dan kedudukan SKB lebih diatas.

20. Menurut anda, apakah PKBM dan SKB memiliki kedudukan yang sama ?

SKB itu formal sedangkan PKBM nonformal dan kedudukannya tidak sama karena PKBM itu tidak resmi.

21. Bisakah anda jelaskan latar belakang peserta didik yang mengikuti proses pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Biasanya yang ikut program kesetaraan adalah orang-orang putus sekolah dan membutuhkan ijazah. Biasanya untuk keperluan mendaftar kerja dan untuk mendaftar sebagai Caleg (calon legislatif).

22. Bisakah anda jelaskan latar belakang pendidikan tenaga pengajar dalam pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Kebanyakan sarjana termasuk saya juga sarjana dan ada juga bukan. Tetapi tenaga pengajar murni bukan PNS.

23. Menurut anda, kebutuhan mendasar yang harus ada dalam proses implementasi pendidikan kesetaraan itu seperti apa ?

Adanya pendidik, gedung tempat belajar, peserta didik, dan buku-buku yang dibutuhkan.

24. Bagaimana kepedulian pemerintah terhadap lembaga yang anda naungi terkait mengenai konteks implementasi pendidikan kesetaraan ? apakah sudah memuaskan ? jika iya, indikatornya apa ? jika belum, indikatornya apa ?

Dana dari pemerintah tidak menentu. Dan pemerintah hanya sebatas pada pelaksanaan UNPK saja.

25. Seperti apa respon masyarakat terhadap keberadaan pendidikan kesetaraan yang diimplementasikan di lembaga yang anda naungi ?

Respon masyarakat sangat baik, karena keluarga pengelola adalah termasuk keluarga yang paling dihormati di daerah sini.

**TRANSKRIP WAWANCARA PENGELOLA PKBM DAN SKB YANG  
TELAH DIREDUKSI**

Hari / tanggal : 10 Mei 2015

Waktu : 20.00 WITA

Tempat : Rumah Pengelola

Narasumber : IS

Jabatan : Guru sekaligus ketua PKBM BB

1. Menurut anda, apa hakikat dan tujuan mendasar dari pendidikan kesetaraan ?

Hakikat dan tujuan pendidikan kesetaraan adalah ikut membantu pemerintah dalam program mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti membantu anak-anak putus sekolah karena faktor biaya dan kesadaran pendidikan.

2. Bagaimana proses implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi sejauh ini ?

Kegiatan belajar-mengajar kami lakukan sebanyak tiga kali dalam seminggu. Karena keterbatasan peserta didik dan juga pengaruh kondisi sosial dalam masyarakat sehingga dalam proses belajar-mengajar meskipun berbeda semester kami tetap gabung dalam satu kelas dan belajar bersama.

3. Apakah semua kebutuhan telah terpenuhi dalam mendukung implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

PKBM BB memiliki 7 tutor dan mengadakan proses belajar mengajar pendidikan kesetaraan 3 kali dalam seminggu yaitu pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Namun kebutuhan pendidikan di PKBM kami masih belum terpenuhi 100 %. Untuk gedung kami masih menumpang di MI DDI Sumberjo.

4. Bisa anda jelaskan faktor penghambat implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda kelola ?

Ada beberapa faktor yang paling menghambat, seperti musim panen yang membuat peserta didik jarang untuk datang bersekolah, faktor gengsi

masyarakat karena anggapan bahwa pendidikan kesetaraan adalah rendahan, dan kesadaran pendidikan masyarakat yang masih sangat kurang.

5. Bisa anda jelaskan faktor pendukung implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda kelola ?

Masyarakat sudah sangat mendukung dalam hal ini kepala desa dan kepala dusun sangat mendukung sepenuhnya terutama dalam proses sosialisasi program. Adanya anggaran dari pemerintah sebesar Rp. 27.500.000 pada tahun 2014 lalu untuk memenuhi kebutuhan lembaga seperti honor tutor, modul dan ATK, serta administrasi.

6. Apa yang anda ketahui tentang SKB ?

Saya kurang memahami SKB itu apa, mungkin SKB itu sama dengan PKBM.

7. Menurut anda, apakah PKBM dan SKB memiliki kedudukan yang sama ?

Setahu saya sama, karena ke duanya sama-sama bergerak pada lembaga pendidikan nonformal.

8. Bisakah anda jelaskan latar belakang peserta didik yang mengikuti proses pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Latar belakang peserta didik di antaranya adalah mereka yang miskin secara ekonomi, peserta didik yang kena DO dan mereka yang tidak bersekolah dan berada pada pergaulan bebas.

9. Bisakah anda jelaskan latar belakang pendidikan tenaga pengajar dalam pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Semuanya rata-rata S 1 dan sesuia dengan disiplin ilmunya masing-masing.

10. Menurut anda, kebutuhan mendasar yang harus ada dalam proses implementasi pendidikan kesetaraan itu seperti apa ?

Kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi adalah adanya warga belajar yang jelas, adanya pendidik, dan lengkapnya sarana dan prasarana penunjang kebutuhan pendidikan kesetaraan.

11. Bagaimana kepedulian pemerintah terhadap lembaga yang anda naungi terkait mengenai konteks implementasi pendidikan kesetaraan ?apakah

sudah memuaskan ? jika iya, indikatornya apa ? jika belum, indikatornya apa ?

Saya rasa sangat peduli. Dalam hal ini Disdikpora Polewali Mandar sudah sangat peduli terhadap lembaga kami. Indikatornya adalah adanya pelatihan, sosialisasi program, monitoring, dan juga pengadaan modul-modul belajar.

12. Seperti apa respon masyarakat terhadap keberadaan pendidikan kesetaraan yang diimplementasikan di lembaga yang anda naungi ?

Sangat mendukung. Itu dibuktikan dengan dipinjamkannya gedung kepada kami untuk melakukan proses belajar-mengajar. Pemerintah Desa juga sangat membantu dalam memberikan informasi kepada warga terkait program yang kami tawarkan.



**TRANSKRIP WAWANCARA PENGELOLA PKBM DAN SKB YANG  
TELAH DIREDUKSI**

Hari / tanggal : 15 Mei 2015

Waktu : 13.00 WITA

Tempat : Kantor DPC Partai Golkar

Narasumber : SB

Jabatan : Guru sekaligus sekretaris PKBM ADD

1. Menurut anda, apa hakikat dan tujuan mendasar dari pendidikan kesetaraan ?

Menurut saya, pendidikan kesetaraan itu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tidak sempat didapatkan di pendidikan formal.

2. Bagaimana proses implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi sejauh ini ?

Hampir sama dengan PKBM lain, kegiatan belajar mengajar pendidikan kesetaraan di PKBM ADD dilakukan dalam bentuk tutorial/tatap muka dengan bobot 40 % dan kegiatan mandiri dengan bobot 60 %.

3. Apakah semua kebutuhan telah terpenuhi dalam mendukung implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Belum terpenuhi 100 % .mungkin 90 % telah terpenuhi. Yang masih kurang adalah fasilitas media pembelajaran.

4. Bisa anda jelaskan faktor penghambat implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda kelola ?

Ada beberapa faktor yaitu, waktu tenaga pendidik yang terbatas mengingat mereka hanya sukarela dikarenakan memiliki prioritas lain. Media dan bahan belajar yang masih kurang, praktik keterampilan yang belum terpenuhi, dan yang paling penting adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang.

5. Bisa anda jelaskan faktor pendukung implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda kelola ?

Adanya bantuan dana BOP dari pemerintah. Adanya tutor yang mumpuni dan kelengkapan dari segi sarana dan prasarana.

6. Apa yang anda ketahui tentang SKB ?

Menurut saya, SKB adalah lembaga PKBM plat merah. Hampir semua jenis program yang dilaksanakan sama dengan yang dilaksanakan PKBM, tapi SKB milik pemerintah sedangkan PKBM milik masyarakat.

7. Menurut anda, apakah PKBM dan SKB memiliki kedudukan yang sama ?

Secara konsep memang harus sama. Namun pada kenyataannya dari segi struktural jelas berbeda, kemudian dari aspek sarana dan prasarana juga berbeda, serta birokrasi kepengurusan juga sangat berbeda.

8. Bisakah anda jelaskan latar belakang peserta didik yang mengikuti proses pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Kebanyakan yang ikut memiliki latar belakang putus sekolah kelas 3 pada jenjang SD, SMP, SMA. Ada juga yang merasa tidak mampu di sekolah formal sehingga memiliki kesetaraan sebagai alternatif. Ada juga yang sudah lulus tapi tidak lanjut. Lalu kemudian yang terkena DO.

9. Bisakah anda jelaskan latar belakang pendidikan tenaga pengajar dalam pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Kami memiliki 32 tutor aktif dan sebagian besar di antaranya berstatus pegawai negeri sipil.

10. Menurut anda, kebutuhan mendasar yang harus ada dalam proses implementasi pendidikan kesetaraan itu seperti apa ?

Menurut saya yang harus ada yaitu peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, dan tenaga administrasi. Ke semuanya itu yang paling penting menurut saya.

11. Bagaimana kepedulian pemerintah terhadap lembaga yang anda naungi terkait mengenai konteks implementasi pendidikan kesetaraan ? apakah sudah memuaskan ? jika iya, indikatornya apa ? jika belum, indikatornya apa ?

Respon pemerintah sangatlah baik. Kadang tidak memuaskan tapi lebih banyak memuaskan. Indikatornya yaitu adanya pelatihan tutor dan

sosialisasi penyelenggaraan program dan juga pendanaan meskipun tidak rutin.

12. Seperti apa respon masyarakat terhadap keberadaan pendidikan kesetaraan yang diimplementasikan di lembaga yang anda naungi ?

Sejauh ini respon masyarakat sangat baik. Masyarakat sudah mendukung keterlaksanaan program berupa motivasi penyelenggaraan program.

**TRANSKRIP WAWANCARA PENGELOLA PKBM DAN SKB YANG  
TELAH DIREDUKSI**

Hari / tanggal : 20 Mei 2015

Waktu : 16.00 WITA

Tempat : Rumah narasumber

Narasumber : SF

Jabatan : Guru sekaligus ketua PKBM ADD

1. Menurut anda, apa hakikat dan tujuan mendasar dari pendidikan kesetaraan ?

Menurut saya, pendidikan kesetaraan adalah merekrut orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya.

2. Bagaimana proses implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi sejauh ini ?

PKBM EM hanya mengadakan pendidikan kesetaraan program paket B. memiliki 7 tenaga tutor. Dalam satu kelas diisi maksimal 25 peserta didik. Kegiatan belajar mengajar diadakan 3 kali dalam se minggu yaitu pada hari jumat dan sabtu diisi dengan teori, hari minggu diisi dengan program keterampilan. Untuk keterampilan sendiri, kami mengadakan program tata boga dan tata busana. Namun, dalam implementasinya, mau bagaimana lagi, kami tetap mengikutsertakan peserta didik ke dalam program meskipun tanpa harus mengikuti proses belajar mengajar, namun dengan syarat tertentu seperti dengan mengikuti kegiatan mandiri dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Apakah semua kebutuhan telah terpenuhi dalam mendukung implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Belum terpenuhi 100 %. Kami hanya memiliki 1 ruang kelas dan itu belum cukup menampung peserta didik di sini.

4. Bisa anda jelaskan faktor penghambat implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda kelola ?

Ada beberapa faktor penghambat seperti, adanya tenaga pendidik yang waktunya bentura dengan pekerjaan lain, warga kurang konsisten untuk datang belajar karena faktor malu dan gengsi, dan terkadang gurunya malas kalau siswanya sedikit.

5. Bisa anda jelaskan faktor pendukung implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda kelola ?

Faktor pendukungnya adalah karena masyarakat sangat mendukung keberadaan kami dan kesadaran pendidikan di sekitar daerah kami sudah lumayan mapan.

6. Apa yang anda ketahui tentang SKB ?

SKB adalah mitra PKBM tetapi SKB di kelola oleh pemerintah sedangkan PKBM dikelola masyarakat

7. Menurut anda, apakah PKBM dan SKB memiliki kedudukan yang sama ?

Tidak, jelas sangat berbeda, sebab pada kenyataannya SKB lebih diprioritaskan dibanding PKBM.

8. Bisakah anda jelaskan latar belakang peserta didik yang mengikuti proses pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Kebanyakan peserta didik di lembaga kami adalah anak-anak putus sekolah, ibu rumah tangga, dan nelayan.

9. Bisakah anda jelaskan latar belakang pendidikan tenaga pengajar dalam pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Kebetulan tenaga tutor di lembaga kami semuanya berlatar belakang s1 non pns.

10. Menurut anda, kebutuhan mendasar yang harus ada dalam proses implementasi pendidikan kesetaraan itu seperti apa ?

Kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi adalah adanya gedung untuk belajar, jelasnya jumlah peserta didik, ketersediaan pendidik, dan kelengkapan bahan-bahan ajar seperti atk dll.

11. Bagaimana kepedulian pemerintah terhadap lembaga yang anda naungi terkait mengenai konteks implementasi pendidikan kesetaraan ? apakah sudah memuaskan ? jika iya, indikatornya apa ? jika belum, indikatornya apa ?

Ada kecenderungan pemerintah bersikap memihak pada lembaga tertentu, dan ini yang kami rasakan. Entah itu benar atau tidak, sehingga kami belum bisa mengambil kesimpulan bahwa pemerintah baik atau tidak optimal.

12. Seperti apa respon masyarakat terhadap keberadaan pendidikan kesetaraan yang diimplementasikan di lembaga yang anda naungi ?

Alhamdulillah sampai saat ini masyarakat sangat merespon dan mendukung lembaga kami. Hal ini disebabkan karena kami menawarkan program-program keterampilan yang membuat masyarakat tertarik seperti tata busana dan tata boga.

**TRANSKRIP WAWANCARA PENGELOLA PKBM DAN SKB YANG  
TELAH DIREDUKSI**

Hari / tanggal : 08 Mei 2015

Waktu : 9.30 WITA

Tempat : SKB PM

Narasumber : MA

Jabatan : Ketua SKB PM

1. Menurut anda, apa hakikat dan tujuan mendasar dari pendidikan kesetaraan ?

Pendidikan kesetaraan sama dengan pendidikan formal yaitu sama-sama memberikan kesempatan orang-orang untuk memperoleh pendidikan.

2. Bagaimana proses implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi sejauh ini ?

Kami melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kami menyatakan implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga kami berhasil.

3. Apakah semua kebutuhan telah terpenuhi dalam mendukung implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Aspek fisik seluruhnya sudah terpenuhi begitupun dengan kebutuhan pamong belajar juga sudah terpenuhi. Tenaga administrasi Alhamdulillah kita lengkap

4. Bisa anda jelaskan faktor penghambat implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda kelola ?

Satu-satunya faktor penghambat yaitu pengaturan jadwal belajar peserta didik yang harus kami sesuaikan dengan kondisi warga.

5. Bisa anda jelaskan faktor pendukung implementasi pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda kelola ?

Tenaga pendidik yang sudah mumpuni, fasilitas sarana yang sudah lengkap, dan dukungan pemerintah yang sangat besar.

6. Apa yang anda ketahui tentang PKBM ?

Program-program yang dilaksanakan oleh PKBM tidak jauh beda dengan program-program yang dilaksanakan oleh SKB. Tetapi yang membedakan di antara ke duanya adalah SKB merupakan lembaga formal pemerintah yang diatur oleh pemerintah sedangkan PKBM hanya swadaya masyarakat.

7. Menurut anda, apakah PKBM dan SKB memiliki kedudukan yang sama ?

Sangat jelas bahwa kedudukannya tidak sama.

8. Bisakah anda jelaskan latar belakang peserta didik yang mengikuti proses pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Orang-orang yang putus sekolah dan orang-orang kurang mampu secara ekonomi

9. Bisakah anda jelaskan latar belakang pendidikan tenaga pengajar dalam pendidikan kesetaraan di lembaga yang anda naungi ?

Semua tenaga pamong belajar di SKB kami berlatar belakang pendidikan sarjana yang sesuai dengan bidang ke ilmuannya dan seluruhnya adalah pegawai negeri sipil.

10. Menurut anda, kebutuhan mendasar yang harus ada dalam proses implementasi pendidikan kesetaraan itu seperti apa ?

Semua aspek baik itu fisik maupun nonfisik yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan harus terpenuhi.

11. Bagaimana kepedulian pemerintah terhadap lembaga yang anda naungi terkait mengenai konteks implementasi pendidikan kesetaraan ? apakah sudah memuaskan ? jika iya, indikatornya apa ? jika belum, indikatornya apa ?

Alhamdulillah peran pemerintah terhadap SKB PM sangat memuaskan. Kami pun membuka mitra dengan institusi-institusi lain seperti misalnya kerja sama dengan Universitas Negeri Makassar.

12. Seperti apa respon masyarakat terhadap keberadaan pendidikan kesetaraan yang diimplementasikan di lembaga yang anda naungi ?

Sangat besar respon masyarakat terhadap keberadaan SKB PM. Program-program yang kami laksanakan termasuk pendidikan kesetaraan adalah program-program yang berbasis pendataan.



#### **Lampiran 4 :Foto-foto**



**Halaman Depan PKBM AD**



**Kondisi Ruangan PKBM BB**



**Sosialisasi UNPK di PKBM EM**



**Ketersediaan Buku-Buku di PKBM EM**



**Sosialisasi UNPK di PKBM AD**



**Kondisi ruang baca PKBM ADD**

## Lampiran 5 : Lembar Pengesahan Proposal Penelitian

### Lembar Pengesahan


Proposal penelitian berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT"** yang disusun oleh:

Nama : A.Mappatunru  
NIM : 11110244030  
Program Studi : Kebijakan Pendidikan  
Jurusan : Filsafat dan Sosiologi Pendidikan

telah diketahui dan disetujui sebagai persyaratan mengambil data untuk penelitian skripsi pada Maret s.d Mei 2015.

Yogyakarta, 5 Maret 2015

Pembimbing

  
Ariefa Efianingrum, M.Si.  
NIP. 19740411 199802 2 001

Mengetahui,


  
Wakil Dekan I FIP UNY  
Dr. Sugito, M. A.  
NIP. 19600410 198503 1 002

Ketua Jurusan FSP

  
Dr. Mami Majaroh, M.Pd.  
NIP. 19680308 199203 2 001




## Lampiran 6 :Surat Ijin Penelitian Fakultas Ilmu Pendidikan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281  
Telp (0274) 586168 Haring, Fax (0274) 540611, Dekan Telp (0274) 520094  
Telp (0274) 386168 Psw (221, 223, 224, 293, 344, 345, 366, 368, 369, 401, 402, 403, 417)



---

No. : **525/UN34.11/PL/2015**

Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan izin Penelitian

**9 Maret 2015**

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Kesbanglinmas Prov. DIY  
Jl. Jenderal Sudirman 5  
Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:


Nama	: A. MAPPATUNRU
NIM	: 11110244030
Prodi/Jurusan	: KP/FSP
Alamat	: Jl. Sungai Maloso Kelurahan Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan	: Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi	: Disdikpora Kab. Polewali Mandar, DPRD Kab. Polewali Mandar, SKB dan PKBM, BPSDMPK Prov. Sulawesi Barat
Subyek	: Ketua Komisi 4 Kab. Polewali Mandar, Kepala Seksi Keaksaraan Kesetaraan dan Masyarakat Bidang PLS DISDIKPORA Kab. Polewali Mandar, Pengelola SKB dan PKBM, Pendidik dan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan, Masyarakat
Obyek	: Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan
Waktu	: Maret - Mei 2015
Judul	: Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Riyanto, M. Pd.  
NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Yth:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FIP
3. Ketua Jurusan FSP FIP
4. Kabag TU
5. Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan

Universitas Negeri Yogyakarta

## Lampiran 7 : Surat Ijin Penelitian Provinsi Sulawesi Barat



### PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Il. H. Abdul Malik Pattana Enderg (Komp. Gubernur Sulawesi Barat) Telp/Fax (0426)2325170 Mamuju 91512

#### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ \56/BKBP

1. Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Surat Permohonan Izin Penelitian Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 074/749/Kesbang/2015 Tanggal 9 Maret 2015.
2. Menimbang : Untuk tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Penelitian dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu adanya Rekomendasi/ Izin Penelitian.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **A. MAPPATUNRU**  
Nim : 11110244030  
Fakultas/Jurusan : Kebijakan Pendidikan / Filsafat dan Sosiologi Pendidikan  
Alamat : Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman

Untuk melakukan Penelitian di Daerah/ Kantor Saudara dengan Proposal berjudul :

**" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT "**

Yang akan dilaksanakan pada : Tanggal 16 Maret s/d 31 Mei 2015

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan dan termasuk apabila ternyata pemegang surat rekomendasi/Izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mamuju, 22 April 2015

an.KEPALA BADAN  
KABID.KETAHANAN SENI,  
BUDAYA,AGAMA,  
KEMASYARAKATAN DAN



**MUHAMMAD SALIL,SE.M.Si**

Pengantar Pembina/IV.a

NIP : 19640106 199203 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sulawesi Barat (Sebagai Laporan) di Mamuju;
3. Bupati Polman Cq. Badan KesbangPol dan Linmas Kab. Polman di Polman;
4. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta;
5. Saudara (i) **A.Mappatunru.**

## Lampiran 8 : Surat Ijin Penelitian Kabupaten Polewali Mandar



### PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Alamat : Jalan Manunggal Nomor 11 PekkabataTelp./Fax (0428) 21031, e-mail : kesbanglinmaspolman@gmail.com  
POLEWALI 91315

#### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/465/KESBANG

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum.
- Membaca : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/150/BKBP, tanggal 22 April 2015 Perihal Rekomendasi Penelitian.

#### MEMBERIKAN REKOMENDASI

- Kepada : Nama : **A. MAPPATUNRU**  
Tempat/ tanggal lahir : Pangkep, 28 Desember 1992  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Filsafat dan Sosiologi Pendidikan  
Alamat : Lampa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
- Untuk : Melakukan Penelitian di DISDIKPORA Kab. Polewali Mandar, DPRD Kab. Polewali Mandar, PKBM Wch Yuri Kecamatan Campalagian, PKBM Addarasah Kecamatan Matakali, PKBM Epsah Mandiri Kecamatan Campalagian, PKBM Assyirah Kecamatan Mapilli, PKBM Atjo Djalawali Kecamatan Mapilli, SKB Polewali Mandar Kecamatan Polewali, PKBM Bangsa Kecamatan Wonomulyo terhitung pada bulan Mei 2015 dengan Judul **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat"**.

Adapun rekomendasi ini di buat dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil **"Skripsi"** kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi di keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Polewali  
pada tanggal : 22 Mei 2015

a.n. BUPATI POLEWALI MANDAR  
Kepala Kantor Kesbang dan Linmas  
Ub. Ptt. Kasi Kesatuan Bangsa,

**MUSLIM, S.Pt**

Pangkat : Penata Muda Tk. I  
NIP : 19770319 201101 1 001

#### Tembusan :

1. Bupati Polewali Mandar (sebagai laporan);
2. Ka. Badan KesbangPol Provinsi Sulbar;
3. Muspida Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala DISDIKPORA Kabupaten Polewali Mandar;
5. Dekan Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta;
6. Para Camat Masing-Masing di Tempat;
7. SKB dan PKBM Masing-Masing Yang Bersangkutan.

